

# **GERAKAN SOSIAL**

Telaah Aksi Perlawanan Pengamen

Abdullah Muzakar

Penerbit:

**Lontar Mediatama**

# **GERAKAN SOSIAL: Telaah Aksi Perlawanan Pengamen**

Abdullah Muzakar

Editor: Baharudin, SH, M. AP

Lay Out/ Desain Sampul: Abdul Azizurrahman, S. Psi., ME

Penerbit **Lontar Mediatama**, Yogyakarta

Bekerjasama dengan

**UNIVERSITAS HAMZANWADI PANCOR**

Jalan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid Kode Pos. 83612 Pancor, Selong

Lombok Timur Telp. (0376) 21394. Fax. (0376) 22954

Website:<http://www.hamzanwadi.ac.id>,

e-mail: [universitas@hamzanwadi.ac.id](mailto:universitas@hamzanwadi.ac.id)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Gerakan Sosial – Abdullah Muzakar – Yogyakarta

Lontar Mediatama

x + 192 hlm. 14 cm x 21 cm.

ISBN: 978-602-5482-11-3

Cetakan tahun: 2017

---

## **Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72**

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sua-tu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda yang banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

## MOTTO

“Dan hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah yang beruntung”  
(Al-Imran 104)

“Tunduk tertindas atau bangkit melawan, sebab mundur adalah penghianatan” (SMKR)

“Diam melihat penindasan adalah sama artinya melegalkan penindasan”

“Kita tidak perlu takut pada hantu komunis, tapi yang perlu kita takuti adalah merajalelanya penyakit kemiskinan”

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini aku persembahkan kepada mereka yang selalu memberikan aku spirit untuk selalu berani mencoba dan belajar, serta berbuat yang terbaik. Curahan kasih sayang mereka telah menumbuhkan rasa percaya diriku, pada kemampuan yang aku miliki: Pertama, Kedua orang tuaku (Ibu Djariah dan Bpk. Amrillah), yang tidak pernah mengeluh dan selalu tersenyum menghadapi gelombang tuntutan anak-anaknya.

Kedua, Ketiga Saudaraku (Kak Abdul Azizurrahman, Kak Imamul Huda, dan Dek Siti Uswatun Hasanah), dengan ikatan persaudaraan yang kuat telah memberikan kehangatan dan kebanggaan sebagai keluarga.

Ketiga, Buat DEDE yang selalu memberikan semangat dan dukungan dikala aku menjalani pertapaanku di Yogya.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Buku Gerakan Sosial; Telaah aksi perlawanan Pengamen ini.

Sholawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang telah diutus Allah SWT, ke bumi untuk memberikan suri tauladan dan pencerahan bagi sekalian umat manusia, penulis selalu sadar berkat ajarannya juga yang menjadikan penulis memiliki acuan dan selalu optimis sebagai seorang muslim untuk selalu berusaha dan berkarya bagi kebaikan sesama, melalui kerja-kerja akademis.

Ketika proses penyusunan Buku Gerakan Sosial; Telaah aksi perlawanan Pengamen ini, penulis telah mendapatkan bimbingan, pengarahan, dan perhatian dari segenap pihak, baik pihak FISIPOL UGM, maupun dari kawan-kawan gerakan pengamen. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada mereka, yakni:

1. Dr. Susetiawan yang telah dengan sabar dan rela hati mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dari proses penyusunan sampai menjadi bahan utama Buku ini.
2. Prof. Tadjuddin Noer Effendi, Dr. Suharko, Ari Sujito. M.Si, yang telah menguji dan memberikan kritik bagi penyempurnaannya.
3. Mbak Neni dan Pak Tugimin yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada penulis selama menyelesaikan penulisan Buku ini.
4. Kawan-kawan Serikat Pengamen Indonesia (SPI) dan Tim Advokasi Arus Bawah (TAABAH), yang telah memberikan ruang yang lebar kepada penulis untuk memahami keberadaan gerakan pengamen.
5. Kawan-kawan seperjuangan di Yogyakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Media (ELKAM), Persatuan Warga Tani (PEWARTA), Keluarga Alumni Lembaga Dakwah Kampus UWMY, Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Univ. Widya Mataram Yogyakarta, Jaringan Kajian dan Avokasi Kebijakan Publik (JANGKEP) Yogyakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UWMY.
6. Rektor dan civitas akademika Universitas Hamzanwadi Pancor.

Mudah-mudahan segala amal dan jasa baik yang telah diberikan dan dikorbankan kepada penulis selama ini mendapatkan balasan dan limpahan berkah pahala, kebahagiaan dan keselamatan baik dunia dan akhirat dari Allah SWT, *Amin ya Robbal a'lamin*.

Selain itu, penulis juga mengharapakan dari segenap pihak dan pembaca yang budiman, kiranya berkenan untuk memberikan sumbangsih kritik, saran dan koreksi terhadap

Buku ini, guna perbaikan dan peningkatan kualitas karya akademik bagi penulis di masa-masa mendatang. Dan terakhir penulis harapkan semoga Buku Gerakan Sosial; Telaah aksi perlawanan Pengamen ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca yang membutuhkannya, semoga.

Mujur - Lombok Tengah, 27 Maret 2017

Penulis: Abdullah Muzakar



GERAKAN SOSIAL  
[TELAAH AKSI PERLAWANAN PENGAMEN]





# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	ix
BAB 1 AKAR SEJARAH PENGAMEN .....	1
BAB 2 KONSEPSI TEORITIS GERAKAN SOSIAL ....	9
A. Makna Sebuah Gerakan .....	9
B. Keberadaan Gerakan Pengamen .....	24
C. Konsep Kelas .....	25
BAB 3 DINAMIKA PENGAMEN DALAM SETTING KESEJARAHAN .....	33
A. Kota Yogyakarta Antara Dunia Citra dan Perkembangan .....	33
B. Gaya Hidup dan Marginalisasi Kaum Miskin Kota .....	42
C. Keberadaan Instansi Pemerintah .....	48
D. Sejarah Kultural dan Kategorisasi Pengamen .....	52
E. Penyebaran dan Wilayah Operasional Pengamen di DIY .....	59
F. Sejarah Gerakan Pengamen di DIY .....	60

G. Dua Organisasi Pengamen Gerakan; SPI dan TAABAH .....	75
BAB 4 KEMUNCULAN GERAKAN PENGAMEN...	85
A. Kemiskinan dan Marginalisasi .....	87
B. Basis Materi dan Kesadaran Kelas .....	102
C. Peran Intelektual Organik dalam Relasi Kekuasaan .....	110
D. Infiltrasi Kapitalisme dan Keberadaan Pemerintah .....	115
E. Dialektika Antar Gerakan Sosial .....	123
BAB 5 POLA GERAKAN PENGAMEN .....	124
A. Pentingnya Organisasi Bagi Gerakan Pengamen	126
B. Seni Sebagai Media Perjuangan .....	135
C. Dari ‘Social Movement’ ke ‘Political Movement’	146
D. Mengupayakan Pendanaan .....	150
BAB 6 ALIANSI DENGAN GERAKAN SOSIAL.....	160
A. Pentingnya Aliansi .....	162
B. Rasionalitas Kawan atau Lawan .....	165
C. Bermain di Antara Kepentingan .....	168
D. Polarisasi Gerakan Pengamen .....	170
BAB 7 MENEGASKAN GERAKAN PENGAMEN SE- BAGAI KEKUATAN PERUBAHAN .....	175
A. Resistensi Arus Bawah .....	177
B. Menegaskan Diri Meraih Pengakuan .....	179
C. Belajar Dari Kelemahan.....	180
D. Apa Yang Dapat Kita Pelajari Dari Studi Ini .....	183
DAFTAR PUSTAKA.....	185
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



## BAB 1

### AKAR SEJARAH PENGAMEN

Persepsi atas pengamen yang pertama muncul dalam benak sebagian besar orang adalah gambaran sosok yang banyak dijumpai ketika kita naik bus kota, di emperan pertokoan, rumah makan, di jalan-jalan kampung atau di tempat-tempat umum lainnya, memainkan musik seadanya, bernyanyi dengan suara keras, terkadang juga sering sumbang dan tidak beraturan. Mereka kemudian langsung pergi atau tidak menyelesaikan lagunya yang sedang dinyanyikan ketika sudah diberi upah walau sekedar uang recehan. Tidak jarang hal yang ikut melekat dalam diri pengamen adalah mengganggu kenyamanan khususnya para pengguna angkutan umum.

Pada sisi dunia musik, pengamen sering disebut penyanyi jalanan sementara musik yang mereka mainkan dikenal sebagai musik jalanan. Penyebutan itu salah kaprah, karena pengertian musik jalanan dan penyanyi jalanan tidaklah sesederhana terminologi yang umumnya dipahami. Musik

jalanan dan penyanyi jalanan mempunyai disiplin dan pengertian yang spesifik, bahkan merupakan suatu bentuk dari sebuah warna musik yang berkembang di dunia kesenian. Keberadaan musik jalanan ini sudah mulai berkembang sejak abad pertengahan terutama di Eropa,<sup>1</sup> seiring dengan semakin pesatnya perkembangan musik gereja (Liturgi). Di Perancis musik jalanan disebut '*troubadour*' dan di Jerman disebut '*minnesaenger*'. Yang masih banyak melakukan budaya musik jalanan ini adalah kaum Gypsi di Spanyol.

Keberadaan musik jalanan telah banyak melahirkan musisi bertaraf nasional dan internasional seperti Bob Dylan dengan salah satu karya monumentalnya '*Blowing In the Wind*' yang telah direkam dalam banyak versi. Pengaruh musik jalanan juga telah banyak mewarnai musisi-musisi besar di tanah air, seperti Iwan Fals, Leo Kristi, Kuntet Mangkulangit, Slank dan banyak musisi lainnya.

Keberadaan seni, khususnya musik sebagai media perlawanan terhadap status kemapanan kekuasaan yang menindas, sebagaimana yang ditunjukkan pada masa rezim Orde Baru, telah menempatkan kekuatan seni musik sebagai media yang cukup efektif dalam melakukan kritik dan protes yang dikemas dalam lirik-lirik lagu. Gelegar lagu Bentunya Iwan Fals merupakan salah satu penyaluran ditengah represifitas dan ketidakadilan penguasa Orde Baru, selama 32 tahun masa kekuasaannya.

Ketika Orde Baru runtuh dan terjadi pergantian kekuasaan, suara pengamen dengan musik jalannya telah juga ikut mewarnai. Tiada aksi turun jalan yang tidak disertai oleh kelompok pengamen yang ikut mengobarkan semangat para demonstran dalam menumbangkan kekuatan rezim Soeharto. Ketika proses reformasi itu dari kekuatan

---

1 Media Ekspresi., "Musik Jalanan dan Pengamen", No. 008 Th. Ke. 2 April 2001

pengamen juga telah ikut jatuh korban seperti Gilang dan mungkin Wiji Thukul.

Selain kekuatan lirik lagu yang bernada kritik sosial yang dimiliki pengamen, ternyata pengamen tidak berhenti pada kerja-kerja kesenian, mereka juga mengorganisir diri dalam kekuatan organisasi pengamen. Pada era 90-an awal mulai muncul organisasi-organisasi pengamen yang memiliki karakteristik sebagai organisasi gerakan perlawanan, dan bersamaan dengan terjadinya proses konsolidasi kekuatan gerakan, seperti gerakan mahasiswa, gerakan pengamen juga secara dialektis terlibat dalam arus gerakan latent penentangan hegemoni kekuasaan rezim Orde Baru. Di tingkat internal, kekuatan gerakan pengamen juga terjadi konsolidasi dan proses pemapanan kekuatan sebagai bagian dari kekuatan gerakan sosial, mereka mulai dihitung sebagai salah satu kekuatan perubahan.

Berangkat dari keterlibatan pengamen dalam gerakan massa di Indonesia yang cukup intens, menjadi hal yang menarik untuk memahami keberadaan pengamen sebagai bagian dari kekuatan gerakan massa di Indonesia. Persoalan yang menarik dari keberadaan gerakan pengamen khususnya di Yogyakarta, selain intensitas keterlibatan mereka dalam setiap even aksi jalanan, baik sebatas supporting maupun menjadi bagian langsung dari organ aliansi gerakan massa, organisasi pengamen mampu menunjukkan ketahanan (konsistensi) dalam menjaga kontinuitas gerakan, sekalipun harus dibanding dengan organ gerakan mahasiswa yang selama ini telah menjadi salah satu icon sejarah gerakan massa di Indonesia. Gerakan pengamen tidak kalah, baik dalam penataan organisasi, program-program yang dijalankan, maupun metode gerakan yang dilakukan.

Kalau selama ini studi-studi gerakan banyak berkuat pada

studi tentang gerakan petani, buruh, mahasiswa dan NGO's, maka menjadi hal penting untuk adanya studi lebih jauh untuk melihat gerakan pengamen. Karena dengan kehadiran mereka ke dalam kenchah gerakan perlawanan penumbangan pemerintah Orde Baru menunjukkan eksistensi mereka dilihat sebagai kekuatan baru dalam wacana akademis yang berkaitan dengan studi gerakan sosial di Indonesia. Karena itu pertanyaan mendasar dari studi tentang gerakan pengamen ini adalah bagaimana mengungkap latar belakang dan motif dari kemunculan gerakan pengamen. Pertanyaan mendasar ini dikemukakan untuk melihat apakah gerakan pengamen hanya merupakan gerakan spontanitas (reaksioner) yang sifatnya sesaat atau gerakan pengamen justru memiliki basis kesadaran matrial atas kondisi yang dialaminya dan mendorong mereka memilih jalan untuk melakukan kerja-kerja gerakan, karena sifat "protest" akan sangat berbeda dengan sifat yang dikandung "movement".

Sebelum lebih jauh memahami akar kemunculan gerakan pengamen, perlu terlebih dahulu memahami keberadaan pengamen dari perspektif kultur dan sosio-historis dalam konteks Indonesia. Mengacu dari pendapat sejarawan Onghokham, maka keberadaan pengamen memiliki akar historis dan budaya, ini terlihat dari keberadaan rombongan tukang ngamen dan reog, sebagai bagian dari realitas gelandangan. Karena gelandangan juga dipahami sebagai bentuk tradisi budaya pengembara yang sudah muncul dalam masyarakat tradisional, seperti keberadaan "satrio lelono" atau "bocah angon".<sup>2</sup>

Catatan lain yang berkaitan dengan akar historis dan budaya pengamen juga sudah ada sejak sekitar abad

---

2 Onghokham., "Gelandangan Sepanjang Zaman" dalam "GELANDANGAN, Pandangan Ilmuan Sosial", LP3ES, tahun 1991, cet. IV, hal. 6.

ketigabelas, saat kejayaan Kediri atau Kahuripan. Saat itu sudah dikenal rombongan kesenian musik yang berjalan dari satu tempat ketempat lain, dan menghibur lewat syair atau pantun yang berisi dongeng Panji. Mereka akrab disebut sebagai Dalang Kentrung. Keberadaan mereka terkadang berarti sakral bagi masyarakat yang dilewatinya, karena apa yang mereka lantunkan tidak sekedar hiburan, tetapi merupakan nasehat, isyarat bahkan ramalan masa depan dari situasi kekinian.<sup>3</sup>

Kalau melihat kelompok pengamen sebagai bagian dari budaya mengembara, maka hal yang menarik kalau itu dikaitkan dengan dinamika keterlibatan mereka dalam proses pergerakan kemerdekaan, yang dari sisi perspektif Onghokham mengungkapkan bahwa keberadaan pengembara banyak dipengaruhi oleh tekanan pemerintah Kolonial ataupun oleh penguasa lainnya. Banyak diantara pengembara itu meninggalkan tempat tinggalnya karena pajak atau beban lain yang tinggi atau karena tanah mereka disita oleh penguasa. Dalam hal ini tekanan dari negara merupakan unsur yang membuat mereka menjadi pengembara sehingga sentimen anti kestabilan cukup besar di antara mereka.<sup>4</sup>

Untuk memahami lebih jauh keberadaan gerakan pengamen selain dari sisi historis dan budaya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memahami keberadaan pengamen sebagai bagian yang tidak terlepas dari proses '*mode of production*' masyarakat, artinya pergeseran dari agriculture ke industrialisasi telah menempatkan pengamen pada satu kondisi yang berbeda. Karena itu dalam studi ini keberadaan pengamen tidak bisa dilepaskan sebagai bagian dari industrialisasi yang terjadi pada wilayah perkotaan,

---

3 Ekspresi., Op. Cit., hal. 1

4 Onghokham., Op., Cit., hal. 8

yang secara struktural menyisakan beberapa kebijakan pembangunan yang timpang, konsentrasi pembangunan kota dan cenderung mengabaikan pembangunan desa telah membuka ruang bagi mengalirnya migran ke kota. Diperparah lagi dengan kebijakan yang menitik tekankan pada pembangunan teknologi padat modal di sektor industri, berimplikasi pada meningkatnya pengangguran, karena urbanisasi yang terjadi bukan karena industrialisasi sebagaimana istilah Hozelitz yang disebut sebagai “Urbanisasi tanpa Industrialisasi”, atau dalam istilah McGee disebut “urbanisasi semu”.<sup>5</sup>

Selain itu dikemukakan Heru Nugroho bahwa proses industrialisasi seperti pembangunan pabrik-pabrik dan industri-industri -baik skala kecil, menengah dan besar- dibangun di Kota-kota yang berakibat pada perubahan lingkungan (Fisik, sosial, politik, ekonomi dan budaya). Karena kesempatan kerja tumbuh di Kota-kota besar yang berimplikasi pada terjadinya migrasi desa-kota besar-besaran. Kota-kota yang memiliki industri tumbuh dengan jumlah penduduk yang semakin besar sehingga menciptakan segudang permasalahan sosial.<sup>6</sup>

Konsekwensi kebijakan pembangunan yang dikonsentrasikan di wilayah perkotaan berimplikasi pada membengkaknya sektor informal dan ini menjadi femomena umum perkembangan kota-kota di dunia ketiga. Pekerjaan mengamen menjadi salah satu pilihan selain bekerja di sektor informal. Ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan

---

5 Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi (peny.), “Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota”, diterbitkan untuk Yayasan Obor Indonesia dan Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM, penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1985, hal. IX.

6 Heru Nugroho., “Menumbuhkan Ide-ide Kritis”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet. II, tahun 2001, hal. 76-77



industri yang bertitik tekan pada industri padat modal dengan arus urbanisasi tenaga kerja yang mengalir ke kota, telah membawa konsekwensi menumpuknya kaum proletar kota (baca: kaum miskin kota), karena kota tidak lagi mampu menampung arus pekerja yang datang dari wilayah pedesaan. Karena itu aktivitas mengamen lebih dipahami sebagai implikasi langsung dari kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah. Pekerjaan mengamen bukanlah pilihan profesi, tapi secara umum lebih karena keterpaksaan untuk mempertahankan hidup (*survival strategy*). Dan yang lebih tragis lagi apa yang diyakini sebagai pilihan untuk bertahan hidup juga ditekan oleh kebijakan-kebijakan pelarangan, penggusuran dan penggarukan yang dilakukan aparaturnegara, maka gerakan perlawanan menjadi hal yang rasional untuk dilakukan, tinggal persoalannya adalah seberapa kuat kaum miskin kota melakukan perlawanan terhadap struktur dan sistem yang ada.

Untuk menjawab kemungkinan kaum miskin kota menjadi kekuatan strategis atau kekuatan kelas revolusioner yang akan melakukan perubahan, ada dua perspektif kemungkinan yang bisa terjadi. Dari perspektif analisis Marx<sup>7</sup> berpendapat bahwa kaum miskin di Kota merupakan kelompok yang berpotensi untuk mengadakan gerakan yang revolusioner di Kota Dunia Ketiga. Salah satu yang mendukung pendapat ini ialah Frans Fanon yang mengamati perubahan struktur politik yang terjadi di Algeria. Akan tetapi pandangan Frans Fanon ditolak oleh McGee dan Breman<sup>8</sup> dengan argumentasi bahwa kemiskinan dan fragmentasi struktur sosial-ekonomi di Kota Dunia Ketiga tidak sama dengan proses munculnya rakyat jelata pada tahapan

---

7 Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi (peny.), Op, Cit. hal. x

8 Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi (peny.), Op, Cit. Hal. x-xi

pembangunan industri di negara maju. Kaum miskin kota Dunia Ketiga, terutama yang terlibat dalam sektor informal, terpecah-pecah dan tidak mampu mengorganisir diri untuk mengadakan perombakan struktural. Kenyataannya, karena ketidakmampuan dan kemiskinan, mereka mudah dikelola oleh penguasa.

Berangkat dari dua perspektif di atas dalam konteks memahami gerakan pengamen, apakah akan mampu menjadi satu kekuatan perubah atau tidak, akan sangat ditentukan oleh seberapa besar kekuatan yang dimiliki gerakan pengamen.

## **BAB 2**

# **KONSEPSI TEORITIS GERAKAN SOSIAL**

### **A. Makna Sebuah Gerakan**

Sebelum memberikan definisi atau konsep tentang gerakan, perlu dijelaskan bahwa gerakan memiliki varian yang cukup beragam, seperti gerakan sosial, gerakan politik, gerakan kebudayaan, gerakan keagamaan dan varian gerakan lainnya. Kesemua bentuk gerakan yang ada memiliki orientasi terhadap perubahan dan merupakan respon atas sesuatu yang dianggap tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang diidealkan.

Berkaitan dengan kepentingan studi gerakan pengamen, ini lebih dilihat pada pola kecendrungan antara gerakan sosial dan gerakan politik. Hal ini dilakukan berangkat dari apa yang secara umum diperlihatkan oleh organisasi-organisasi

gerakan pengamen, khususnya organisasi SPI dan TAABAH yang menjadi subyek penelitian. Adapun konsep tentang gerakan sosial dan politik dipahami sebagai pola gerakan yang memiliki perbedaan dalam hal orientasi capain dari gerakan yang dilakukan. Gerakan sosial dipahami sebagai bentuk dari upaya perubahan pada lingkup komunitas atau kelompok tertentu, dengan tidak berorientasi pada capaian kekuasaan, sementara gerakan politik merupakan kebalikan dari gerakan sosial yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, kekuasaan di sini diartikan sebagai wilayah perebutan posisi pada struktur kelembagaan negara, sehingga umumnya gerakan politik mengambil wilayah perjuangan melalui media kelembagaan partai politik dan parlemen. Persoalan apakah gerakan yang dilakukan TAABAH dan SPI merupakan bentuk dari gerakan sosial atau gerakan politik akan menjadi pembahasan dalam bab-bab berikutnya. Akan tetapi dalam kerangka teoritik studi ini gerakan pengamen lebih dipahami sebagai gerakan sosial, karena gerakan yang dilakukan selama ini masih terbatas pada isu dan tuntutan sektoral (persoalan keseharian), sekalipun Serikat Pengamen Indonesia (SPI) memiliki kecenderungan kearah gerakan politik, akan tetapi itu dipahami masih sebatas rasionalitas dari efektifitas gerakan terhadap capaian (*goal*).

Secara umum studi mengenai gerakan sosial dapat digolongkan dalam salah satu dari dua pendekatan yang berbeda, pendekatan pertama memandang gerakan sosial sebagai masalah, atau penyakit kemasyarakatan. Pendekatan ini dikenal dalam teori sosiologi sebagai pendekatan fungsionalisme atau sering juga disebut sebagai “fungsionalisme struktural”. Fungsionalisme melihat masyarakat dan pranata sosial sebagai sistem di mana seluruh bagian saling bergantung satu sama lain dan bekerja bersama guna menciptakan keseimbangan. Dengan

demikian keseimbangan merupakan unsur kunci dalam fungsionalisme. Karena itu gerakan sosial dalam perspektif struktural fungsionalisme condong melihat gerakan sosial sebagai hal yang negatif, yakni menimbulkan konflik yang akan mengganggu masyarakat.

Beberapa tokoh dari rumpun struktural fungsionalisme seperti Herberle dalam bukunya *Social movements: An Introduction to Political Sociology*, mengkonsepkan bahwa gerakan sosial pada dasarnya adalah bentuk perilaku politik kolektif non-kelembagaan yang secara potensial berbahaya karena mengancam stabilitas hidup yang mapan. Sedangkan tokoh sosiologi lainnya seperti Fruer cenderung melihat gerakan sosial sebagai 'konflik generasi'.<sup>9</sup>

Pendekatan kedua adalah teori ilmu sosial yang justru melihat gerakan sosial sebagai fenomena positif, atau sebagai sarana konstruktif bagi perubahan sosial. Pendekatan ini merupakan alternatif terhadap fungsionalisme yang dikenal sebagai teori konflik. Teori konflik pada dasarnya menggunakan tiga asumsi dasar:

1. Rakyat dianggap memiliki sejumlah kepentingan dasar dimana mereka akan berusaha secara keras untuk memenuhinya.
2. Kekuatan adalah inti dari struktur sosial dan ini melahirkan perjuangan untuk mendapatkannya.
3. Nilai dan gagasan adalah senjata konflik yang digunakan oleh berbagai kelompok untuk mencapai tujuan masing-masing, ketimbang sebagai alat mempertahankan identitas dan menyatukan tujuan masyarakat.<sup>10</sup> Teori konflik ini berakar dari tradisi Marxisme tradisional yang mendasarkan analisis bahwa gerakan sosial atau bahkan

---

9 Mansour Fakih., "Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial : Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal. 41.

10 Mansour Fakih., *Ibid.*, hal. 43.

revolusi adalah suatu kebutuhan yang disebabkan memburuknya hubungan produksi yang memunculkan krisis ekonomi, depresi dan kehancuran.

Dalam kebutuhan studi gerakan pengamen ini akan lebih melihat keberadaan gerakan pengamen dalam perspektif teori konflik dengan titik tekan pada upaya melihat pengamen sebagai bagian dari kekuatan perubah, bukan semata kelas pekerja (buruh). Perspektif ini berangkat dari teori perubahan sosial yang non reduksionisme yang berakar dalam gagasan pemikiran Antonio Gramsci,<sup>11</sup> dengan tetap melihat bahwa ekonomi sebagai faktor penting yang mendorong munculnya gerakan pengamen, selain ada kondisi-kondisi ketidakadilan politik, budaya dan kesempatan lainnya yang mendorong kemunculan gerakan.

Guna memahami persoalan gerakan pengamen, maka menjadi hal yang mendasar untuk memaknai arti sebuah gerakan. Secara umum gerakan selalu berasosiasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk memberikan respon atau reaksi atas kondisi tertentu (realitas sosial) di masyarakat.<sup>12</sup> Yang dimaksud dengan respon atau reaksi terhadap sesuatu keadaan, adalah respon oleh pihak-pihak tertentu dalam masyarakat yang ingin mendorong perubahan. Pihak yang dimaksud di sini tentu bukan individu (perorangan), melainkan kelompok atau suatu group kekuatan tertentu; seperti kelompok petani, buruh, mahasiswa, dan kelompok lainnya, termasuk dalam hal ini kelompok pengamen.

Beberapa pendapat yang menegaskan bahwa gerakan diasosiasikan sebagai aktifitas kolektif bukan bersifat individual dapat dilihat dari apa yang dikemukakan oleh

---

11 Mansour Fakhri, *Ibid.*, hal. 43.

12 Timur Mahardika, "GERAKAN MASSA, Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan Secara Damai", Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 1998, hal. 3.

beberapa tokoh seperti Blumer<sup>13</sup> yang mendefinisikan gerakan sosial sebagai kegiatan kolektif untuk memunculkan kehidupan yang baru. Sedangkan Gusfield mengartikan gerakan sosial sebagai aktivitas dan kepercayaan masyarakat akan harapan adanya perubahan beberapa aspek dari kondisi sosial.<sup>14</sup>

Bahwa gerakan juga merupakan bentuk penentangan kolektif juga di kemukakan oleh Sidney Tarrow,<sup>15</sup> akan tetapi di dalam gerakan itu sendiri terdapat tujuan bersama, bentuk solidaritas dan kontinuitas aksi kolektif. Dari pemaparan Sidney Tarrow jelas membedakan antara gerakan dengan fenomena kerumunan, penegasan atas perbedaan antara gerakan dengan kerumunan, juga disampaikan DiRinzo dengan argumentasi bahwa aktivitas gerakan lebih terstruktur, mempunyai tujuan lebih jelas, serta mampu bertahan lama sebagai fenomena sosial,<sup>16</sup> dibandingkan dengan bentuk-bentuk kolektif lainnya.

Sejalan dengan beberapa pendapat tentang gerakan sosial di atas Turner dan Killian juga mendefinisikan gerakan sosial sebagai aksi secara kolektif yang selanjutnya menawarkan perubahan atau perlawanan terhadap suatu perubahan dalam masyarakat atau kelompok yang menjadi peranannya. Sebagai kolektifitas, gerakan adalah suatu kelompok dengan anggota dengan *shifting* yang tidak tentu dengan kepemimpinan yang posisinya lebih ditentukan secara informal dari anggota-anggota yang dengan prosedur-

---

13 Allen, D.E., Guy, R.F., C.K. "Sosial Psychology As Sosial Process", Wadworth Inc. California, 1980.

14 Allen, D.E., Guy, R.F., C.K. Ibid

15 Sidney Tarrow., "POWER IN MOVEMENT, Social Movement, Collective Action and Politics", Cambridge University Press, 1994, hal. 3-4.

16 Di Rinzo, G, 1990. "Human sosial behavior: concepts end principles of sociology". Holt, Rinehart end Winston, USA.

prosedur formal untuk melegitimasi otoritas.<sup>17</sup> Jadi yang menjadi titik tekan dalam memahami gerakan sosial adalah selain merupakan bentuk aksi kolektifitas, gerakan sosial juga mensyaratkan adanya pembagian tugas dan kepemimpinan diantara anggotanya.

Lebih jauh memahami persoalan gerakan sosial selalu juga dipahami sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kondisi yang tidak adil dan menindas dan karenanya dibutuhkan upaya terjadinya perubahan, seperti yang kemukakan oleh Di Rinzo yang juga mendefinisikan gerakan sosial sebagai perilaku dari sebagian anggota masyarakat untuk mengoreksi kondisi yang banyak menimbulkan problem atau tidak menentu, serta memunculkan kehidupan baru yang lebih baik.<sup>18</sup> Bahwa gerakan sosial itu muncul sebagai bentuk keinginan bagi terjadinya perubahan juga dilontarkan Orum dengan pendefinisian gerakan sebagai bentuk suatu organisasi atau kelompok organisasi yang bermaksud mengadakan perubahan terhadap struktur sosial yang sudah ada sebelumnya.<sup>19</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa gerakan sosial mencakup beberapa konsep, yakni orientasi pada perubahan (*change-oriented goals*), tingkat organisasi (*some degree of organization*), tingkat kontinuitas yang sifatnya temporal (*some degree of temporal continuity*) dan aksi kolektif di luar lembaga (aksi ke jalan) dan didalam lembaga (lobi politik) (*some extrainstitutional and institutional*).<sup>20</sup>

---

17 R. Turner and L. Killian, Op. Cit , hal. 308

18 Di Rinzo, G, Ibid.,

19 Orum dalam Allen et.al, 1980) (Allen, De, Guy, R. F.,C.K., 1980. "Sosial psychology As Sosial Process", Wadworth Inc, California.

20 Cook, K. S., Fine, G.A., House, J.S.1995 "Sosiological Perspectives On Sosial Psychology". Allen End Bacon, Massalhusset



Untuk memahami tahap-tahap perkembangan kemunculan gerakan sosial dapat dipahami dari tahapan yang dikemukakan oleh Ryan yang mengidentifikasi 4 (empat) tingkat dari gerakan sosial yang menunjukkan dinamika dan proses gerakan sosial, yakni:

1. *Incipient Stage*

Pada situasi gerakan sosial haruslah ada tipe dari tekanan struktur atau kondisi yang tidak memuaskan dialami oleh individu. Kondisi yang tidak menyenangkan dan tidak teraihnya kebutuhan bisa disebabkan oleh suatu persoalan khusus, misalnya diskriminasi atau pengangguran. Kondisi ini mengarah pada situasi tidak nyaman (*Malaise*), mengembangkan alienasi, massa menjadi gelisah dan mulai muncul kekerasan. Hal inilah yang menjadi karakteristik yang khas yang memungkinkan munculnya atau kesiapan untuk melakukan gerakan sosial.

2. *Popular Stage*

Pada tingkat selanjutnya berkembang sejumlah orang untuk saling mengenal dan membagi perasaan antara satu dari yang lain. Identifikasi dari gerakan akan meningkat secara cepat bila kondisi yang tidak menyenangkan bertambah. Pimpinan atau agitator menjadi pemicu dramatisasi situasi dan meningkatkan jumlah pengikut gerakan. Aktivitas utama pada fase ini mencakup klarifikasi persoalan dan tujuan, serta memelihara aktivitas yang berbeda dari para anggota dengan memusatkan pada tujuan gerakan.

3. *Organizational Stage*

Pada fase ini terjadi klarifikasi tujuan dan mobilisasi aksi. Kelompok formal dan organisasi yang lebih

kompleks akan muncul. Selama periode ini muncul perilaku yang terstruktur, yakni: peran kepemimpinan terdefiniskan secara jelas, pemimpin formal muncul, tugas dikembangkan, kebijaksanaan khusus dan program kegiatan dibuat. Tujuan terbentuk dan strategi peningkatan mulai dilaksanakan. Akhirnya fraksi/golongan akan berkembang, tergantung pada ukuran gerakan, dasar perbedaan opini tentang persoalan dan metode resolusi.

#### 4. *Institusional Stage*

Fase terakhir ini muncul bila gerakan yang penuh kesuksesan diintegrasikan dalam sejumlah struktur sosial dari masyarakat. Suatu saat situasi dikembangkan, sehingga gerakan sosial tidak lama lagi menjadi fenomena perilaku kolektif. Organisasi ini menjadi bagian dari organisasi sosial yang permanen dan lembaga yang terstruktur dari suatu masyarakat akhirnya muncullah lembaga tertentu yang mempunyai tendensi untuk ekspansi dan abadi. Kebanyakan organisasi sosial tidak sampai pada fase ini.<sup>21</sup>

Selain itu Leonard Broom mensinyalir bahwa suatu aksi kolektif dapat berubah menjadi suatu gerakan sosial apabila memiliki ideologi solidaritas dan idealisme yang tinggi dan menitikberatkan pada aksi atau tindakan,<sup>22</sup> dalam melakukan perubahan pada kondisi yang dipahami sebagai hal yang harus dilawan bagi terjadinya perubahan.

Mengingat keadaan di suatu negeri selalu merupakan kondisi di bawah kekuasaan penguasa tertentu, maka gerakan di sini, dapat pula bermakna sebagai bentuk perlawanan

---

21 Ryan dalam DiRinzo., Op. Cit

22 Leonard Broom, "Sociology a text with adapted readings", Harper and Row Pubs, New York, 1981, hal. 468-470.

terhadap penguasa. Sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap penguasa (penyelenggara kekuasaan yang despotik dan tidak disukai rakyat), gerakan tidak lain dari kumpulan keinginan untuk mengubah keadaan. Reaksi tersebut tidak mengabdikan kepada hanya sekedar aksi, melainkan dimaksudkan untuk mengubah kondisi tersebut kepada suatu keadaan baru yang dipandang lebih baik dan lebih bermakna. Gerakan dapat dipahami sebagai usaha untuk mengubah suatu situasi atau kondisi kepada keadaan baru dan biasanya gerakan itu dilakukan sebagai respon dari adanya peluang politik untuk melakukan perubahan.<sup>23</sup> Dalam kerangka kehidupan masyarakat, maka gerakan tidak lain dari berbagai upaya yang dimaksudkan untuk mengubah tatanan yang tidak adil, menuju sebuah tatanan baru yang lebih memberi jaminan pada realisasi keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia.

Beberapa karakteristik yang umumnya terlihat dalam gerakan sosial biasanya menggunakan cara-cara yang bersifat informal dan institusional dalam melakukan atau menentang perubahan sosial sebagaimana yang dikemukakan Wilson<sup>24</sup> sebagai berikut:

- a. Gerakan sosial adalah diatur secara kolektif. Gerakan sosial merupakan kelompok yang teratur namun berbeda dengan organisasi pada umumnya. Walaupun demikian di dalam gerakan sosial sudah terdapat pembagian kerja dan pembedaan secara hirarkhi hak dan tanggungjawab diantara pendukungnya.
- b. Gerakan sosial memiliki ruang lingkup potensi yang lebih besar walaupun kecil jumlah anggotanya, namun

---

23 Sidnay Tarrow., Op, Cit., hal. 17.

24 Jhon Wilson., Introduction to sosial movement, basic books, Inc., publishers, New York, 1973, hal. 8-15

- amanat dan isu yang mereka perjuangkan memiliki potensi untuk memperbesar jumlah anggotanya.
- c. Gerakan sosial tidak melembagakan cara untuk mencapai tujuan. Gerakan sosial cenderung menggunakan cara inkonvensional agar suara mereka didengar atau menekan pihak yang berwenang untuk melakukan perubahan.
  - d. Gerakan sosial tidak perlu terbatas pada tujuan dari kepentingan pribadi anggota mereka sebab gerakan sosial tidak memiliki tujuan yang terbatas, dalam arti membatasi usaha-usaha mereka untuk kepentingan kelompok tertentu, walau pada awal dan dalam jangka pendek program-programnya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, tetapi memperjuangkan kepentingan masyarakat merupakan tujuan akhir suatu gerakan sosial.
  - e. Gerakan sosial adalah percobaan yang bermanfaat untuk membawa suatu perubahan.

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, gerakan timbul tenggelam dengan berbagai argumen atau landasan. Hal ini menunjukkan pula bahwa kenyataan sosial yang ada selalu saja menimbulkan ketidakpuasan, terutama akibat (selalu) termuatnya ketidakadilan dalam tatanan yang ada, yang menjadikan sebagian manusia atau kelompok menjadi tidak beruntung, nestapa, tertekan, dan termarginalisasi.

Mengenai bentuk-bentuk gerakan sosial oleh DiRinzo diklasifikasikan berdasarkan tujuan atau cara tertentu yang digunakan ke dalam 4 (empat) tipe gerakan sosial:

1. Gerakan Perubahan (*Reform Movements*)

Gerakan perubahan dipusatkan pada perubahan bentuk tertentu dari masyarakat. Tujuan gerakan ini terbatas,

yakni mengoreksi ketidakadilan yang ada di masyarakat. Gerakan perubahan cenderung bekerja pada suatu sistem daripada melawan sistem. Contoh dari gerakan ini antara lain gerakan sadar lingkungan, kelompok gay dan feminis.

2. Gerakan Revolusioner (*Revolutionary Movements*)

Gerakan revolusi cenderung sebagai gerakan yang ingin mengadakan perubahan secara radikal pada nilai sosial, institusi dan kegiatan. Gerakan revolusioner ini cenderung menggunakan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Banyak negara yang muncul akibat adanya gerakan ini. Perancis, Amerika Serikat, dan Uni Sovyet. Berbagai contoh gerakan ini antara lain: Revolusi Cina Komunis untuk membantu negara RRC tahun 1949, revolusi menggulingkan Shah Iran Reza Pahlevi oleh Ayatollah Khomeini tahun 1979 dan revolusi yang terjadi di Nicaragua tahun 1980 yang dilakukan oleh gerakan nasional Sandinista untuk menjatuhkan kepemimpinan Dictator Anastasia Somoza.

3. Gerakan Reaksioner

Tujuan gerakan reaksioner adalah menghalangi perubahan yang akan terjadi atau mencegah perubahan yang berasal dari tempat lain. Gerakan ini kebanyakan muncul pada waktu perubahan sosial yang radikal terjadi. Selama ini banyak individu yang mengalami perasaan tidak jelas, cemas atau tidak menentu. Akibatnya mereka memelihara status quo atau kembali pada cara/jalan sebelumnya. Contoh gerakan ini adalah Klu Klux Klan yang tidak menginginkan hak yang sama antara kulit hitam dan putih, kampanye melawan *Equal Rights Amendment* yang di perjuangkan kaum feminis, gerakan

*life to life* yang ingin mencabut legalisasi aborsi, gerakan moral majority yang berjuang untuk kembali pada ajaran agama Kristen yang fundamental, serta gerakan anti nuklir (*Green Peace*).

#### 4. Gerakan Ekspresif (*Expressive Movements*)

Gerakan ekspresif ini lebih ditujukan pada individu daripada masyarakat. Berbeda dengan gerakan sosial lainnya, gerakan ekspresif ini mencari puas secara emosional dan kesejahteraan masyarakat yang mengarah pada pengembangan identitas atau gaya hidup yang baru. Individu yang tergabung dalam gerakan ini berharap menemukan jalan yang efektif sebagai kompensasi perasaan frustrasi yang diakibatkan kondisi sosial yang menindas. Individu merubah hubungan atau reaksi pada masyarakat dari mengadopsi filosofi kehidupan yang baru atau merevisi sistem kepercayaan dan nilai-nilai hidupnya. Contoh dari gerakan ini antara lain: Gerakan kebebasan gay (*Gay Liberation Movement*) dan gerakan kebebasan wanita (*Women's Liberation Movement*).

Selain itu Petter I Rose memberikan catatan bahwa setiap gerakan sosial, apapun bentuknya mempunyai komponen-komponen yaitu ideologi, program atau seperangkat tujuan, fakta-fakta untuk mencapai tujuan dan aktor-aktor sebagai pemimpin.<sup>25</sup> Selain itu gerakan sosial umumnya mensyaratkan 5 (lima) instrumen yang biasanya ada dalam dirinya, yaitu:

- a. Suatu gerakan sosial melibatkan sebagian besar individu yang memproses suatu keadaan, agar menjadi suatu gerakan sosial, maka usaha sejumlah individu harus memiliki suatu persyaratan dasar atau organisasi.
- b. Suatu gerakan sosial harus memiliki ruang lingkup yang relatif luas, gerakan itu mungkin berawal dari

---

25 Petter I Rose., "Sociology: Inquiring into society" confield press San Fransisco, 1977.

lingkup yang lebih kecil, tetapi akhirnya harus mampu mempengaruhi sebagian besar masyarakat.

- c. Gerakan sosial tersebut dapat menggunakan bermacam taktik untuk mencapai tujuan. Taktik-taktik tersebut bervariasi dari yang tidak menggunakan kekerasan sampai dengan kekerasan.
- d. Tujuan akhir dari gerakan sosial tersebut adalah merubah kondisi yang ada pada masyarakat.
- e. Gerakan sosial tersebut merupakan usaha yang secara sadar dilakukan untuk mengadakan perubahan sosial dan bagi mereka yang terlibat didalamnya mungkin tidak menyadari tindakannya tetapi mereka mengetahui tujuan utama dari gerakan tersebut.<sup>26</sup>

Dari beberapa pengertian gerakan di atas, terdapat beberapa unsur yang bisa dikatakan sebagai variabel utama konsep gerakan, sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh Timur Mahardika dalam pengertian gerakan, dimana gerakan pengamen berada pada salah satu variabel yang diantaranya adalah:

1. Keadaan masa kini yang dipandang buruk, menyimpan ketidakadilan, dan karena itu akan dirubah.
2. Keadaan masa depan, yang menjadi harapan, dalam hal ini diidentifikasi sebagai suatu keadaan yang lebih baik dan bermakna.
3. Pihak penguasa, rejim, sebagai penanggung jawab keadaan. Tidak bisa dihindari bahwa penguasa pada akhirnya harus menuai perlawanan atas tindakan atau keadaan yang diciptakan.
4. Pihak yang melawan, yang menjadi kekuatan yang memiliki kepentingan untuk mendorong perubahan.

---

26 Haryanto, "Analisis Tahap-Tahap Gerakan Mahasiswa Indonesia 1974 dan 1978" laporan penelitian Fisipol UGM, Yogyakarta, hal. 8.

5. Dinamika konflik antara berbagai kekuatan yang ada.

Untuk memahami apakah itu gerakan atau bukan gerakan pada konteks pembedahan fenomena gerakan pengamen, maka ada empat dimensi untuk mengukur atau menganalisa sebuah fenomena apakah itu sebuah gerakan atau bukan gerakan, yakni:

1. Tingkat adanya kesadaran bersama tentang nasib yang dialami.
2. Tingkat dimana aksi itu bersifat kolektif baik dalam:
  - a. Lingkup orang yang terlibat.
  - b. Tingkat koordinasi dan organisasi aksi (sampai kepada titik yang tinggi ketika itu organisasi dengan cara yang kompleks).
3. Lingkup dimana aksi itu bersifat “instrumental” dirancang untuk mencapai sasaran diluar aksi itu sendiri; dan kadar “eksperesinya”: dilaksanakan karena gratifikasi yang terkandung didalam aksi itu sendiri.
4. Tingkat dimana reaksi itu didasarkan secara eksklusif atas kerendahan status sosial, ekonomi dan politik, berlawanan dengan reaksi dimana isu lain -agama, nasional- memainkan peranan yang murni dan merdeka.<sup>27</sup>

Dari keempat dimensi atau aspek ukuran di atas mensyaratkan adanya pembatasan dalam memahami posisi dan peran gerakan pengamen, disamping beberapa aspek sejarah lainnya. Guna memudahkan dalam memahami wacana dominan dan pola gerakan beserta tuntutanannya maka menjadi hal yang menarik dalam melihat dinamika gerakan pengamen dan bagaimana mereka mengkonseptualisasikan posisi atau keberadaan mereka sebagai bagian dari kaum miskin kota yang termarginalkan.

---

27 Henry A. Landsberger dan Yu. G. Alekandrov., “Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial”, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 24-25



Untuk membantu memahami bagaimana keterlibatan pengamen atau kelompok lainnya terlibat dalam gerakan sosial. Dapat dipahami dalam empat mekanisme yang mengarahkan seseorang berpartisipasi dalam gerakan sosial, yakni:

a. Afinitas Sosial (*social affinity*)

Mekanisme mencakup adanya pengaruh langsung dan tak langsung antara kepercayaan terhadap kondisi politik yang ada (*political trust*), identifikasi terhadap kelompok gerakan sosial (*sub group identification*), dan partisipasi dalam gerakan sosial. Artinya individu berpartisipasi dalam gerakan sosial karena mereka mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai dan perilaku dalam kelompok gerakan sosial tersebut. Hal ini akan mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap sistem politik yang ada, namun sebaliknya akan meningkatkan keinginan untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial.

b. Deprivasi (*deprivation*)

Mekanisme ini mencakup pengaruh antara ketidakpuasan subjektif (*subjective dissatisfaction*) kepercayaan terhadap sistem politik yang ada (*political trust*), serta partisipasi dalam gerakan sosial. Artinya ada ketidakpuasan subjektif (*deprivation relatif*) akan menurunkan tingkat kepercayaan pada sistem politik, sehingga mengarahkan keinginan untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial.

c. Efektifitas politik (*politically effective*)

Mekanisme ini mencakup keterkaitan antara harga diri (*self esteem*) kemampuan untuk berperan atau mempengaruhi sistem politik yang ada (*political efficacy*), serta partisipasi dalam gerakan sosial. Artinya individu dengan harga diri yang tinggi cenderung

merasa mempunyai kemampuan untuk berperan atau mempengaruhi sistem politik yang ada, sehingga mengarahkan untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial.

d. Waktu

Mekanisme ini mencakup hubungan antara skedul kerja yang tidak terstruktur (*unstructured work routine*) dengan partisipasi individu dalam gerakan sosial artinya individu yang mempunyai jadwal kerja yang tidak terstruktur, akan lebih mampu untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial sebab lebih mempunyai waktu yang banyak untuk mengikuti gerakan sosial.<sup>28</sup>

## B. Keberadaan Gerakan Pengamen

Memahami dan menjelaskan keberadaan gerakan pengamen sebagai salah satu entitas dalam gerakan sosial, dapat kita temukan dalam salah satu paradigma teori besar sosiologi yang berasal dari tradisi pemikiran kaum Marxis. Karl Marx sebagai penggagas awal dari pemikiran kaum Marxis secara fundamental menggariskan bahwa “sejarah setiap masyarakat sampai masa kini adalah semata-mata sejarah perjuangan kelas”.

Orisinilitas Marx terletak dalam membuat perjuangan kelas menjadi hal yang fundamental dan hampir menjadi satu-satunya faktor penyebab konflik-konflik sosial dan politik, dalam memberikan definisi baru kepada kelas-kelas sosial, seperti keberadaan pengamen. Konsep kelas akan digunakan untuk melihat bagaimana kekuatan pengamen memosisikan diri dalam gerakan yang dilakukan dan dalam kaitannya dengan gerakan sosial lainnya, akan tetapi untuk melengkapi konsep kelas, kesadaran dan perjuangan kelas, akan lebih

---

28 Orum dalam Allen et.al, 1980) (Allen, De, Guy, R. F.,C.K., 1980). “Sosial psychology As Sosial Process” Wadworth Inc, California.

banyak menggunakan pendekatan konsep “*overdeterminan*” Gramsci, karena dalam konsep determinan Marx telah menempatkan buruh sebagai inti kelas dan bukan pada kelas ‘lumpenproletariat’ dimana pengamen ada di dalamnya.

Bilamana kita bicara tentang kelas-kelas sosial dan perjuangan kelas, secara sadar atau tidak sadar kita ingat pada Marx. Karena itu, adalah alami untuk mengambil doktrin Marx sebagai titik tolak dalam menganalisis paham tentang kelas dan pengaruh perjuangan kelas bagi terjadinya perubahan sosial, termasuk dalam hal ini bagaimana memahami gerakan pengamen. Hal ini dilakukan bukan berarti menisbikan atau melakukan reduksi atas paradigma lain dalam tradisi pemikir sosiologi dalam memahami gerakan sosial.

Sementara itu untuk memahami keberadaan negara, sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat juga akan dilihat dari perspektif Marxian, yang menempatkan negara sebagai alat kelas. Pembahasan terhadap fungsi dan peran negara dihadirkan karena gerakan pengamen yang terjadi selama ini cenderung melihat negara, dalam hal ini pemerintah tidak berpihak kepada mereka. Karena itu pendekatan teori dependensia menjadi pisau analisa dalam melihat eksistensi negara dalam hubungannya dengan kepentingan kelas kapitalis dan kepentingan masyarakat pada sisi yang lain.

### **C. Konsep Kelas**

Berkaitan dengannya sangat dipengaruhi oleh visi Marx terhadap pembagian kelas yang sekaligus diyakininya sebagai sumber utama dinamika sosial dan menjadi pijakan utama dalam penafsirannya mengenai tatanan sosial. Dalam teori kelas Marx, seluruh sejarah dinyatakan sebagai sejarah

perjuangan atau pertentangan antar kelas. Dalam konteks ini perubahan sosial yang terjadi selalu bersumber dari revolusi kelas. Konflik antara kaum kapitalis dan pekerja bermula dari adanya bentuk produksi kapitalis tidak adil yang selanjutnya akan memicu revolusi kaum proletar menuju pada bentuk masyarakat sosialis yang baru dan lebih adil. Sekalipun sebagian besar teori yang dirumuskan oleh Marx tersebut telah terbantah namun daya tariknya tetap tinggi sehingga pemikiran Marx tersebut justru menjadi sumber inspirasi bagi teori-teori lainnya mengenai kelas, baik itu untuk perilaku individual maupun dikaitkan sebagai perilaku kolektif.

Uniknya teori Marx tersebut berdampingan dengan pandangan liberal yang juga dominan, yang menafsirkan tindakan individual senantiasa didasarkan pada pengejaran kepentingan sepihak yang selanjutnya diyakini pula sebagai penggerak utama perilaku manusia. Kelanggengan teori kelas Marxis ditunjang pula oleh kejelian Marx dalam memadukan aspek-aspek ilmiah dengan observasi sehari-hari yang mudah menarik perhatian dan mudah dipahami, serta rumusnya mengenai strategi antagonisme kelas sebagai pengejawantahan konflik kepentingan ekonomi yang memang senantiasa terjadi antara berbagai pihak yang ada dalam setiap proses ekonomi.

Konsekuensinya, menurut Marx, selalu ada kelas utama yang bertentangan satu sama lain dalam setiap masyarakat tertentu: yang menguasai alat-alat produksi dan yang lainnya hanya mempunyai kemampuan kerja. Akan tetapi, menurut hakikat “kekuatan-kekuatan produktif”, yang berarti keadaan perkembangan teknologi, alat-alat produksi memperoleh bentuk-bentuk yang berbeda-beda, dan status pemilikinya juga berubah. Dengan demikian kita dapat membedakan sistem

milik zaman kuno, sistem milik masyarakat feodal, dan sistem milik kapitalistik. Bagi setiap sistem ini ada dua jenis kelas antagonis yang sesuai: tuan dan budak dalam masyarakat kuno, tuan-tuan dan serif dalam masyarakat feodal, pemilik-pemilik borjuis dari pabrik-pabrik dan pengusaha dengan proletariat di dalam masyarakat kapitalis.<sup>29</sup>

Dalam buku *Das Kapital* jilid ketiga, Marx mulai dengan suatu penjelasan yang sistematis mengenai konsep kelas, dimana dia mengidentifikasi tiga kelas utama dalam masyarakat kapitalis: buruh upahan, kapitalis, dan pemilik tanah. Kelas-kelas ini dibedakan terutama dalam perbedaan-perbedaan dalam sumber-sumber pendapatan pokok, yakni upah, keuntungan dan sewa tanah untuk masing-masingnya. Karena sistem kapitalis itu berkembang, Marx mengharapkan bahwa ketiga sistem kelas itu secara berharap akan diganti oleh suatu sistem dua kelas, begitu lapisan menengah hilang, dan tentu saja karena cara kerja kapitalis itu diperluas dari perusahaan industri ke perusahaan pertanian. Hal ini dikatakan Marx bahwa “Masyarakat sebagai satu keseluruhan menjadi semakin terbagi dalam dua kelompok besar yang paling bermusuhan, kedalam dua kelas yang paling berhadapan secara langsung: borjuis dan proletariat”.<sup>30</sup> Di antara kapitalis-kapitalis yang dominan, juga dapat dibedakan antara kapitalis uang dan kapitalis industri. Marx meramalkan bahwa perkembangan masyarakat kapitalis ke sistem dua kelas akhirnya akan mengakibatkan hilangnya kelas borjuis kecil dan mengakibatkan anggota-anggotanya menjadi proletariat (*proletarianization*).<sup>31</sup>

---

29 Maurice Duverger., “Sosiologi Politik”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. IX, 2002, hal 192-193

30 Doyle Paul Jhonshon, “Teori Sosiologi Klasik dan Modern”, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1988, hal 148.

31 Jhonson., *ibid.*, 148

Penetapan kelas sebagai kelompok-kelompok besar yang para anggotanya disatukan oleh kesamaan lokasi dalam proses ekonomi (yang satu berfungsi sebagai bagian dari faktor produksi sedangkan yang lain sebagai pemilik faktor produksi yang nantinya akan memetik semua atau sebagian besar surplus) sesungguhnya sudah ada dalam pemikiran ekonomi politik klasik sebelum Marx melontarkan teorinya.

Dalam satu aspek Marx begitu cepat populer karena ia dapat secara gamblang menjelaskan bahwa dimensi lain dari konflik kelas adalah perjuangan memperebutkan pengelolaan surplus sosial. Karena dalam tatanan kapitalis hak dalam surplus tersebut merupakan keistimewaan para manajer proses produksi, maka upaya rasional untuk memperbesar bagian/milik bagi kelas lainnya terhadap surplus tersebut harus diarahkan terhadap keseluruhan manajemen produksi. Selain itu karena dalam sistem kapitalis hak untuk mengelola proses produksi itu merupakan keistimewaan para pemilik modal (atau faktor-faktor produksi), maka kelas lain yang tidak memiliki modal semata-mata menjadi objek perahan. Jadi, pertentangan antara kelas kapitalis dan kelas buruh yang dirumuskan oleh Marx itu sesungguhnya identik dengan pertentangan para tuan tanah dan kelas penggarap di masa feodalisme prakapitalis. Pendekatan Marxis atas analisis kelas masyarakat industri itu memadukan dua dimensi konflik kelas, dan cenderung menafsirkan konflik yang pertama (*redistribusi surplus*) sebagai manifestasi mentah atau wujud awal dari perjuangan atau konflik kedua (memperebutkan pengelolaan produksi surplus).

Bilamana konsep Marxis tentang kelas-kelas sosial cukup jelas dan tegas, dia tidak pernah diberikan perumusan yang tepat oleh pengarang-pengarangnya. Tidak ada satu tempat pun dalam tulisan-tulisan Marx di mana kita dapatkan definisi tentang kelas. Dia melukiskan dalam istilah-istilah

yang konkret tentang perjuangan kelas, penindasan oleh kaum borjuis, konfliknya dengan kaum proletariat dan seterusnya, akan tetapi tidak memberikan definisi abstrak tentang kelas-kelas sosial. Di dalam “*The Great Initiative*”, suatu brosur yang diterbitkan pada tahun 1919, Lenin memberikan definisi sebagai berikut: “Apa yang kita sebut kelas adalah kelompok besar dari orang-orang yang dipertandai oleh posisi yang dipegangnya di dalam suatu sistem yang dibatasi secara historis oleh produksi sosial, oleh hubungannya (pada umumnya ditentukan dan dikuduskan oleh hukum) dengan alat-alat produksi, oleh peranannya di dalam organisasi kerja sosial, dan dari sini alat-alat pengaturan dan porsi kekayaan sosial yang dipunyainya. Kelas adalah sekelompok orang, yang bisa mengambil menjadi miliknya kerja yang dilakukan oleh orang lain, sebagai akibat dari perbedaan di dalam posisi yang dipunyainya di dalam rezim yang ditentukan oleh ekonom sosial”.<sup>32</sup> Meskipun definisi ini secara khusus ditulis atau diungkapkan tidak terlalu bagus, secara jelas dia mengungkapkan kompleksitas dari konsep Marxis tentang kelas.

Mencoba membandingkan lebih jauh bagaimana perspektif kelas menurut Marx, dimana kita akan mendapatkan gambaran bagaimana kemunculan istilah kelas itu dari kepemilikan alat-alat produksi yang mendominasi, berhadapan dengan kelas yang tidak memiliki alat-alat produksi, yang didominasi, dengan definisi kelas yang dikemukakan oleh Poulantzas yang mengatakan bahwa kelas adalah suatu terminologi dimana yang terpenting bukan kepemilikan alat-alat produksi, akan tetapi akses seseorang terhadap sumber-sumber kekuasaan, seperti kekayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dsb. Sementara itu

---

32 Maurice Duverger, *Ibid.*, hal. 190-191

Hans Dieter Evers dan Tilman Schiel juga memberikan tafsiran baru terhadap kelas. Istilah kelas digantikan dengan pengertian kelompok strategis.<sup>33</sup>

Kompleksitas konsep tentang kelas bukan berarti kaum Marxis tidak memiliki batasan-batasan yang tegas sebagaimana penerimaan para ilmuwan Amerika yang banyak dipengaruhi oleh pandangan Weber yang lebih multidimensionalitas dalam melihat determinasi perubahan sosial yang didasarkan pada konflik kelas, seperti halnya kaum Marxis mencoba membedakan antara konsep kelas dengan strata sosial, dengan argumentasi bahwa tidak ada kelas yang semata-mata homogen, kecuali di dalam masyarakat yang sangat terbelakang. Di dalam masyarakat feodal ada tuan-tuan besar (*grand seigneurs*) dan tuan-tuan kecil (*petits seigneurs*), kaum *bobles d'épée* (kaum aristokrat yang berasal dari militer) dan *nobles de robe* (aristokrat yang lebih kecil dari kaum borjuis yang dibangsawankan, kerap kali dalam profesi hukum). Dan ada banyak jenis budak (*serf*). Bahkan ada lebih banyak jenis di dalam kalangan borjuis (atas dan bawah, industrial dan komersial, dan seterusnya) dan di dalam kalangan proletariat (“pekerja baju biru” dan “baju putih”, berbagai kelompok pengrajin, ahli teknik, pegawai negeri, dan tenaga-tenaga administratif). Sub divisi di dalam kelas merupakan “strata” sosial. Strata yang berbagai ragam dari kelas yang sama tidak mempunyai kepentingan yang sama secara persis; ada yang tidak konsisten diantaranya. Setiap kelas, di dalam perjuangan kelas, menghisap kontradiksi di antara strata dari kelas lain untuk melemahkannya: kaum borjuis membangkitkan konflik di kalangan kaum proletariat untuk mempertahankan kekuasaannya; kaum proletarian

---

33 Happy Bone Zulkarnaen, dkk (editor), “Kelas Menengah Digugat”, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 1993, hal. 10-11.



mengambil keuntungan dari kontradiksi di kalangan kaum borjuis untuk mempercepat kedatangan sosialisme. Akan tetapi Marxisme secara teliti membedakan antara “kontradiksi-kontradiksi” di kalangan strata suatu kelas (yang dianggap secara relatif tidak penting) dan “antagonisme” antar kelas (yang dianggap fundamental).

Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan konsep kelas dan batasannya memang tidak bisa diputuskan secara hitam putih. Sebagaimana jalan pragmatis berikut ini, disatu pihak, istilah ‘kelas’ digunakan dalam arti pertama, jadi bagi setiap golongan sosial yang memiliki kedudukan spesifik dalam proses produksi, tetapi dengan pengertian bahwa ciri sebagai kelas baru terpenuhi secara sempurna apabila golongan itu juga menyadari dirinya dan memiliki semangat juang sebagai kelas.<sup>34</sup>

Ide sentral dari Marxisme adalah bahwa kelas-kelas sosial dirumuskan oleh posisinya terhadap alat-alat produksi. Hal ini berbeda-beda sepanjang sejarah, dan konsekuensinya adalah bahwa variasinya mengubah hubungan-hubungan sosial: “Hubungan-hubungan sosial terikat rapat kepada kekuatan-kekuatan produksi. Dengan memperoleh kekuatan produksi yang baru, manusia mengubah cara produksinya, cara di mana mereka menunjang hidupnya; mereka mengubah hubungan-hubungan sosialnya. Sebuah penggilingan yang dikerjakan oleh tangan akan memberikan anda sebuah masyarakat dengan seorang tuan feodal.

---

34 Franz Magnis Suseno, “Pemikiran Karl Marx, dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme”, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal. 111-112.



## **BAB 3**

# **DINAMIKA PENGAMEN DALAM SETTING KESEJARAHAN**

Beberapa gambaran tentang keberadaan dan dinamika perkembangan kota Yogyakarta serta sejarah gerakan sosial yang ada akan menjadi pintu masuk dalam melihat lebih jauh akan keberadaan pengamen baik dari sisi kemunculannya sampai dengan kelahiran gerakan pengamen menjadi bagian dari bab ini. Kesemuanya dari gambaran yang ada diharapkan akan memberikan lenskap umum bagaimana melihat relasi antar perkembangan kota, kebijakan kelembagaan pemerintah terkait dalam relasinya dengan keberadaan pengamen. Keberadaan dua organisasi gerakan pengamen secara spesifik untuk menjadi ilustrasi dalam memotret sisi lain dari realitas keberadaan organisasi gerakan pengamen yang ada di Yogyakarta.

### **A. Kota Yogyakarta Antara Dunia Citra dan Perkembangan**

Yogyakarta dinyatakan sebagai ibukota propinsi suatu daerah yang merupakan penggabungan dari wilayah

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman melalui undang-undang No 18 tahun 1964 (tanggal 18 Mei 1946). Kurang lebih setahun kemudian, pemerintah kotamadya Yogyakarta dibentuk melalui Undang-undang No. 17 tahun 1947 (tanggal 17 Juni 1947).

Berdasarkan pada catatan sejarah, sebagai sebuah kota, Yogyakarta sudah berdiri sejak 17 Oktober 1756 ketika sultan Hamangkubuwono 1 mulai menempati kraton barunya. Kraton ini dibangun di atas wilayah seluas 1.100 ha, suatu kawasan yang sebelumnya disebut hutan Bering dan berada diantara 2 sungai yaitu sungai Winongo dan Code.

Pada awal perkembangan perkotaan Yogyakarta mulanya sangat dipengaruhi struktur dan pola pemerintahan kerajaan waktu itu. Tumbuhnya pemukiman penduduk berawal dari daerah Jero Beteng (bagian dalam benteng), dengan pusatnya kompleks Kraton yang dikelilingi oleh pemukiman Ndalem (komplek rumah kerabat raja). Pada lingkaran terluarnya (yang sebagian sudah berada di luar Beteng) tumbuh pula pemukiman yang terkelompok berdasarkan jenis pekerjaan para penghuninya. Dalam perkembangan selanjutnya, areal pemukiman penduduk semakin melebar tidak hanya di sekitar Beteng, namun juga ke area di antara sungai Winongo dan Code.

Pada tahun 1813 berdirilah Kadipaten Pakualaman di Kampung Notokusuman. Pembangunan benteng “Kraton” Kadipaten Pakualaman ini menandai awal perkembangan kota ke sebelah timur Kali Code. Perkembangan kota di sebelah Timur Kali Code masih tetap menggunakan sistem kampung. Pemukiman penduduk yang berkembang di sebelah timur Kali Code masih terkelompok berdasarkan jenis pekerjaan, akan tetapi bagaimanapun memahami perkembangan kota Yogyakarta pada awal perkembangannya mengikuti pola kota

kerajaan pedalaman yang mengandung suatu pola lingkaran dari pusat ke peripheri, dimana posisi yang semakin jauh dengan pusat menjadi berkurang kesakralan dan statusnya, artinya bahwa kehidupan yang berada di dalam tembok Kraton di pandang sebagai kehidupan yang “lebih tinggi” apabila dibandingkan dengan kehidupan di luar tembok kraton.

Setelah masuknya penjajah Belanda, Yogyakarta banyak mengalami perubahan dalam perkembangan kota. Walaupun perkembangan kota Yogyakarta masih tetap dengan sistem kampung-kampung, tetapi mulai dikembangkan daerah-daerah tertentu untuk dijadikan “kampung elite”. Kampung elite ini tidak dikelompok berdasarkan jenis pekerjaan, tetapi dikelompokkan berdasarkan kebangsaan, seperti kebijakan dari dikeluarkannya ijin untuk memperluas area pemukiman bagi orang Cina ke daerah Kranggan ke sebelah utara rel KA (Jalan Mangkubumi). Lebih lanjut area pemukiman itu melebar ke selatan stasiun KA; (Jalan Malioboro, Dagen, Gandekan, Pajeksan, hingga Gondokusuman). Dikeluarkan ijin menetap bagi masyarakat Arab di area Sayidan dan sekitar mesjid Kraton (Kauman). Dikeluarkannya ijin menetap bagi orang-orang Belanda di daerah Loji Kecil, dan untuk membangun Benteng Vredenburg. Area pemukiman ini kemudian diperluas hingga daerah Bintaran, Jetis dan Kota Baru.

Pada masa Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia, tak pelak lagi, pemekaran perkotaan semakin pesat dan seolah melesat lepas dari lingkungan Kraton. Perkembangan yang terlihat adalah luas areal perkotaan, sebelumnya wilayah perkotaan hanya terbatas di wilayah Kotamadya Yogyakarta, berkembang ke wilayah di kabupaten Sleman dan Bantul. Perkembangan tersebut juga diikuti

dengan perkembangan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk Yogyakarta lebih banyak disebabkan karena migrasi masuk ke kota Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan tentang pertumbuhan penduduk kota Yogyakarta sebelum tahun 1960 menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk pada periode tahun 1950-1960 porsi terbesar bukan dari pertumbuhan alami (kelahiran-kematian) tetapi dari migrasi. Pada periode ini pertumbuhan penduduk Yogyakarta sebesar 4,5% pertahunnya; 1,8% karena pertumbuhan penduduk alami dan 2,7% karena imigrasi.

Tingginya angka imigrasi ke Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari sejarah kota Yogyakarta. Tahun 1946 Yogyakarta pernah menjadi ibukota negara Republik Indonesia. Pada saat itu terjadi eksodus besar-besaran para pegawai pemerintahan, tokoh politik dan personil militer. Pada saat itu tidak kurang dari 50.000 orang pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Pertumbuhan itu masih ditambah dengan kepindahan penduduk sipil dari daerah asal ke Yogyakarta karena merasa kurang aman setelah daerah asalnya diduduki oleh tentara Sekutu. Imigrasi ini masih ditambah dengan pindahnya pegawai-pegawai pemerintahan Kerajaan Belanda.

Imigrasi yang cukup besar adalah orang yang akan melanjutkan sekolah. Sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan. Tumbuh dan berkembangnya kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang diisi oleh 63% mahasiswa dari luar propinsi di Yogyakarta. Tumbuh dan berkembangnya kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang diisi oleh 63% mahasiswa dari luar propinsi di Yogyakarta membuat kebutuhan perumahan menjadi sangat penting. Perumahan kaum imigran intelektual ini terutama terpusat di sekitar

kampus. Daerah yang paling padat adalah perumahan di desa Caturtunggal. Di daerah ini terdapat 4 buah kampus, yaitu UGM, UNY, Universitas Sanata Dharma dan Atmajaya. Di seputar kampus inilah menjadi daerah yang sangat padat diisi oleh para mahasiswa. Daerah Barek, Blimbingsari, Sendowo, Terban, Sagan, Samirono, Gejayan, Pogung, merupakan kantong-kantong pemukiman mahasiswa yang sangat padat. Pemukiman mahasiswa di daerah ini sebagian besar berbentuk pondokan.

Sekalipun tingkat urbanisasi di Yogyakarta cukup tinggi, khususnya dari pelajar dan mahasiswa yang datang untuk melanjutkan studinya, akan tetapi perwajahan kota tidak semata-mata karena perkembangan dunia pendidikan yang ada. Karena selain sebagai kota pelajar, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota budaya dan pariwisata. Beberapa predikat tentang kota Yogyakarta tersebut memang telah menjadi kesan tersendiri bagi mereka yang berkunjung ke kota ini. Nampaknya suasana Yogya sangat berbeda dengan suasana kota-kota lain di Indonesia. Kesan tentang kehidupan orang Jawa yang “asli” sangat melekat pada gaya hidup golongan masyarakat tertentu (terutama yang tinggal di lingkungan Kraton) dan tatanan kota dengan berbagai macam simbol yang memacu pada kehidupan tradisi Jawa masa lalu. Suasana ini terbentuk tidak hanya semata-mata karena masih adanya simbol kekuasaan Jawa yang tercermin dari keberadaan Kesultanan Yogyakarta, tetapi lebih pada kepentingan-kepentingan sekelompok orang atau masyarakat dalam mempertahankan suasana seperti itu. Susanto (1992) mengungkapkan bahwa Yogyakarta ditata secara sengaja sebagai kota nostalgia. Hal ini tampak dari berbagai macam tatanan ataupun bangunan yang memberikan kesan Jawa namun dibuat atau dibangun dalam kerangka pembangunan

modern. Nampaknya ada semacam kepentingan-kepentingan tertentu dalam memformasikan kesan sebuah kota agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan, digunakan, ataupun dijual. Hal ini sebenarnya bukan menjadi persoalan apabila konstruksi tersebut dapat benar-benar digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan sekelompok orang.<sup>35</sup>

Kesan Kota Yogyakarta sebagai “kota budaya” sangat erat kaitannya dengan usaha-usaha dalam membentuk sebuah kesan tentang keberadaan Kota Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa. Berbagai macam bukti sejarah telah dikemas untuk mendukung kesan ini dengan menempatkan keberadaan kraton Yogyakarta sebagai pusat peradaban Jawa yang tertinggi. Sedang berbagai macam usaha lain untuk memperkuat kesan ini adalah renovasi bangunan tua yang menjadi symbol budaya Jawa. Pembangunan gedung-gedung baru dengan menggunakan konstruksi Jawa, penataan ruang-ruang hotel berbintang dengan ornamen Jawa, dan pembingkaiian budaya Jawa dalam miniatur kehidupan kraton. Selain itu keberadaan museum-museum seperti Sonobudoyo, Amengkubuwono IX, dan Puro Pakualaman mungkin juga dapat menambah kuatnya citra Kota Yogyakarta sebagai “kota budaya”. Kondisi ini sebenarnya mengundang beberapa pertanyaan, antara lain apakah kehidupan sehari-hari manusia Jawa masa lampau yang berada di luar tembok kraton bukan merupakan budaya Jawa? Mengapa Kota Yogyakarta dikonstruksikan sebagai “pusat kebudayaan Jawa”, “kota perjuangan”, “kota pendidikan”, atau “kota pariwisata” dan bagaimana dengan kota-kota lain.

---

35 Y. Argo Twikromo ‘Gelandangan Yogyakarta’, Sesuatu Kehidupan dalam Bingkai Tatanan Sosial-Budaya “Resmi”, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999, hal. 18



Pemahaman akan citra ditegaskan oleh Susan Sontag bahwa citra sebagai sebuah ilusi atau bayangan, copy bukan asli, *representation* bukan *reality*, artinya apa yang dicitrakan mempunyai jarak dengan realita yang sebenarnya.<sup>36</sup> Dalam konteks kota Yogyakarta telah memunculkan kesan tentang sebuah kota muncul kepermukaan seperti tersebut di atas, sebenarnya dapat memberikan kesadaran akan adanya usaha-usaha pengkonstruksian suatu citra atau kesan dari sekelompok masyarakat atau para elite yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Kesadaran ini merupakan bekal dalam mengenal lebih jauh akan adanya usaha-usaha untuk menjadikan kepentingan-kepentingan sekelompok orang sebagai kepentingan umum atau dikonstruksikan sebagai kepentingan semua pihak. Tentunya kesan kota Yogyakarta sebagai “kota budaya,” “kota perjuangan,” “kota pendidikan,” dan “kota pariwisata” akan memudar apabila kota Yogyakarta tidak lagi bisa dimanfaatkan, dieksploitasi, dan dijual dengan munculnya kesan-kesan tersebut di atas. Hal ini berkaitan dengan latar belakang munculnya kesan-kesan tersebut yang memang sengaja dikonstruksikan oleh para elite bukan oleh masyarakat kebanyakan.

Memasuki tahun 1990-an, Kota Yogyakarta semakin dibanjiri dengan bangunan-bangunan monumental yang bercirikan modern. Munculnya beberapa pusat perdagangan barang-barang konsumsi modern di tempat-tempat strategis, seperti Matahari Departement Store, Hero Supermarket, Robinson, Kentucky Fried Chicken, dan McDonald’s menimbulkan kesan tersendiri tentang arah perkembangan sebuah kota. Tidak lama kemudian, taksi-taksi juga mulai merebak dan secara perlahan. Hotel-hotel berbintang mulai bertebaran di wilayah kota Yogyakarta dan sekitarnya seperti

---

36 Transpiosa Riemandha., “Dunia (Citra) Kaki Lima Malioboro”, dalam “PERMAINAN TAFSIR, Politik Makna di Jalan pada Penghujung Orde Baru”, Penerbit INSIST Press dan Jerat Budaya bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal. 35.

Aquila Prambanan (sekarang: Holiday Inn), Melia Purosani, Santika, Radisson, Hyatt, Mustika Ratu Sheraton, Mercure dan Ibis. Tidak ketinggalan, pusat-pusat perdagangan, seperti Malioboro Mall dan Galeria, telah dibangun dan menjadi kebanggaan sekelompok masyarakat kota, selain itu rencana pembangunan 3 (tiga) mega mall di wilayah Sleman, semakin menunjukkan kota Yogyakarta tidak kalah dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Upaya integrasi Yogyakarta ke dalam pasar dunia sangat terlihat dari gejala terakhir perkembangan kota ini, secara terang-terangan telah mengarah pada kecenderungan untuk menjadikan kota Yogyakarta sebagai arena penumpukan modal yang relatif besar. Konsekwensi perkembangan semacam ini tentunya mensyaratkan keadaan kota yang tertib, teratur, dan aman. Ini mungkin berkaitan dengan konstruksi kota Yogyakarta yang didengung-dengungkan oleh pemerintah daerah sejak tahun 1992, yaitu bersih, sehat, indah, dan nyaman. Konstruksi ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1 tahun 1992, terlebih lagi ketika kebijakan Otonomi Daerah, dimana pemerintah daerah berkepentingan besar atas nama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menarik investor masuk untuk menanamkan modalnya sebesar-besarnya dan karena itu pemerintah daerah berupaya sedapatnya untuk memberikan fasilitas maksimal sebagai upaya penarik para penanam modal, sekalipun tidak jarang terlihat sering-sering kepentingan masyarakat terabaikan atau terkalahkan, konstruksi citra menjadi salah satu upaya menjadikan Yogyakarta sebagai daerah alternatif yang menjanjikan bagi para investor dalam maupun luar negeri.

Label “Yogyakarta Berhati Nyaman” atau “Jogjakarta

Never ending Asia” dikonstruksikan untuk mendukung predikat Yogyakarta sebagai “kota budaya,” “kota perjuangan,” “kota pendidikan,” dan “kota pariwisata,” serta fungsi kota Yogyakarta sebagai pusat administrasi pemerintahan, pusat pertumbuhan dan perkembangan daerah, dan pusat transportasi dan perdagangan. Kalau dilihat lebih jauh, hal ini sebenarnya juga merupakan cara untuk memanusiaikan pembangunan yang bertumpu pada percepatan pertumbuhan ekonomi, karena itu persoalan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, keteraturan, kenyamanan, dan penyeragaman ingin dimunculkan sebagai suatu kesan atau citra tentang kehidupan yang ada di kota Yogyakarta. Apabila mau jujur, hal tersebut sebenarnya adalah sebuah citra yang dikonstruksikan juga untuk menarik para investor agar pertumbuhan ekonomi masyarakat kota Yogyakarta (baca: kelompok-kelompok tertentu) dapat dipicu. Di sisi lain, kontrol terhadap semua kehidupan yang ada akan menjadi lebih mudah karena konstruksi-konstruksi tersebut mengandung unsur penyeragaman.

Untuk mendukung konstruksi ini; berbagai macam papan, poster, dan tugu kecil bertuliskan “Yogyakarta Berhati Nyaman” dipasang di hampir setiap sudut kota. Sering-sering konstruksi citra ini tidak memberikan ruang bagi kelompok kaum jalanan, salah satunya pengamen untuk mendapatkan perlakuan yang layak, karena kaum jalanan lebih banyak dipahami sebagai sesuatu yang menghambat citra yang ada, karena mereka kumuh, sumber kejahatan dan labeling negatif lainnya, hal yang tidak disadari oleh para pemegang kebijakan adalah bahwa kaum jalanan, seperti gelandangan, pengamen, pedagang kaki lima dan lain-lain adalah justru lahir dari kebijakan yang diambil dalam proses pembangunan kota.

## **B. Gaya Hidup dan Marginalisasi Kaum Miskin Kota**

Bentuk perkotaan merupakan akibat langsung dari cara-cara terorganisirnya suatu masyarakat. Oleh karena itu, dalam suasana yang timpang, tidaklah mengherankan kalau kota-kota juga mengalami ketimpangan. Telah diungkapkan bahwa sepanjang sejarahnya kota melayani kelompok-kelompok elite dan hanya pada masyarakat elitelah kota benar-benar bisa berkembang. Masyarakat egaliter yang didasarkan atas apa yang disebut oleh Polanyi dengan asas “timbang balik yang seimbang” itu tidak mampu menciptakan kota-kota. Tanpa adanya kekuasaan sentral dan mekanisme untuk menciptakan surplus atas konsumsi dan memusatkan surplus tersebut di wilayah-wilayah perkotaan, maka kota-kota tersebut tidak bisa tumbuh. Urbanisasi hanya akan terjadi dalam masyarakat yang didasarkan atas “redistribusi” dimana surplus atas konsumsi dapat di alokasikan oleh suatu kelompok.

Salah satu problem sangat penting yang telah dihadapi negara-negara Dunia Ketiga sejak awal abad ini adalah merebaknya kontradiksi ekonomi politik evolusi pertumbuhan perkotaan di negara-negara itu. Pertama, lebih dari yang pernah dialami oleh negara-negara maju di Dunia Pertama, pertumbuhan konsentrasi penduduk di kota-kota besar negara-negara Dunia Ketiga terjadi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kingsley Davis mencatat bahwa pertumbuhan penduduk perkotaan di 34 negara sedang berkembang di Dunia Ketiga pada tahun 1940-an dan 1950-an mencapai angka rata-rata 4,5 persen per tahun (dengan variasi regional sebesar 4,7 persen untuk 7 negara di Afrika dan 15 negara di Asia, dan 4,3 persen untuk 12 negara di Amerika Latin), jauh lebih tinggi dari angka

pertumbuhan 2,1 persen yang dialami negara-negara Eropah pada paro kedua abad XIX ketika negara-negara Eropah berada pada tingkat perkembangan yang sama. Pada saat yang sama, pertumbuhan kota-kota tersebut ternyata tidak diikuti dengan kecepatan yang sebanding oleh pertumbuhan industrialisasi. Para ahli menyebut fenomena itu sebagai “urbanisasi berlebih” (*over-urbanization*), “urbanisasi semu” (*pseudo-urbanization*) atau “hiperurbanisasi” (*hyperurbanization*), beberapa istilah yang mereka pakai untuk menggambarkan tingkat urbanisasi yang terjadi terlalu tinggi di atas tingkat industrialisasi yang dicapai oleh evolusi suatu masyarakat.

Implikasi penting yang muncul dari fenomena “urbanisasi berlebih” di negara Dunia Ketiga termasuk Indonesia adalah bahwa urbanisasi berlebih menghambat pembangunan ekonomi oleh karena ia memobilisasi sumber-sumber daya non-produksi untuk menciptakan dan mengorganisasi pelayanan yang diperlukan bagi konsentrasi penduduk yang tinggi di bawah kondisi tingkat industrilisasi yang rendah dan sebagai akibatnya, urbanisasi berlebih telah menciptakan kontradiksi-kontradiksi ekonomi politik yang sangat mendasar dengan menciptakan hadirnya di daerah perkotaan yakni kelas yang dinamakan oleh Karl Marx sebagai kelas “lumpen proletariat” dalam jumlah yang terus membesar dan kondisi ini oleh Nasikun (1998), dilihat sebagai suatu kondisi yang sangat potensial bagi munculnya ideologi dan gerakan politik radikal.

Selain karena adanya persoalan sejarah kolonialisme Barat yang telah memberikan pengaruh terhadap perwajahan kota di Indonesia, sebagai bagian dari upaya integrasi pasar dunia, yang kemudian berpengaruh pada tingginya tingkat urbanisasi pada wilayah perkotaan, hal yang juga perlu dilihat adalah bagaimana kebijakan negara dalam

hal ini pemerintah juga memberikan pengaruh terhadap perwajahan pengelolaan kota, sebagaimana hasil studi yang dilakukan oleh Wendy Miller (1996) mengatakan bahwa usahanya menjalankan modernisasi kota, pemerintah tidak hanya mengadopsi pembangunan ekonomi saja tetapi juga mengadopsi nilai sosial-budaya di dalamnya, misalnya bagaimana individu dapat mengembangkan dan membangun dirinya. Sebagai akibatnya mereka yang tidak dapat mengikuti standar (gaya) hidup yang telah ditentukan akan dianggap sebagai “menyimpang”. Secara sosial “penyimpangan” akan dianggap sebagai ancaman atau berbahaya dan tidak ada toleransi bagi para pelakunya.

Sejalan dengan itu dikemukakan oleh Umar Khayam bahwa budaya khas kota Indonesia (setidaknya Jawa) tidak lagi melihat “keselarasan” sebagai nilai terpenting dari masyarakat, tetapi lebih melihat pada “kejelasan tempat dan peranan dalam masyarakat,” baru kemudian “keselarasan.” Konstruksi budaya semacam ini cenderung menempatkan para bekas petani atau kaum urban terperangkap dalam posisi yang relatif sulit, dimana mereka kurang (baca: tidak) mendapatkan tempat dalam lingkungan sosial-budaya kota. Dengan demikian mereka dipandang sebagai kelompok sosial-budaya yang terpisah dari “budaya kota” karena dianggap tidak dapat masuk dalam ritme sosial-budaya tersebut.

Kondisi macam ini membawa implikasi terhadap semakin kuatnya dikotomi antara kehidupan “resmi” kota dan kehidupan lain yang berbeda atau bersebrangan dengan konstruksi kehidupan kota yang “resmi” tersebut, yang cenderung ditempatkan dalam posisi yang kurang diuntungkan atau bahkan dipandang sebagai suatu kehidupan yang bercitra negatif. Kehidupan mereka sering dipandang telah mengurangi kenyamanan hidup warga kota lainnya, walaupun di sisi lain ada pula warga yang terganggu rasa

kemanusiaannya dengan melihat beratnya kehidupan yang harus dipikul oleh para urban, yang sebgaaian besar menjadi bagian dari kaum miskin kota, Selain itu kehadiran kaum miskin kota, dalam kaitan salah satunya adalah pengamen sering dipandang oleh pemerintah sebagai kelompok yang telah mengotori lingkungan perkotaan dan merusak keindahan tata kota.

Realitas sebuah kota yang telah terintegrasi kedalam pasar global yang didominasi oleh sistem kapitalisme lebih dikonstruksikan saat ini relatif kurang dapat mawadahi keberadaan berbagai macam bentuk dan cara hidup di lingkungannya. Munculnya konstruksi budaya “resmi” (“modern”) sebagai suatu tatanan kehidupan yang dominan mengandung konsekuensi bahwa keanekaragaman sosial budaya dengan berbagai konteks kehidupannya masing-masing menjadi tidak bermakna dan kurang dihargai keberadaannya. Bentuk-bentuk kehidupan yang tidak mampu menyesuaikan diri atau bahkan dianggap tidak dapat menyesuaikan diri dengan bentuk kehidupan yang dominan menjadi tersingkir dari arena persaingan hidup di daerah perkotaan. Konstruksi pembangunan “modern” yang dalam konteks Indonesia lebih menekankan pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi semata merupakan kekuatan yang cukup dahsyat dalam menciptakan tatanan kota yang menjadi tuntutan ideologi “modern”. Dominasi kekuatan pasar global tersebut menjadi suatu ancaman bagi golongan masyarakat yang dianggap tidak dapat memasuki konstruksi “ruang” yang tersedia di daerah perkotaan. Homogenitas gaya hidup masyarakat perkotaan telah memarginalkan kelompok kaum miskin kota ke dalam posisi yang secara streotype menyimpang, seperti halnya keberadaan pengamen.

Karena itu keberadaan kaum miskin kota, selain harus berhadapan dengan persoalan ekonomi, juga harus

berhadapan dengan konstruksi image sosial-budaya yang negatif dari masyarakat kota, ada beban ganda yang harus dipikul oleh kaum miskin kota, seperti pemulung, pengamen, pedagang asongan, pedagang kaki lima dan sektor informal lainnya, image negatif terhadap keberadaan kaum miskin kota ini terefleksi juga pada konteks kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kota, atas nama keindahan, ketertiban dan keamanan menjadi sah bagi pemerintah untuk melakukan tindakan apapun, seperti penggarukan, penggusuran dan bentuk operasi tertib sosial lainnya. Dari kondisi yang menimpa kaum miskin kota ini menjadi jelas bahwa masalah keteraturan dan keindahan kota jauh lebih penting dibandingkan dengan persoalan hidup mati kaum miskin kota. Sikap-sikap yang diambil dan dirumuskan dalam kebijakan tersebut menunjukkan tidak berjalannya komunikasi dengan para penghuni jalanan dan pada gilirannya memberi sanksi negatif kepada penduduk miskin dengan aturan-aturan anti pengamen, pemulung, pedagang jalanan, anti perumahan kumuh yang liar dan anti-anti lainnya.

Dalam kasus kota Yogyakarta tidak lebih kondisi yang dihadapi kaum miskin kota sama dengan kota-kota besar lainnya, tidak sulit kita menemui respon negatif masyarakat atau pemerintah terhadap keberadaan kaum miskin, seperti banyak kita jumpai tulisan-tulisan seperti: pemulung di larang masuk, ngamen gratis, yang kesemuanya mengisyaratkan larangan bagi mereka untuk memasuki wilayah atau lingkungan tersebut, perlakuan yang dihadapi kaum miskin Kota semakin menegaskan bagaimana keras dan tidak ramahnya struktur dan sistem yang berlaku, bahwa bentuk bentuk marginalisasi yang terjadi secara logis semakin menumpuk rasa prustasi pada masyarakat kota ekonomi lemah, yang secara akumulasi menjadi satu hal yang potensial bagi munculnya gerakan



massa. Eric Hoffer mendefinisikan kondisi prustasi sebagai suatu kondisi seseorang yang mengalami kekecewaan dan gagal, tipe orang-orang inilah merupakan ‘panen’ pertama dari gerakan massa yang mampu disatu pihak membangkitkan pada jiwa dari gerakan massa yang hanyut itu suatu arti hidup yang baru, dengan cara mengutuk dan melempar jauh masa kini yang sudah bobrok dan busuk itu. Di lain pihak dengan memberi gambaran dan janji-janji akan hari depan yang gemilang penuh kepuasan diri.<sup>37</sup>

Pada dasarnya, kehidupan sebagai pengamen bukan merupakan suatu pilihan hidup yang sebenarnya. Kurang tersedianya “ruang” di daerah perkotaan bagi alternatif kehidupan yang lain telah memaksa mereka untuk sampai pada suatu pilihan hidup sebagai pengamen agar tetap bisa bertahan hidup di lingkungan perkotaan. Ironisnya, pilihan hidup semacam itu pada umumnya kurang dipandang secara arif sebagai suatu strategi handal golongan masyarakat yang berusaha keras untuk tetap bertahan hidup di tengah semakin sempitnya “ruang” yang tersedia bagi kehidupan mereka. Perjuangan-perjuangan hidup kelompok kaum miskin kota seringkali menjadi tanpa makna apabila dihadapkan pada kuatnya citra negatif yang ditujukan pada kelompok ini, karena konstruksi image lebih distandarisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Guinness (1985) bahwa karena mereka tidak mempunyai tempat tinggal dan sarana hidup yang tetap, maka *stereotype* kaum miskin kota seperti halnya pengamen, pemulung, pedagang asongan dan lainnya adalah licik, tidak dapat dipercaya, menganggap ketertiban, merupakan sampah masyarakat, yang tidak mempunyai citra rasa “budaya” atau kesusilaan dalam bingkai kehidupan resmi masyarakat kota.

---

37 Yap Thiam Hien., Kata Pengantar, dalam Eric Hoffer “GERAKAN MASSA”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988, hal. Ix.

Usaha untuk memberikan makna tunggal terhadap suatu budaya kota mengarah pada suatu proses penyeragaman yang jauh dari kenyataan. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan masih adanya berbagai macam kehidupan yang berbeda dengan konstruksi budaya tersebut, seperti kehidupan pengamen atau kehidupan masyarakat “miskin” lainnya. Di tengah kuatnya berbagai macam tekanan, banyak fakta menunjukkan bahwa mereka masih tetap bisa bertahan hidup dan bersaing dengan kekuatan-kekuatan relatif besar yang ada di sekelilingnya. Kehidupan semacam ini bukan seharusnya dipandang sebagai bentuk kehidupan yang harus disingkirkan selama masyarakat kota dan pemerintah belum dapat menyediakan “ruang” bagi semua golongan masyarakat, namun perlu dihargai sebagai suatu bentuk strategi bertahan hidup. Citra negatif yang diarahkan pada kehidupan semacam ini hanya akan menambah semakin beratnya beban hidup mereka. Suatu anggapan yang hanya menyalahkan mereka jelas merupakan suatu hal yang kurang tepat karena kehidupan semacam ini sebenarnya mengandung kritik strategis terhadap dominasi kekuatan konstruksi budaya yang sedang dianut dewasa ini atau terhadap tatanan masyarakat yang belum dapat menyediakan “ruang hidup” bagi semua orang tanpa kecuali.

### **C. Keberadaan Instansi Pemerintah**

Keberadaan instansi pemerintahan, seperti Kantor Wilayah Departemen Sosial Republik Indonesia (aparatur menteri sosial), Dinas Sosial propinsi (aparatur gubernur), dan Dinas Sosial Kotamadya (aparatur walikota) mempunyai tanggung jawab mencari pemecahan masalah-masalah gelandangan dan kelompok masyarakat jalanan lainnya. Ketiga lembaga ini menggunakan cara-cara yang relatif sama dalam menangani keberadaan gelandangan, yaitu persuasif,

refresif dan kuratif. Menurut keputusan Walikota madya Kepala Daerah tingkat II Yogyakarta No. 1040/KD/1993, penanggulangan preventif adalah upaya yang dilaksanakan secara terorganisir yang meliputi, penyuluhan, bimbingan, latihan, pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan persoalan masyarakat jalanan, cara penyuluhan sosial, bimbingan sosial, dan latihan ketrampilan. Penanggulangan represif adalah upaya yang dilaksanakan secara terorganisir untuk menanggulangi dan atau mencegah meluasnya pengaruh masalah penggelandangan dan pengemis dengan cara razia, penampungan sementara untuk seleksi, dan pelimpahan. Sedang penanggulangan kuratif adalah upaya yang dilaksanakan mulai dari motivasi, bimbingan, latihan ketrampilan sampai pada pembinaan lanjut kelompok masyarakat jalanan agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Apabila dilihat lebih lanjut, cara-cara yang digunakan oleh ketiga lembaga pemerintahan tersebut (dalam konteks Pemerintah Daerah Kotamadya Ygyakarta) mengandung asumsi: pertama, bahwa kelompok jalanan adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat. Kedua, berkaitan dengan predikat kota Yogyakarta sebagai “kota budaya”, “kota perjuangan,” “kota pendidikan,” dan kota berhati nyaman,” maka kehadiran mereka akan mengganggu masalah ketertiban, keindahan, kebersihan, dan kenyamanan kota. Ketiga, kehadiran Kaum Miskin Kota (KMK) akan menambah semakin rumitnya masalah penataan pemukiman maupun pemecahan problem sosial dari masyarakat yang sangat heterogen. Dan keempat, gaya hidup kelompok gelandangan, pengemis, pemulung dan

lain-lainnya sudah dikonstruksikan sebagai gaya hidup yang kurang baik. Dengan demikian gaya hidup mengelandang dianggap sebagai gejala sosial yang tidak bisa ditolerir. Sehingga harus diberantas, ditekan, ditanggulangi, dan diusahakan jalan pemecahannya agar tidak muncul di daerah perkotaan. Kondisi semacam ini cenderung menempatkan pihak pelaku penggelandang sebagai obyek dari setiap usaha penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Pada kenyataannya ketiga lembaga pemerintah tersebut tidak sendiri dalam melakukan usaha penanggulangan gejala penggelandangan. Untuk usaha penanggulangan represif, terutama dalam merazia gelandangan, ketiga lembaga pemerintah tersebut tidak berhak melakukannya. Razia terhadap gelandangan akan dikoordinir oleh Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat kotamadya dengan melibatkan polisi. Pegawai Dinas Sosial tingkat propinsi maupun kotamadya, atau pegawai Kanwil Depsos. Sedang di tingkat kecamatan akan dikoordinir oleh Camat masing-masing wilayah dengan melibatkan polisi, satuan polisi pamong praja, dan pekerja sosial setempat. Kegiatan razia ini memang harus melalui koordinasi dengan ketiga lembaga sosial yang ada (kanwil depsos, Dinas Sosial Propinsi, dan Dinas Sosial Kotamadya) agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

Tempat-tempat penampungan sosial yang disediakan oleh pihak Kanwil Depsos DIY adalah Panti Sosial Binakarya yang berlokasi di Purwomartani kecamatan Kalasan kabupaten Sleman dan di Karangrejo, kecamatan Tegalrejo kotamadya Yogyakarta. Sedang tempat penampungan sosial yang disediakan oleh Dinas Sosial tingkat propinsi adalah Panti Penampungan Sosial Karanganyar di kecamatan Margangsari Kotamadya Yogyakarta. Dinas Sosial tingkat kotamadya belum memiliki tempat penampungan sosial sendiri dan

masih bergabung dalam tempat penampungan sosial milik Dinas Sosial tingkat propinsi, selain itu juga keberadaan penampungan kaum jalanan pada rumah singgah yang terdapat kurang lebih 9 (sembilan) buah yang dikelola swasta, tapi masih berada di bawah koordinasi dinas sosial juga dilakukan.

Lembaga-lembaga pemerintah tersebut bertindak berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kehidupan pergelandangan. Beberapa peraturan, seperti KUHP pasal 505 (tertulis bahwa setiap orang yang tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap dan mengelandang tidak tentu arah tujuannya dihukum maksimal 3 bulan kurungan). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1980 (usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis), Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tahun 1983 (koordinasi penanggulangan gelandangan dan pengemis), dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.23/Huk/1996 (bagian tentang masalah operasional dalam rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis) merupakan peraturan-peraturan pemerintah yang mempunyai tujuan relatif sama, yaitu, penanggulangan kehidupan gelandangan.

Dalam konteks Yogyakarta, beberapa peraturan seperti Peraturan Pemerintah Daerah No.10 tahun 1968 yang meliputi penataan lingkungan secara baik, rapi, bersih, sehat dan damai di Kotamadya Yogyakarta, Peraturan Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta No.1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman, dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1040/KD/1993 tentang pola penanggulangan gelandangan dan pengemis serta pola penanggulangan tuna susila di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta juga merupakan peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan keberadaan gelandangan.

## **D. Sejarah Kultural dan Kategorisasi Pengamen**

Ada dua perspektif dalam memahami keberadaan pengamen, yakni persepektif yang pertama, melihat keberadaan pengamen sebagai sebuah fenomena budaya, dan yang kedua melihat pengamen sebagai hal yang muncul dari implikasi kebijakan pengembangan kota sebagai pusat industrialisasi. Dalam perspektif pertama mengasumsikan bahwa fenomena pengamen sudah ada dalam masyarakat tradisional yang ditunjukkan dengan keberadaan kelompok-kelompok kesenian yang juga melakukan pertunjukkan dengan berpindah-pindah, seperti keberadaan seni Reog, Kuda Kepang, Lundruk dan Tukang Ngamen, yang itu erat kaitannya dengan budaya lelana atau mengggelandang. Akan tetapi fenomena lelana kalau dipahami lebih mendalam tidak lepas dari persoalan motif ekonomi, karena itu dalam konteks memahami kemunculan pengamen dalam kerangka budaya lelana, dapat dipahami sangat terkait dengan persoalan kosentrasi pembangunan di wilayah Perkotaan sebagai daya tarik orang untuk meningkatkan tarap ekonominya, artinya perspektif kedua mengasumsikan bahwa implikasi pembangunan Perkotaan yang tidak seimbang dengan pembangunan Pedesaan telah menjadi lampu petromak yang menarik orang untuk melakukan urbanisasi ke wilayah Perkotaan untuk meningkatkan tarap ekonomi, selain juga karena keterbatasan resource yang ada di wilayah Pedesaan, yang tidak memberikan pilihan, selain memang orang harus melakukan urbanisasi.

Lebih jauh lagi secara spesifik ada dua jenis penyebab lahirnya lelana yaitu politis dan ekonomis. Biasanya para pengembara sebab politis berasal dari kalangan priyayi yang kedudukannya dijatuhkan atau tanah mereka disita oleh raja atau musuh-musuhnya. Namun mobilitas terbesar adalah dari para lelana yang mengembara karena alasan ekonomis.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa sebagian petani pergi meninggalkan desa karena kegagalan panen, wabah penyakit atau musibah lainnya. Sebab lain adalah beredarnya cerita mengenai kemakmuran suatu daerah yang ditandai dengan kelebihan padi. Sementara itu, kota sendiri membutuhkan tenaga-tenaga kasar untuk keperluan perdagangan. Pada masa itu sarana transportasi masih banyak menggantungkan pada tenaga manusia, sehingga tenaga-tenaga mereka juga sangat dibutuhkan bagi distribusi barang ke daerah-daerah lain. Hal ini pula yang merupakan salah satu kekuatan untuk menyedot para petani ke wilayah Perkotaan. Sistem ekonomi yang ada pada saat itu memang menghendaki adanya pengembara sebagai tenaga murah di Perkotaan. Artinya ada semacam hubungan timbal balik antara sistem ekonomi dengan gejala mengelandang yang muncul dalam gejala lelana.

Fenomena gelandangan ternyata juga tidak lepas dari implikasi sejarah penguasaan Kolonial Belanda, sebagaimana yang dikemukakan oleh Onghokham bahwa sistem tanam paksa sesungguhnya sudah melahirkan gejala “gelandangan” di kota-kota di Jawa yang disebut lelana dengan ciri-cirinya tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap.

Dari dokumen yang ada, para lelana ini terdiri atas batur yaitu mereka yang bekerja sebagai pengangkutan barang perdagangan dari satu kota ke kota lain. Selain itu juga tercatat buruh *pemecel* kayu, seniman mbarang dan lain-lainnya. Untuk anak-anak tercatat bocah angon, yaitu mereka yang menggembala ternak dari satu daerah ke daerah lain.<sup>38</sup>

Memahami relasi gejala gelandangan ataupun pengamen dengan persoalan kebutuhan pemenuhan ekonomi,

---

38 Onghokham., “Gelandangan Sepanjang Zaman”, dalam “Gelandangan Pandangan Ilmu Sosial”, LP3ES, Jakarta, Cet. IV, tahun 1991, hal . 5-6

maka kenyataan itu tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia, dan konsentrasi pembangunan itu jelas terkonsentrasi pada wilayah perkotaan, terlebih lagi bagaimana kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru yang menitik tekankan pada pertumbuhan ekonomi telah membuat kota-kota di Indonesia mengalami perubahan baik secara keruangan, ekonomi maupun sosio kultural. Bahkan proses perubahan itu sesungguhnya sudah di mulai sejak jaman kolonial Hindia Belanda. Dengan demikian, gejala gelandangan dan juga pengamen tidaklah hadir secara seketika, atau diimpor begitu saja entah dari wilayah yang tidak diketahui, melainkan terkait erat dengan proses historis pertumbuhan kota.

Menurut berbagai literatur mengenai perkotaan (di) Indonesia yang ada, pertumbuhan ekonomi yang direkayasa oleh Orde Baru sejak akhir dekade 1960-an telah membawa perubahan-perubahan yang signifikan. Revolusi yang dilaksanakan di daerah-daerah pedesaan telah meningkatkan produksi beras secara tajam. Namun di sisi lain, perubahan ini membuat para buruh tani harus menyingkir dari desa karena kehilangan pekerjaan atau tanahnya yang sempit yang tidak lagi mampu memberikan pemenuhan tuntutan hidup yang semakin mahal, karena itu implikasinya bagi masyarakat pedesaan adalah hidup tergantung pada sistem buruh upahan atau migrasi ke kota.

Hal yang sama juga terjadi dalam proses perkembangan kota Yogyakarta, dari data BPS DIY 1990 dan 1994 menunjukkan pertumbuhan kota di Yogyakarta menyebabkan lahan-lahan pertanian di sekitar kota Yogyakarta mengalami penyusutan. Penyusutan tersebut terutama terjadi di kabupaten Sleman dan kabupaten Bantul yang menjadi



penyangga kota Yogyakarta. Di kabupaten Sleman, rata-rata setiap tahun 253 hektar lahan pertanian beralih fungsi untuk kegiatan non pertanian, sedangkan di kabupaten Bantul luasnya rata-rata 85,75 hektar pertahun, konsekwensi semakin menyempitnya lahan pertanian menjadikan Kota Yogyakarta yang menjadi pilihan bagi buruh tani yang harus menyingkir dari pedesaan di sekitarnya karena kehilangan pekerjaan atau karena tanahnya yang semakin sempit. Namun kota Yogyakarta tidak dapat menyediakan lapangan kerja yang banyak bagi buruh tani, karena roda perekonomian Yogyakarta tidak digerakkan oleh industri padat karya, tetapi oleh sektor jasa, pertanian, dan perdagangan hotel dan restoran.

Selain memang karena alasan histories dimana Kota sendiri pada saat itu, membutuhkan tenaga-tenaga murah untuk pengembangan wilayahnya. Pertumbuhan kota telah menciptakan berbagai peluang kerja, maka tidaklah mengherankan bila para buruh tani berusaha mengadu nasibnya dengan beralih sumber mata pencaharian. Kota yang sedang tumbuh menjadi pusat ekonomi menjadi tempat penampungan tenaga kerja tidak trampil dan murah dari wilayah pedesaan.

Melemahnya desa untuk menyerap tenaga kerja mengakibatkan banyak tenaga kerja pergi ke wilayah perkotaan. Terjadi pergeseran struktur mata pencaharian dari pertanian ke bidang jasa yang tidak dijembatani dengan keahlian tertentu. Mereka yang pergi ke kota tidaklah siap dengan tuntutan kerja yang dibutuhkan. Munculah gejala kegiatan ekonomi yang disebut sektor informal, mulai dari pedagang jalanan sampai yang berbau kriminal. Adanya ketidak seimbangan antara jumlah penduduk yang masuk ke perkotaan dan lapangan kerja formal inilah yang kemudian

menandai meningkatnya kepadatan kota. Secara spasial ia muncul dalam wujud kampung kumuh dan secara sosial ia memunculkan gejala mereka yang tidak memiliki tempat dan pekerjaan tetap atau gelandangan. Dengan demikian sesungguhnya kehadiran pengamen adalah bagian dari hadirnya kemiskinan perkotaan yang sering diasosiasikan sebagai kelompok gelandangan.

Kesemua Ilustrasi di atas perlu diketengahkan untuk memahami bahwa keberadaan pengamen dan kaum miskin kota lainnya tidak lepas dari implikasi kebijakan pembangunan yang diterapkan di Indonesia. Realitas pengamen bukanlah sebuah fenomena yang lahir dari ruang hampa, tapi ia lahir dari sebuah kenyataan dari konstruksi strategi pembangunan yang lebih menitik tekankan pada proses industrialisasi yang terkonsentrasi pada wilayah Perkotaan, memang persoalan pengamen tidak sepenuhnya murni persoalan kebutuhan orang akan pekerjaan atau karena persoalan ekonomi, akan tetapi kemunculan pengamen juga disebabkan karena persoalan psikologis keluarga (baca: Broken Home) yang menjadikan bagian dari anggota keluarga untuk lari ke jalanan dan menjadi pengamen. Khusus dalam konteks Yogyakarta keberadaan pengamen tidak bisa dilepaskan dari romantisme Yogyakarta sebagai kota budaya, dimana kegiatan seni khususnya memiliki tradisi sejarah yang panjang. Aktifitas mengamen dipandang sebagai salah satu pilihan bagi aktualisasi kreatifitas seni musik. Dari beberapa penyebab keberadaan pengamen memunculkan tiga kategori pengamen.

Dari ketiga kategori penyebab kemunculan pengamen kalau di konversikan dengan data kebutuhan lapangan kerja, maka kesimpulan orang mengamen karena sempitnya lapangan pekerjaan akan menempati posisi teratas dari

latar belakang orang mengamen. Sebagai satu gambaran, bagaimana tidak seimbangnya antara lowongan kerja sebanyak 10.565 orang dengan jumlah angka pencari kerja yang mencapai 90.112, artinya aktifitas mengamen menjadi salah satu pilihan alternatif, diantara pilihan profesi seperti pekerja informal lainnya. Kenyataan dari banyaknya pencari kerja di DIY ini sebanding dengan apa yang terjadi di Indonesia secara umum, angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2001 mencapai 8,1 persen, dan kemudian bergerak naik setahun kemudian menjadi 9,1 persen, serta pada tahun 2003 naik lagi menjadi 9,85 persen atau sebesar 10,83 juta orang.

Perbandingan angkatan kerja dan pencari kerja untuk tahun 2002 tercatat ada 2.698.356 atau 64,45 persen dari angkatan kerja dan 35,55 persen bukan merupakan angkatan kerja, artinya sisa sejumlah 128.6 ribu merupakan pencari kerja/pengangguran. Tingginya data pengangguran di atas dalam konteks memahami aktifitas mengamen menjadi pilihan alternatif bagi sempitnya lapangan kerja di Perkotaan, ditambah lagi dengan rendahnya skill dan tingkat pendidikan yang dimiliki tenaga kerja. Dari 2.474.939 tenaga kerja pada tahun 2003 lebih dari 1.217.062 hanya berpendidikan TK (Taman Kanak-kanak) dan Sekolah Dasar (SD).

Berkaitan dengan profesi pengamen memang juga membutuhkan skill dalam bermain musik. Kalau banyak orang mengamen karena problem sempitnya lapangan kerja (persoalan ekonomi), maka gambaran umum pengamen yang ada saat ini tidak memiliki kemampuan bermain musik yang memadai, dan bahkan sering terlihat juga bagaimana banyak pengamen khususnya pengamen yang masih anak-anak hanya menggunakan peralatan seadanya; seperti icik-icik yang terbuat dari tutup botol.

Dari sisi usia pengamen dibedakan dari pengamen anak-anak dan pengamen dewasa. Pengamen anak-anak lebih banyak bekerja dengan menggunakan alat icik-icik. Pengamen anak-anak dalam bernyanyi sering tidak mengindahkan keharmonisan bunyi antara lagu dan bunyi alat musik, bahkan tidak sedikit diantara mereka dalam mengamen tidak menyanyi hanya cukup membunyikan icik-icik saja. Pengamen dewasa dalam menjalankan profesinya lebih banyak menggunakan alat musik gitar. Dalam mengamen, mereka biasanya dalam kelompok beranggotakan 2-3 orang.

Kalau melihat pengamen berdasarkan pengelompokan atau berdasarkan basis komunitasnya, secara umum dapat di golongkan ke dalam 3 (tiga) kelompok besar. Pertama, Kelompok Pengamen Gerakan. Kelompok pengamen ini adalah kelompok yang aktif menyuarakan bentuk-bentuk ketidakadilan atau penindasan yang terjadi, seperti persoalan penggusuran, penggarukan sampai dengan persoalan politik nasional. Aksi-aksi mereka tidak sebatas protes melalui media seni semata akan tetapi kelompok ini juga aktif melakukan aksi massa dengan turun ke jalan, membuat aliansi dengan kekuatan gerakan, pengorganisasian massa dan kerja-kerja gerakan lainnya. Pada sisi issue tidak lagi berkisar persoalan pengamen, akan tetapi lebih luas lagi sampai dengan penyikapan politik nasional, dan fokus issuenya lebih struktural. Kedua, Kelompok Pengamen Jalanan atau sering disingkat (KPJ). Pengamen KPJ ini memiliki sejarah yang lebih lama dibandingkan dengan sejarah kemunculan kelompok pertama dan punya sejarah gerakan sendiri, sekalipun aktualisasi media perjuangan mereka masih melalui media seni dan budaya. Kemunculan pengamen KPJ ini juga tidak lepas dari dinamika romantisme Malioboro yang dulu menjadi istana bagi para seniman di

Yogyakarta. Pengamen KPJ ini banyak terdiri dari seniman muda yang sebenarnya tidak begitu suka disebut sebagai pengamen, karena aktifitas mengamen mereka sebenarnya lebih banyak sebagai sambilan saja, mengamen dipahami sebagai alternatif dalam mengaktualisasi ekspresi seni mereka. Sehingga mereka lebih suka dinamakan seniman jalanan, dan mereka banyak dari mahasiswa jurusan seni. Ketiga, Kelompok pengamen rumah singgah. Pengamen rumah singgah ini adalah kelompok pengamen yang berasal dari rumah singgah-rumah singgah yang banyak terdapat di Yogyakarta yang berada di bawah koordinasi dinas sosial. Mereka hanya menjadikan rumah singgah sebagai tempat tidur ketika mereka selesai mengamen.

Pengelompokan pengamen kedalam tiga kelompok besar tadi bukanlah sepenuhnya menggambarkan keberadaan keseluruhan dari pengamen yang ada di Yogyakarta. Karena ada banyak pengamen yang berada di luar ketiga kelompok di atas, baik secara individu ataupun kelompok. Pengelompokan ke dalam tiga besar di atas untuk memberikan gambaran awal terhadap basis komunitas besar dari pengamen yang ada di Yogyakarta. Selain itu pengelompokan pengamen dimaksudkan sebagai upaya memberikan kejelasan terhadap pilihan fokus studi terhadap kelompok pengamen gerakan.

## **E. Penyebaran dan Wilayah Operasional Pengamen di DIY**

Bila melihat peta penyebaran pengamen di DIY dari kepadatan pengemudi di jalan jelas terlihat perempatan yang padat oleh pengemudi mobil berada di bagian utara kota Yogyakarta. Pemberhentian bis kota cukup merata di bagian utara, jadi mengapa pengamen lebih banyak di bagian utara kota Yogyakarta karena perempatan yang ramai sepanjang

hari oleh pengendara mobil terletak di utara kota Yogyakarta. Sedangkan untuk bagian selatan kota Yogyakarta lebih banyak didominasi oleh pengamen bis antar kota.

Tidak dapat disangkal bahwa hampir di semua persimpangan (terutama perempatan) yang ada lampu pengatur lalu lintas-nya (*traffic-light* atau *bang-jo*). Di wilayah Perkotaan saat ini telah menjadi wilayah bagi anak jalanan. Kalau kita menyempatkan diri untuk menelusuri kota Yogyakarta; mulai dari perempatan Condong Catur, terus ke Selatan melintasi jalan Gejayan, lewat Mrican, lalu dari perempatan Demangan belok ke Barat menelusuri jalan Urip Soemoharjo, perempatan Gramedia, jalan Sudirman, terus ke perempatan Tugu, belok ke Mangkubumi, melintasi bang-jo DPRD di Malioboro, sampai perempatan Kantor Pos, belok ke Senopati, lalu perempatan Gondomanan, atau kalau mau diteruskan sampai dengan perempatan SGM maka kita dengan mudah menemukan pengamen. Keberadaan pengamen telah menjadi bagian dari setiap perempatan, pemberhentian bis atau persimpangan jalan yang padat oleh pengendara bermotor.

Wilayah operasional pengamen yang kalau siang hari umumnya mengikuti arus kepadatan lalu lintas dan tempat-tempat pemberhentian bis, akan tetapi kalau malam hari peta operasionalisasi berubah mengikuti alur konsentrasi Warung Lesehan dan Warung Tenda yang biasanya buka dari jam 18.00 dan tutup pukul 01.00 WIB, seperti di Jln. Malioboro, Jln. Mangkubumi, Jln. Jendral Sudirman, Jln. Solo, seputar jalan Kaliurang, Bundaran Kampus UGM, Alun-alun Utara dan Selatan Kraton Yogyakarta.

## **F. Sejarah Gerakan Pengamen di DIY**

Kritik sosial melalui media seni khususnya di DIY, memiliki sejarah yang cukup tua. Misalnya sejarah keberadaan

Dagelan Mataram yang melakukan kritik sosial terhadap keberadaan Sultan sebagai raja sejak awal diakui sebagai bagian dari aktivitas seni yang dipelihara oleh Kraton dan diberikan ruang untuk melakukan kritik melalui media kesenian. Artinya seni sebagai media penyampai kritik sosial telah diakui sebagai alat yang efektif dalam menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat.

Gerakan pengamen tidak bisa dilepaskan dari aktifitas berkesenian dan kontradiksi sosial pengamen dimulai dari aktifitas mereka dalam berkesenian. Tinggal persoalannya adalah bagaimana gerakan pengamen menempatkan media kesenian sebagai alat perjuangan sangat ditentukan oleh perkembangan dari dinamika sosial politik yang sedang berlangsung. Artinya ketika represifitas kekuasaan terjadi, maka pilihan media seni menjadi pilihan utama dalam melakukan perjuangan. Tetapi menjadi berbeda ketika ruang kebebasan terbuka, maka pilihan media seni bisa jadi menjadi pilihan kedua, setelah media perjuangan dengan aksi massa atau media perjuangan lainnya.

Perlu diketengahkan bagaimana persoalan perdebatan ideologis tentang posisi seni memiliki sejarah panjang. Misalnya pada masa awal kemerdekaan perdebatan antara kubu Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang berhaluan kiri dengan Manikebu (Manifes Kebudayaan) yang sampai dengan hari ini belum selesai melakukan perdebatan tentang apakah seni dipahami sebagai seni semata atau sebaliknya seni sebagai alat. Hal ini juga sekecil apapun masih mewarnai pilihan-pilihan perjuangan diantara kekuatan gerakan pengamen di DIY dalam memaknai seni, khususnya seni musik, sekalipun warna ideologisnya tidak begitu nampak mengemuka.

Kelompok LEKRA memiliki gagasan dan pandangan

dibidang kesenian, dengan pendekatan “realisme kritis” atau “romantisme revolusioner”. Mereka umumnya anti nilai-nilai kebudayaan yang non-Indonesia. Mereka mengutuk “chaufinisme, fasisme dan kosmopolitisme”. LEKRA mengecam keras prinsip “seni untuk seni”. Kelompok MANIKEBU menolak politik kebudayaan nasional yang sempit yang dicanangkan Soekarno dengan dukungan kuat dari LEKRA. Mereka menghendaki keterbukaan Indonesia pada dunia barat, terutama pada Amerika Serikat. Polemik antara kubu LEKRA dengan MANIKEBU berakhir ketika Soekarno yang didukung PKI melakukan pelarangan dan pembekuan kelompok MANIKEBU. Tetapi perdebatan wacana antara dua kekuatan kelompok kesenian di atas tidak berakhir sampai dengan Orde Baru berkuasa, sekalipun dalam lingkup yang terbatas.

Persoalan represifitas kekuasaan dan perdebatan tentang posisi seni di atas menjadi salah satu pisau analisis dalam melihat dinamika perkembangan gerakan pengamen di DIY. Khususnya dalam membedah perkembangan gerakan pengamen pada era Orde Baru dan pasca keruntuhannya. Ini telah memberikan perubahan dinamika dalam pengelompokan pengamen dan pola gerakan serta issue yang dikembangkan pengamen di DIY. Selain adanya perbedaan yang disebabkan situasi dinamika perubahan sosial, politik dan ekonomi; baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti issue HAM dan Demokrasi, sedikit banyak telah memberikan pengaruh terhadap *format issue* dan pola gerakan pengamen.

Harus diakui bahwa kalau melacak sejarah gerakan kaum jalanan seperti pengamen dan kaum miskin kota lainnya telah memiliki sejarah gerakan yang cukup panjang. Hasil studi yang dilakukan Jang Aisyah Muttalib<sup>61</sup> di



Yogyakarta tentang gejala gelandangan pada masa revolusi yang telah ikut memberikan andil bagi perjuangan merebut kemerdekaan. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana pengaruh gelandangan hampir menjadi trend bagi kekuatan-kekuatan laskar gerilya dengan menamakan diri Laskar Kere, Laskar Pengemis, atau Laskar Grayak. Hal ini menunjukkan bahwa potensi perlawanan dari kaum miskin kota telah memiliki sejarah dalam proses berdirinya republik ini. Ada semacam simbiosis atau dialektika pertautan antara kekuatan gelandangan dengan kekuatan rakyat lainnya dalam masa-masa revolusi yang tidak menentu. Simbiosis itu terlihat dari bagaimana komandan Laskar Kere adalah seorang guru SMP di masa damai. Maka begitu revolusi usai, para guru pun kembali ke sekolah dan kere sejati kembali ke stasiun. Nampaknya simbiosis atau dialektika sejarah pada masa revolusi berulang kalau kita mencermati dinamika sejarah Malioboro sebagai wilayah pertemuan kekuatan kampus, seniman dan kaum jalanan pada medium awal 70-an sampai dengan era 80-an.

Pertemuan antar kekuatan di jalanan Malioboro sebagai implikasi dari terjadinya proses represifitas dan depolitisasi wilayah kampus dan kampung yang dilakukan Orde Baru pasca meletusnya peristiwa MALARI 1974. Refresifitas terhadap dunia kampus telah melahirkan dua kelompok kekuatan mahasiswa, yakni kelompok yang tergabung dalam kelompok-kelompok diskusi dan kelompok yang keluar dari kampus dengan bergabung dengan kekuatan grass root, seperti LSM dan Komunitas Jalanan. Proses represifitas dan depolitisasi wilayah kampung juga terjadi dan kemudian melahirkan komunitas seniman jalanan, yang dulunya berasal dari komunitas sanggar seni yang ada kampung. Keberadaan sanggar-sanggar atau kelompok kesenian kampung memiliki sejarah yang cukup dominan.

Pengorganisasian kekuatan seniman telah dilakukan jauh sebelumnya oleh kekuatan-kekuatan partai politik pada era 60-an, seperti keberadaan LESBUMI yang merupakan kekuatan kelompok seni bentukan partai NU, kelompok seni yang tergabung dalam LKNI merupakan bentukan PNI, serta kelompok kesenian yang tergabung dalam organisasi LEKRA yang merupakan bentukan PKI.

Proses pengorganisasian kekuatan kelompok kesenian oleh partai politik sampai dengan basis kampung. Akan tetapi eksistensi kelompok-kelompok kesenian kampung mengalami hambatan dalam mengapresiasi kesenian, ketika Orde Baru telah juga melakukan kontrol terhadap kelompok-kelompok kesenian yang ada di kampung melalui politik perijinan untuk acara pementasan seni dan kontrol langsung oleh aparat militer sampai dengan setingkat Babinsa, telah menjadikan pergeseran kekuatan kelompok kesenian tidak lagi menjadikan kampung sebagai basis dalam berkesenian. Jalanan kemudian menjadi pilihan wilayah basis dalam berkesenian.

Pergeseran wilayah berkesenian dari kampung ke jalanan inilah yang melahirkan seniman jalanan. Salah satu bentuk ekspresinya adalah mengamen. Pilihan berkesenian di jalanan dipandang relatif memberikan ruang kebebasan karena kontrol kekuasaan yang dilakukan penguasa tidak sekuat dan seefektif ketika berkesenian di kampung. Hal ini bisa terjadi karena; Pertama, jalanan tidak begitu terikat dengan wilayah administratif, dimana kebijakan politik perijinan dan kontrol langsung dari aparaturnegara tidak seefektif dibanding dengan kampung yang secara jelas memiliki struktur birokrasi. Kedua, walaupun para seniman jalanan melakukan kritik sosial terhadap kekuasaan, itu tidak ditangkap sepenuhnya menjadi kegiatan politik,

karena aktifitas berkesenian juga kemudian menjadi kegiatan ekonomi, seperti halnya menjadi pengamen. Ketiga, jalanan memberikan alternatif yang lebih mudah dalam melakukan sosialisasi dan kampanye, tanpa harus disibukkan untuk melakukan penggalangan massa, karena jalanan telah menjadi bagian dari ruang interaksi sosial.

Proses represifitas dan depolitisasi wilayah kampus dan kampung di atas telah menjadikan jalanan sebagai pilihan wilayah alternatif dalam mengekspresikan perlawanan terhadap hegemoni yang dilakukan Orde Baru. Jalan Malioboro menjadi salah satu contoh dimana pertemuan antar kekuatan perlawanan kampus dan kampung berlangsung, yang kemudian melahirkan dinamikanya tersendiri dalam sejarah pembentukan karya-karya seni yang sarat dengan kritik sosial; seperti keberadaan Rendra dengan bengkel teaternya, Antok Baret, Sawung Jabo, Jaduk Ferdiantoro, Iwan Fals dengan lirik-lirik lagu yang sarat dengan kritik sosial, begitupun dengan keberadaan Umbu Landu dengan kelompok PSK, sampai dengan generasi Emha Ainun Najib dengan karya sastranya, telah memberikan warna perlawanan dalam karya-karya seni mereka.

Dinamika Malioboro di atas perlu dikemukakan karena bagaimanapun ketika meruntut sejarah keterlibatan kelompok pengamen dalam gerakan perlawanan di DIY, maka tidak lepas dari sejarah dinamika pertemuan antar kampus, kampung, dan kaum jalanan lainnya di Malioboro. Mereka yang kemudian melahirkan salah satu organisasi yang tergabung dalam Kelompok pemusik Jalanan (KPJ). Sampai saat ini sudah memiliki jaringan nasional, yang untuk Yogyakarta organnya bernama Kelompok Pemusik Jalanan Malioboro (KPJM). Jadi kalau meruntut dari sejarah kelahiran KPJ, maka akan terlihat kemunculannya sebagai respon dari

hegemoni Orde Baru yang tidak memberikan ruang ekspresi kekuatan rakyat untuk melakukan kritik, sehingga jalanan menjadi media alternatif untuk terus melakukan kritik sosial. Akan tetapi harus diakui bahwa KPJ lahir sebagai dinamika kultural yang terbentuk dari interaksi intensif personal yang mencari ruang aktualisasi kebebasan ditengah kuatnya kontrol kekuasaan yang dilakukan Orde Baru.

Depolitisasi kampus telah mendesak aktivis kampus untuk mencari ruang kebebasan akspreasi untuk terus kritis terhadap berjalannya kekuasaan. Upaya pendidikan politik penyadaran massa rakyat menempatkan stage jalanan sebagai pilihan. Meminjam pola pendidikan pembebasan Paulo Fraire, telah menghantarkan aktivis kampus untuk secara langsung terlibat dalam diskusi di jalanan (baca: grass root), yang dalam konteks Yogyakarta, Malioboro menjadi wilayah pertemuan dari kekuatan-kekuatan yang ada. Begitupun dengan kekuatan kampung, proses depolitisasi dan kontrol kekuasaan telah menjadikan khususnya kelompok-kelompok kesenian yang muncul sejak Orde Lama, hasil pengorganisasian partai politik sebagaimana keberadaan LESBUMI yang merupakan *underbow* Partai NU, LEKRA *underbow* Partai Komunis Indonesia (PKI), dan LKNI merupakan *underbow* Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Kesemua kekuatan *underbow* kelompok kesenian di atas telah memiliki basis sampai dengan di tingkat kampung.

Sekalipun depolitisasi terhadap dua wilayah antara kampus dan kampung ini memiliki dampak yang berbeda. Kemudian mereka dipertemukan di jalanan, polarisasi kekuatan kampus kedalam kekuatan partai politik pada massa Orde Lama juga terjadi. Lahirnya beberapa organisasi mahasiswa yang merupakan *underbow* atau afiliasi partai politik seperti keberadaan Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) berafiliasi ke PKI, Himpunan Mahasiswa

Islam Indonesia (HMI) berafiliasi ke Masyumi, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) berafiliasi ke PNI dan lain-lain, memiliki polarisasi yang relatif sama terhadap wilayah kampung, akan tetapi dalam persoalan kesenian sampai dengan lahirnya KPJ dinamikanya berbeda.

Kesenian dalam konteks kampus hanya diperlakukan sebagai salah satu sarana ekspresi semata, yang sangat berbeda dengan keberadaan dinamika kelompok kesenian kampung. Sekalipun polemik antara kubu LEKRA dan MANIKEBU masing-masing berupaya menanamkan pengaruhnya pada dunia kampus lebih kepada persoalan polemik antara mendukung dan anti Soekarno. Bukan semata-mata perdebatan tentang persoalan seni dan hijrahnya beberapa aktivis kampus ke jalanan ketika berhadapan dengan represifitas Orde Baru, lebih dipahami sebatas personalitas yang non kelembagaan. Terlebih lagi setting kekuasaan yang hegemonik tidak memungkinkan kekuatan kampus secara vulgar kelembagaan untuk turun ke jalan, karena harus berhadapan dengan stigmatisasi negatif (seperti Organisasi tanpa bentuk sampai dengan tuduhan komunis) dan kontrol yang ketat dari aparat negara.

Polarisasi wilayah kampus telah memunculkan dua bentuk pengelompokan mahasiswa. Pertama, kelompok mahasiswa yang aktif membentuk kelompok studi. Kedua, kelompok mahasiswa yang merasa dunia kampus tidak lagi memberikan kebebasan aktualisasi mahasiswa untuk selalu kritis terhadap penguasa. Karenanya mereka harus keluar dari lingkungan kampus yang mengungkung idealisme dengan turun ke grass root. Salah satu bentuknya adalah keterlibatan aktifis mahasiswa pada dinamika jalanan.

Proses depolitisasi dan kontrol kekuasaan pada dua wilayah yakni Kampus dan Kampung telah mempertemukan dua kekuatan itu di jalanan. Hegemoni yang dilakukan Orde

Baru sebagaimana di kemukakan oleh Gramsci ternyata memang tidak bisa sepenuhnya membungkam kesadaran perlawanan. Ketika bentuk-bentuk organisasi mudah teridentifikasi maka pilihan aktualisasi adalah munculnya kelompok-kelompok kecil yang secara tidak sengaja terbentuk. Mediana bisa berupa kesamaan hobi, profesi dan lain-lain sebagaimana. Dinamika Malioboro pada tahun 70 sampai dengan 80, dimana orang banyak berkumpul di warung-warung lesehan, berkumpul dalam kelompok-kelompok kesenian, yang secara intensif berdiskusi dari mulai kesenian sampai persoalan politik. Proses pematangan wacana dan kristalisasi perlawanan terjadi secara alamiah. Dinamika Malioboro seperti di ataslah yang kemudian melahirkan KPJ. Dari setting kelahiran KPJ ini kita bisa lebih jauh melihat bagaimana pola-pola perlawanan dan kritik sosial yang dilakukan KPJ yang lebih menekankan pada ikatan-ikatan solidaritas kelompok, kritik yang dilakukan bergerak sebatas media seni dan gerakannya lebih cultural dalam menyikapi persoalan di sekelilingnya.

Memasuki medium tahun 90-an awal, kekuatan KPJ yang berbasis di jalan Malioboro mulai melemah seiring dengan semakin tergesernya aktivitas para seniman oleh perkembangan pembangunan kompleks pertokoan jalan Malioboro. Malioboro bukan lagi surga bagi para seniman dalam melahirkan karyanya, karena Malioboro telah dipenuhi gedung-gedung pertokoan, terlebih lagi setelah dibangun Malioboro Mall. Puncak dari terpinggirnya seniman Malioboro adalah ketika Seni Sono yang dulunya kerap digunakan sebagai tempat menggelar pementasan karya tergusur oleh pemugaran gedung Agung yang dilakukan oleh Pemerintah. Polemik antara seniman dengan Pemerintah terhadap keberadaan Seni Sono sekalipun berlangsung panas tetap tidak mampu membendung keinginan Pemerintah

dalam melakukan penggusuran terhadap gedung Seni Sono dan ini menjadi akhir dari dinamika seniman Malioboro yang kemudian terganti oleh aktivitas ekonomi dengan berdirinya gedung-gedung pertokoan.

Pudarnya Malioboro sebagai pusat berkumpulnya para seniman, kalangan kampus dan kaum jalanan lainnya telah mempolarisasi kelompok-kelompok yang ada untuk mencari ruang aktualisasinya. Ada yang kembali ke kampus, sebagian ke kampung dan juga ada yang tetap tinggal di jalanan karena tuntutan ekonomi. Untuk kalangan kampus, menghadapi kontrol dan represifitas penguasa yang semakin keras telah memunculkan kesadaran baru dalam memformat strategi gerakan. Pasca peristiwa MALARI 1974 sampai dengan akhir 80-an, mahasiswa yang memilih keluar kampus dan bergabung dengan kekuatan grass root total meninggalkan basis kampus. Tetapi masuk ke awal 90-an muncul kesadaran untuk tetap menjadikan kampus sebagai basis massa dengan tetap tidak terlibat dalam organisasi intra kampus, akan tetapi secara keorganisasian mengambil wilayah kampung sebagai tempat konsolidasi antar kekuatan gerakan.

Catatan penting dari dinamika Gerakan mahasiswa awal 90-an yang memiliki kesadaran baru bahwa mereka bagaimanapun berasal dari sektor mahasiswa. Karenanya bagaimanapun upaya pembasisan di tingkat kampus tetap harus dilakukan dengan tetap melakukan perluasan front aliansi dengan kekuatan di luar kampus, menandai lahirnya organisasi ekstra kampus; dikenal juga sebagai gerakan mahasiswa semilegal, yang memiliki peran sangat menentukan dalam saat-saat keruntuhan Orde Baru Mei 1998, seperti Serikat Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (SMKR), P3Y, SMID, KAMMI, dan beberapa organisasi semilegal lainnya, yang banyak muncul pada awal tahun 90-an sampai dengan tahun 1998.

Upaya depolitisasi kampus yang dilakukan Orde Baru telah dijawab dengan kemunculan organisasi-organisasi ekstra kampus di era 90-an menjadi fenomena tersendiri dari gerakan mahasiswa. Kemunculan banyak komite-komite gerakan mahasiswa di Yogyakarta, telah menandai hancurnya ruang hegemonisasi Orde Baru dengan sistem organisasi formalnya, seperti halnya NKK/BKK dan konsep Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT). Terbukti kemudian bahwa yang banyak memainkan aksi-aksi massa di lingkup Yogyakarta dalam menumbangkan Orde Baru adalah gabungan dari komite-komite organisasi ekstra kampus.

Eksperimentasi politik Orde Baru untuk memisahkan mahasiswa dengan rakyat secara eksklusif terbukti gagal memperoleh pengakuan sosiologis dari rakyat itu sendiri. Pada titik itulah kelemahan gerakan mahasiswa itu terasa, dimana dengan model-model penguatan di dalam dirinya tidak jarang hanya mampu memproduksi gerakan-gerakan sporadis, karena mudah diberangus dan dipatahkan. Dilandasi oleh asumsi dan keyakinan bahwa gerakan mustahil dapat mewujudkan perubahan politik tanpa melibatkan dukungan rakyat, sebagaimana sejarah gerakan rakyat di Filipina, Korsel dan negara-negara lainnya. Maka untuk mampu mendorong perubahan politik perlu kerjasama dengan massa rakyat yang menjadi “pemukulnya”. Dengan demikian, gerakan mahasiswa tidak lagi memitoskan dirinya sebagai satu-satunya oposisi efektif dan mampu melakukan perubahan dengan sendirinya, namun justru koalisi dengan kekuatan rakyat menjadi pilihan utama yang harus dilakukan. Sejarah memang membuktikan bahwa bukan hanya kelompok mahasiswa saja yang memiliki andil dalam proses meruntuhkan kekuasaan Orde Baru, namun yang menjadi titik kemenangan adalah gerakan mahasiswa



telah mampu menjadi katalisator yang penting dalam aksi menumbangkan rezim Orde Baru.

Penjara besar Orde Baru yang memenjarakan kesadaran mahasiswa, ternyata tidak mampu mengalienasi mereka, namun yang terjadi hanyalah meminjam istilah Ignas Kleden mengkarantina mahasiswa. Jika pada fase sebelumnya gerakan mahasiswa berlangsung dengan tanpa perlawanan yang memadai, geliat diakhir 80-an dan awal 90-an mulai terasa bagaimana model gerakan yang populis, dengan mengangkat issue-issue dilintas struktural marginal mulai dilakukan. Merujuk pada studi yang dilakukan oleh Edward Aspinal pada tahun 1993 menunjukkan bahwa tidak kurang dari 155 aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada kurun waktu 1987 -1990 di Yogyakarta, Bandung dan Jakarta mengangkat issue-issue penggusuran tanah dan kekerasan Meliter. Beberapa contoh kasus seperti aksi protes yang dilakukan mahasiswa Bandung terhadap pengusuran tanah Badega dan untuk Jawa Tengah dan DIY mahasiswa melakukan pembelaan terhadap masyarakat korban pembangunan waduk Kedungombo.

Kesadaran baru gerakan mahasiswa untuk melakukan gerakan populis dengan mengangkat issue-issue yang real dihadapi oleh rakyat, memungkinkan mahasiswa untuk secara langsung melakukan aliansi dengan kekuatan rakyat. Dalam konteks ini dapat difahami pertemuan antara gerakan mahasiswa dengan kekuatan kaum miskin kota, khususnya pengamen (baca: gerakan pengamen generasi kedua).

Upaya perluasan front dengan melakukan upaya pengorganisasian, dan aliansi bersama dengan kekuatan sektoral lainnya, telah menemukan gerakan mahasiswa dengan kekuatan jalanan, khususnya dalam hal ini pengamen. Gerakan mahasiswa memandang gerakan pengamen dengan

media seni musiknya, memiliki kemampuan yang efektif dalam melakukan propaganda dan kerja-kerja gerakan, sehingga pada awal 90-an sangat sering kita menemukan bentuk-bentuk aliansi dan kerja bersama sektor mahasiswa dengan gerakan pengamen seperti pentas seni musik, teater dan bentuk pementasan seni lainnya yang kesemuanya dimaksudkan sebagai upaya terus melakukan kritik dan perlawanan terhadap kekuasaan Orde Baru. Bentuk kerjasama tidak sebatas hanya dalam event kesenian akan tetapi juga pelatihan keorganisasian mahasiswa yang tidak jarang juga diikuti oleh pengamen, sehingga pada perkembangan berikutnya telah melahirkan tokoh-tokoh pengamen yang secara wacana dan kemampuan keorganisasian sama baiknya dengan gerakan mahasiswa. Terlihat pada tokoh generasi awal SPI ataupun TAABAH yang memiliki kedekatan dengan gerakan mahasiswa dari mulai tahun 90-an awal sampai dengan tumbanganya Orde Baru Mei 1998.

Pertemuan antara gerakan mahasiswa dengan kekuatan gerakan pengamen, secara sederhana harus diakui sebagai keberhasilan gerakan mahasiswa dalam melakukan pengorganisasian kekuatan kaum miskin kota, khususnya pengamen. Sekalipun kemudian antar vaksi gerakan mahasiswa telah mengelompokkan gerakan pengamen generasi kedua kedalam pengelompokan kepentingan antar vaksi gerakan mahasiswa. Di mana SPI lebih memiliki kedekatan dengan SMID yang kemudian berubah menjadi PRD, dan kelompok pengamen lainnya kedalam vaksi atau komite gerakan mahasiswa lainnya seperti kemunculan SMKR yang memiliki kedekatan dengan organ gerakan pengamen di luar SPI.

Hubungan yang dinamis antar kekuatan gerakan mahasiswa dengan gerakan pengamen ini telah banyak

memberikan perubahan wacana dan pola gerakan bagi organisasi pengamen, yang hampir-hampir berbeda sama sekali dengan generasi KPJ, sehingga dapat dikatakan generasi terakhir ini menjadi generasi kedua setelah generasi KPJ.

Perbedaan itu terlihat dari kalau generasi pertama (baca: KPJ) lebih menekankan pada ikatan solidaritas kelompok pengamen, media perjuangan masih tetap berada pada wilayah kesenian dan format issue masih sangat cultural. Artinya issue yang disuarakan itu masih seputar persoalan keseharian yang dihadapi, akan tetapi generasi kedua dimana SPI dan TAABAH ada, tidak lagi menggunakan metode perjuangan sebatas media seni, akan tetapi sudah sampai pada metode pengorganisiran, pendidikan politik, aksi massa, sampai dengan aliansi dengan kekuatan partai politik. Format issue yang dimunculkan sangat struktural dengan menyasar langsung kepada penguasa atau pemegang kebijakan negara.

Hal yang juga membedakan antara generasi pertama dengan generasi kedua adalah pada sisi wacana dominan yang sedang berlangsung, seperti wacana HAM dan demokrasi, yang dulunya tidak begitu dikenal oleh generasi pertama akan tetapi oleh generasi kedua telah menjadi menu keseharian, dan pengaruh wacana dominan ini telah ikut mewarnai issue dan tuntutan yang di usung oleh gerakan pengamen, seperti hak untuk diakui sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya, derivasi dari tuntutan ini adalah adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Jaminan kesehatan dan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan atau jaminan dalam menjalankan profesi sebagai pengamen, yang kesemuaan

issue dan tuntutan ini tidak muncul pada generasi awal gerakan pengamen.

Perbedaan pada pilihan issue dan pola gerakan antara generasi pertama dengan generasi kedua ini telah memunculkan stigma dan stroetipe yang kurang harmonis antara kekuatan pengamen atau dalam representasi basis komunitas antara pengamen KPJ dengan SPI atau TAABAH. Bagaimana pengamen KPJ yang banyak terdapat di jalan Malioboro, mengembangkan stigma bahwa SPI dan TAABAH itu kelompok yang tidak murni lagi karena sudah berpolitik, dan untuk SPI itu underbow Partai Rakyat Demokratik (PRD), sedangkan kelompok generasi kedua ini membangun stigma bahwa pengamen KPJ sebagai kelompok apolitis yang tidak peduli terhadap persoalan-persoalan yang menimpa pengamen dan kaum jalanan lainnya.

Stigmatisasi antar organisasi pengamen ini terhadap pemaknaan pilihan gerakan ini sebenarnya kalau melacak sejarah, sekalipun tidak persis sama sebagaimana perdebatan antara dua kubu yakni LEKRA dan MANIKEBU terhadap makna seni sedikit banyak memiliki pengaruh atas identifikasi masing-masing gerakan pengamen, hal ini di munculkan karena bagaimanapun titik kontradiksi kekuatan pengamen dengan persoalan yang dihadapinya dimulai dengan seni, yakni seni musik, persoalan menjadi lain ketika satu kelompok pengamen lebih meli hat seni sebagai seni, sedangkan kelompok pengamen lainnya memahami seni sebagai alat semata, sebagaimana sejarah perdebatan antara kubu LEKRA dan MANIKEBU.

Selain KPJ sebagai generasi pertama, serta SPI dan TAABAH sebagai generasi kedua, ada lagi kelompok ketiga yakni kelompok pengamen yang tergabung dalam rumah

singhah. Tetapi dalam pembahasan dinamika gerakan pengamen, keberadaan Pengamen Rumah Singgah tidak banyak diungkapkan karena keberadaan pengamen rumah singgah tidak memiliki tradisi sejarah gerakan. Pengamen Rumah Singgah hanya merupakan komunitas yang terbentuk dari ikatan pragmatis akan kebutuhan tempat tinggal. Perlu dicatat adalah organisasi semacam SPI dan TAABAH sangat anti terhadap komunitas rumah singgah, karena mereka menganggap bahwa komunitas rumah singgah adalah komunitas bentukan Pemerintah yang hanya dijadikan sebagai alat kepentingan penguasa.

## **G. Dua Organisasi Pengamen Gerakan; SPI dan TAABAH**

### **1. Keberadaan Organisasi SPI**

Latar belakang kemunculan gerakan Pengamen di Jogjakarta tidak lepas dari dinamika gerakan Mahasiswa. Setting histories yang bisa ditarik adalah ketika represifitas dan hegemonisasi kekuasaan Orde Baru masuk kampus pada medium pertengahan tahun 70-an sampai dengan awal 90-an, berimplikasi pada terdesaknya ruang ekspresi mahasiswa kepada wilayah organisasi formal bentukan Orde Baru. Hal ini telah memunculkan ketidakpuasan mahasiswa terhadap dinamika kehidupan kampus.

Bentuk-bentuk tekanan dan pengekanan yang dilakukan Orde Baru terhadap kehidupan mahasiswa telah memunculkan kesadaran kritis beberapa aktivis mahasiswa untuk keluar dari dinamika internal kampus dengan melakukan aktivitas kerja di sektor buruh, tani dan terlibat dengan kekuatan NGO's.

Berbagai ekspresi perlawanan yang dikembangkan

ditengah semakin represifnya Orde baru adalah salah satunya melalui jalur kesenian. Persentuhan antara mahasiswa yang concern melakukan perjuangan melalui media kesenian dan kekuatan pengamen mulai bersinggungan dalam komunitas-komunitas sanggar di tengah kampung yang dibentuk beberapa aktivis mahasiswa. Sejarah kemunculan organisasi Serikat Pengamen Indonesia (SPI) sebagai organisasi pengamen tertua yang masih eksis di Jogjakarta, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan sanggar teater Kanigoro yang didirikan pada awal tahun 1994, dimana berkumpul beberapa aktivis mahasiswa yang concern menyuarakan kritik-kritik sosial melalui dunia seni teater.

SPI didirikan pada tanggal 30 September 1994. Pada awal kemunculannya SPI merupakan kelompok pengiring musik teater Kanigoro, sekalipun dalam proses berikutnya Teater Kanigoro bubar SPI tetap mampu eksis sebagai organisasi pengamen. Dalam perkembangannya SPI diposisikan sebagai sentral organisasi pengamen yang didasarkan atas kebutuhan organisasi bagi upaya kaderisasi pengamen yang mampu menjadi pemimpin guna mengorganisir pengamen di tingkat yang paling basis. Karena itu SPI juga dipahami sebagai Sekolah dan sekaligus sebagai media advokasi bagi kaum miskin kota. Asumsi lain yang juga menjadi latar belakang kebutuhan bagi keberadaan SPI adalah:

- Pengamen tidak memiliki tradisi berorganisasi yang baik dan sistematis, sementara paguyuban-paguyuban pengamen yang ada tidak dilandasi konsep pemberdayaan dan perjuangan pengamen, tetapi lebih dilandasi kebutuhan emosional untuk mencari patron-patron jalaran dengan tujuan pengaruh wilayah dan eksistensi.
- Persoalan pengamen bukanlah persoalan yang sederhana tetapi persoalan yang begitu kompleks karena menyangkut

sumberdaya pengamen dan infrastruktur yang menjadi mendukungnya. Dalam artian yang menyangkut dimensi struktural dan kultural.

Perkembangan berikutnya SPI terus diupayakan menjadi organ nasional. Hal ini dilakukan mengingat kebutuhan bagi adanya jaringan organisasi pengamen nasional yang mampu mengkoordinasikan organisasi pengamen yang ada wilayah lainnya. Selain itu organ nasional SPI diharapkan sebagai upaya membangun sinergi kekuatan gerakan pengamen. Upaya perumusan SPI sebagai organ nasional dimulai pada tahun 1997. Konsolidasi gerakan pengamen tahap pertama dilakukan di Yogyakarta dan menghasilkan upaya pembentukan struktur pusat SPI dengan dibentuknya struktur kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekjen dan divisi sektor. Bersamaan dengan semakin memanasnya kondisi sosial politik Nasional dipandang perlu untuk juga terus melakukan revisi terhadap hasil dari konsolidasi SPI tahap pertama, sehingga tepatnya pada pertengahan tahun 1998 dilakukan perubahan struktur keorganisasian yang lebih tertata dengan format struktur baru yakni, Ketua Umum, Ketua, Sekjen, Departemen Pengorganisasian, Departemen Dana dan Usaha, dan Departemen Advokasi dan Litigasi.

Rekomendasi dari pertemuan SPI tahap kedua dipandang perlu untuk melakukan penguatan bagi jaringan SPI yang ada di daerah. Tahapan berikutnya dilakukan upaya deklarasi SPI sebagai organisasi nasional pada kongres pertama SPI pada tanggal 8-10 Desember 1999. Peserta yang hadir terdiri beberapa wilayah, seperti: Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Magelang, Purwokerto, Bandung dan Jakarta.

a. Kerja Jaringan

Sebagai organisasi gerakan, SPI menyadari benar arti penting untuk terus membangun kekuatan jaringan, khususnya dengan kekuatan gerakan pengamen dan

kaum miskin kota, baik yang berada di dalam ataupun luar Jawa. Satu keberhasilan SPI dalam membangun kekuatan jaringan adalah ketika mampu membentuk payung jaringan di bawah bendera SPI dan secara berkala setiap tahunnya menggelar kongres untuk merumuskan agenda kerja bersama, guna merespon persoalan-persoalan yang muncul, baik pada level nasional maupun wilayah.

Sampai dengan tahun 2004, SPI sudah memiliki 10 jaringan untuk wilayah Jawa, 2 Wilayah luar Jawa dan 4 wilayah yang baru mau terbentuk. Jaringan untuk wilayah Jawa yang sudah tergabung dalam payung jaringan SPI, yakni: Pergerakan Pengamen Semarang (PPS), Komite Pengamen Indonesia (KOMPE) Solo, Serikat Pengamen Surabaya (SPS), Serikat Seniman Indonesia (SSI) Magelang, Kelompok Pengamen Jalanan Purwokerto (KPJP), Organisasi Pengamen Bandung (OPB), Himpunan Pengamen Indonesia (HPI) Jakarta, Serikat Pengamen Indonesia (SPI) Yogyakarta, Pengamen Kriyan, Pengamen Mojokerto. Sedangkan untuk 2 Jaringan luar Jawa terdiri dari wilayah Lampung dan Makasar. Untuk Jaringan yang baru mau terbentuk yakni wilayah Jambi, Riau, Bali dan Makasar.

b. Divisi Kerja Organisasi dan Keanggotaan

Untuk mendukung keberhasilan kerja-kerja organisasinya, Serikat Pengamen (SPI) Yogyakarta memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Sekjen dan Departemen-departemen. Departemen yang ada yakni departemen Pendidikan dan Penerbitan, Departemen Dana dan Usaha, Departemen Basis dan Departemen Seni dan Budaya. Selain itu SPI juga membentuk dua sanggar, yakni sanggar musik dan sanggar kelompok belajar.



Sebagai organisasi gerakan SPI memiliki 3 (tiga) level jenis keanggotaan, yakni:

- Anggota, adalah orang yang sudah terlibat aktif dalam kerja-kerja organisasi.
- Calon Anggota, adalah basis massa secara ideologis akan tetapi kesadaran kelas belum terbentuk.
- Massa Simpatisan, yakni massa yang punya dukungan simpatik terhadap kerja-kerja SPI.

c. Lingkup Program Yang Dilakukan

Secara umum program yang digarap oleh SPI meliputi pendidikan politik (DIKPOL) bagi anggota, pengorganisasian massa, advokasi atau pendampingan masyarakat, penerbitan buletin, penggalan dana bagi organisasi dan aksi solidaritas dengan sektor rakyat.

Untuk program pendidikan politik bagi anggota, khususnya bagi anggota baru dilakukan secara reguler yang dilakukan dua bulan sekali. Media pendidikan politik juga dilakukan dengan membuat diskusi rutin mingguan. Program pengorganisasian massa dilakukan setiap hari sambil menjalani aktivitas mengamen, dan sekali-kali SPI juga mendatangi kantong-kantong massa pengamen, metode pengorganisasian massa dilakukan dengan menggunakan media sanggar seni dan sangar belajar bersama, dimana calon anggota sebelum diberikan pendidikan politik dilibatkan dulu dalam kegiatan kesenian, seperti seni musik dan teater.

Kerja Advokasi atau pendampingan masyarakat menjadi aktifitas yang secara kontinue dilakukan terlebih ketika terjadi pengusuran atau penangkapan yang dialami kaum miskin kota. Beberapa kasus yang sempat SPI

terlibat dalam upaya advokasi seperti dalam kasus penggusuran terhadap warga Tungkak yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta pada bulan Februari 2004 dan penggusuran warung angkringan Malioboro dan PKL Sri Wedani pada tanggal 1 dan 24 Mei 2004.

Untuk mendukung kegiatan organisasi dalam kaitannya dengan penyebaran informasi, SPI menerbitkan Buletin 'DEBU'. Sekalipun begitu karena alasan kesulitan pendanaan buletin Debu tidak bisa diterbitkan secara berkala. Guna memenuhi pendanaan bagi organisasi, SPI mengupayakan beberapa cara penggalian dana; seperti ngamen bersama, mengisi acara pementasan seni, pembuatan kaos Tshirt, Stiker dan Urunan rutin anggota.

Aksi solidaritas dengan sektor rakyat lainnya secara intensif SPI melibatkan diri, seperti pada aksi mendukung kawan-kawan Petani Batang yang menuntut pengembalian hak atas tanah mereka yang dirampas oleh pemerintah Orde Baru, ikut terlibat dalam aksi menuntut pencabutan larangan operasi bagi pengamen, gelandangan, dan pengemis yang dilakukan pemerintah kota Solo dan *live in* pada momentum peringatan hari buruh di Semarang pada tahun 1999 dan 2000.

## 2. Keberadaan Organisasi TAABAH

Kelahiran Tim advokasi Arus Bawah (TAABAH) dimulai dari proses penyatuan elemen gerakan pengamen Jogjakarta yang menuntut Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dihentikannya praktik penggarukan bagi kaum jalanan. Munculnya tuntutan KTP berangkat dari rasionalisasi persoalan yang sering dihadapi kaum miskin kota. Ketiadaan KTP bagi kaum miskin kota berimplikasi pada tidak

mampunya kaum miskin kota untuk mengakses fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan yang layak dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Keberadaan TAABAH lahir dari proses kesadaran beberapa elemen gerakan kaum miskin kota, terhadap persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh kaum miskin kota. Organisasi yang membidani kelahiran TAABAH adalah:

1. Komunitas Progresif (KOMPE), yaitu Media Pemuda dan Miskin kota yang konsen di perubahan masyarakat pinggiran (teritorial).
2. Komunitas Marginal (KOMA), yang konsen pada Pemberdayaan Ekonomi.
3. Seni Perlawanan oleh Rakyat (SEPOER), yaitu komunitas yang concern melakukan perjuangan melalui seni perlawanan.

TAABAH terbentuk pada tahun 2002, yang pada awalnya dimulai dengan terbentuknya komite yang bernama Gabungan Kaum Miskin Jalanan Merdeka (GKJM) yang menuntut KTP bagi kaum jalanan. Komite GKJM terbentuk pada tanggal 15 September 2001.

Tujuan umum dari pembentukan TAABAH meliputi:

1. Menyadarkan, memberdayakan, dan menguatkan masyarakat miskin kota.
2. Melakukan Perubahan kebijakan yang tidak melindungi kepentingan masyarakat arus bawah.
3. Menguatkan kapasitas organisasi menjadi gerakan rakyat.

Sasaran pemberdayaan yang dilakukan TAABAH adalah penguatan dan advokasi bagi seluruh lapisan masyarakat miskin kota, sedangkan beberapa kegiatan yang dilakukan

TAABAH meliputi:

1. Advokasi KTP Masyarakat Jalanan.
2. Advokasi Tukang parkir.
3. Advokasi Pedagang Kaki Lima atas kebijakan Pemerintah memberlakukan Perda Tahun 2002.
4. Penelitian dan Pelatihan Hukum dan HAM bagi masyarakat jalanan.

Dalam perjalanannya TAABAH terus melakukan program-program kegiatan Advokasi, Pemberdayaan dan Penguatan Masyarakat Jalanan khususnya pengamen sebagai pelaku perubahan di masyarakat luas. Persoalan penting yang mendorong kelahiran TAABAH adalah terbangunnya kesadaran masyarakat jalanan, khususnya pengamen terhadap kondisi gerakan pengamen terpecah-pecah dalam banyak organisasi dengan varian issue tuntutan yang sangat beragam. Kemunculan TAABAH menjadi akumulasi dan kristalisasi kesadaran bersama khususnya pengamen dan umumnya kaum miskin kota untuk menyatukan persoalan mendasar yang dihadapi dalam satu front. Idealisasi yang ingin dibangun adalah bagaimana antar sub sektor kaum miskin kota dapat bersatu dalam melakukan gerakan.

a. Lingkup Program Yang Dilakukan

Apa yang dilakukan TAABAH pada lingkup programnya relatif sama dengan yang dilakukan SPI, sekalipun memiliki beberapa titik tekan yang berbeda dalam hal intensitas dan metode pendekatan yang digunakan. TAABAH juga memberikan pendidikan politik bagi anggotanya. Sekalipun begitu TAABAH lebih menggunakan pendekatan informal dalam artian tidak terformat dalam satu rangkaian kegiatan pelatihan dan tidak berkala sebagaimana yang dilakukan SPI.

Untuk program pengorganisasian massa, advokasi atau

pendampingan masyarakat, penggalan dana bagi organisasi dan aksi solidaritas dengan sektor rakyat juga dilakukan oleh TAABAH sebagaimana SPI. Beberapa hal yang secara spesifik yang dilakukan TAABAH yang berbeda dengan SPI adalah dalam hal penggunaan media informasi dan sekaligus sebagai upaya rekrutmen anggota dilakukan TAABAH dengan membuat radio komunitas yang diberi nama, “Suara Arus Bawah”.

Sedangkan kegiatan penggalan dana bagi organisasi di upayakan dengan cara membuka usaha distribusi barang bekas (Lapak) dari hasil Pemulung, untuk Kesejahteraan Pemulung yang diberi nama “UD. Arus Bawah” mulai Juni 2003 sampai sekarang masih berjalan berlokasi di Jalan Timoho, belakang Kampus APMD. Usaha lainnya adalah membuat Recording Kaset dan CD (sebagai Media Propaganda juga) Kompilasi dari Musik GKJM (Orkes Arus Bawah) dengan Pengamen Cilik prapatan Condong Catur (PKA CC) yang mulai pada tanggal 7 April 2003.

Aksi solidaritas baik dengan antar sektor kaum miskin kota, maupun dengan sektor lainnya juga secara intensif TAABAH ikut terlibat, seperti Aksi mendukung kawan-kawan Petani (di Kabupaten Batang sejak tahun 1998 sampai sekarang, SPP\ Serikat Petani Pasundan Hari Tani tahun 2000, FSPI\ Federasi Serikat Petani Indonesia 1999 di Jakarta), Buruh, Pekerja Pakir 2003, Pedagang Kaki Lima (Paguyuban PKL Roso Selamat depan Gedung Agung Jogjakarta), Pekerja Rumah Tangga (PRT), Aliansi dengan Mahasiswa, dan masih banyak lagi baik yang bersifat dukungan maupun Aliansi.

- b. Divisi Kerja Organisasi TAABAH memiliki 2 (dua) divisi kerja, yakni:
- SIPOL: Menangani program kegiatan untuk mendorong terjadinya pemahaman/pentingnya

perubahan, adapun agenda kerjanya meliputi: Kampanye (Aksi), Penelitian dan Pengembangan.

- **PENDIDIKAN:** Pendidikan dan Pengorganisasian menangani program yang meliputi: Pengadaan dan pengembangan SDM Organisasi, Pengelolaan Kesekretariatan dan Rumah Organisasi, Penanganan Humas, Fasilitasi Forkom Masyarakat Arus Bawah, Melakukan Survey/Pemetaan di Masyarakat Arus Bawah.

Dalam operasional organisasinya TAABAH juga membentuk 2 (dua) organisasi yakni Seni/Musik dan Kreativitas. Pembagian wilayah kerjanya meliputi Seni/ Musik melakukan kerja kampanye (lewat lagu), pengadaan buletin, pengadaan logistik organisasi dan memobilisasi kader, sedangkan Kreativitas meliputi Pemberdayaan ekonomi anggota perkumpulan, pengadaan logistik organisasi dan memobilisasi kader.

## BAB 4

# KEMUNCULAN GERAKAN PENGAMEN

Upaya mengungkap latar belakang penyebab kemunculan gerakan pengamen akan menjadi pembahasan utama dalam uraian bab ini. Sebagaimana banyak diungkapkan dalam bab-bab terdahulu bahwa keberadaan pengamen itu lahir dari terjadinya ketimpangan pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Pola pembangunan di Indonesia yang lebih berorientasi pada kota dan mengakibatkan hajat hidup orang masyarakat desa lebih banyak disisihkan. Perhatian pembangunan kota dibandingkan dengan desa tersebut akibat awalnya kota menjadi primadona serta memiliki daya tarik (*pull factors*) yang kuat bagi masyarakat desa dibandingkan dengan daya dorong (*push factors*) masyarakat desa pergi ke kota. Gemerlap kota tanpa memperhatikan penyeimbangan pembangunan di desa menimbulkan masyarakat desa berbondong bondong pergi ke kota. Motif perpindahan penduduk dari desa ke kota tidak bisa dilepaskan dari motif ekonomi.

Tingginya penduduk di wilayah perkotaan menjadikan kota tidak memiliki kemampuan untuk menampung aliran tenaga kerja. Implikasinya adalah terjadinya tingkat pengangguran yang tinggi, proses membengkaknya proletarisasi tidak bisa dielakkan, selain itu kebijakan pengelolaan kota yang tidak berpihak kepada kelompok miskin telah semakin menempatkan posisi kaum miskin kota berada pada kondisi yang sangat berat. Karena itu persoalan kemiskinan masyarakat perkotaan dan marginalisasi kelompok miskin atas kebijakan pemerintah kota akan menjadi bagian untuk melihat latar kemunculan gerakan pengamen.

Kondisi kerasnya kehidupan keseharian yang dihadapi kaum miskin kota, khususnya pengamen telah menjadi salah satu variabel pemicu bagi munculnya kesadaran sektoral untuk melakukan gerakan guna menuntut hak-haknya sebagai bagian dari warga kota, yang selama ini tidak diuntungkan dalam struktur kebijakan pembangunan kota. Proses marginalisasi kelompok miskin semakin mempertegas pengelompokan, kalau bicara kelas yakni kelompok kelas miskin dan kelompok kelas berduit. Tingginya disparitas status sosial ekonomi diantara dua kelompok yang ada sangat memungkinkan bagi munculnya kontradiksi.

Memahami kebijakan pembangunan kota, dari perspektif kelompok radikal telah menempatkan analisis bahwa pembangunan kota tidak lepas dari kepentingan kelas dominan dalam melakukan akumulasi kapital. Bagaimana pengaruh kepentingan kelas dominan telah ikut memicu kemunculan gerakan pengamen akan menjadi bagian dari uraian, serta bagaimana posisi pemerintah dalam relasi antar kepentingan kelas akan ikut melengkapi pembahasan point-point penyebab lahirnya gerakan pengamen.



Melakukan pembahasan yang berkaitan dengan gerakan pengamen dalam konteks kota Yogyakarta, maka dinamika latar historis dan kultural gerakan sosial lainnya tidak bisa dilepaskan. Bagaimanapun Yogyakarta dikenal memiliki tradisi gerakan yang cukup lama dalam historis gerakan sosial di Indonesia. Artinya keberadaan gerakan pengamen telah menjadi bagian dinamik dari proses dialektis antara kekuatan gerakan sosial yang ada di Yogyakarta, tinggal persoalannya adalah seberapa besar dinamika gerakan sosial memberikan pengaruh terhadap kemunculan gerakan pengamen, ini akan menjadi pembahasan yang akan melengkapi studi dalam melihat faktor-faktor penyebab kemunculan gerakan pengamen.

## A. Kemiskinan dan Marginalisasi

Analisis bahwa persoalan urbanisasi masyarakat desa ke wilayah perkotaan tidak sepenuhnya karena adanya relasi “*push factor*” dan “*full factor*”. Tetapi persoalan yang lebih mendasar lagi bahwa pola kebijakan pembangunan telah menempatkan masyarakat pedesaan pada posisi tidak bisa memilih untuk tetap tinggal di desa. Desa telah menjadi wilayah yang tidak memungkinkan untuk mampu bertahan hidup, karena itu pilihan untuk melakukan urbanisasi menjadi pilihan rasional dalam upaya mencari penghidupan yang lebih layak. Fenomena besarnya arus para pelaju<sup>39</sup> di DIY yang tercatat sekita 20.000 setiap harinya menjadi gambaran adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah kota dan desa. Sejarah para pelaju diperkirakan bermula dari tahun 1970-an, ketika kebijakan pembangunan dan

---

39 Pelaju adalah istilah pekerja yang pulang pergi dari desa ke kota, umumnya mereka pergi berkerja ke kota pada pukul 06.00 dan pulang ke desa pada pukul 17.00 dan itu dilakukan setiap hari. Para pekerja ini berasal dari desa-desa pinggiran kota.

penciptaan lapangan kerja mulai memusat di kota besar, sedangkan daerah-daerah pinggiran ditinggalkan. Saat itulah orang-orang desa di desa-desa mulai menyerbu kota untuk bekerja,<sup>40</sup> umumnya mereka bekerja pada sektor informal.

Selain itu komersialisasi usaha pertanian di desa telah berperan besar mendesak warga desa untuk mencari pekerjaan di kota. Tapi di kota mereka tak mampu berpartisipasi dalam sistem perekonomian, sehingga mereka mengusahakan sektor informal sebagai lapangan usaha. Sektor informal bukanlah resistensi masyarakat bawah, melainkan hanyalah mekanisme pelindung. Tetapi yang akan menjadi catatan dalam kaitan dengan melihat kemunculan gerakan adalah ketika mekanisme pekerjaan pelindung ini terus menerus ditindas, maka ia bisa berubah menjadi gerakan perlawanan, apa lagi bila ia bekerjasama dengan dengan kelompok intelektual yang telah kehilangan tempat untuk menyalurkan kreatifitasnya.

Ilustrasi di atas, tergambar dari kemunculan gerakan pengamen, baik pada generasi kemunculan KPJ sebagai generasi pertama ataupun pada generasi kedua dimana SPI dan TAABAH ada. Kelahiran KPJ tidak lepas dari dinamika pertautan antara intelektual kampus yang keluar ke jalanan karena wilayah kampus tidak lagi memberikan ruang bagi penyaluran aktifitas kerja-kerja akademis yang otonom dan merdeka, karena represifitas pemerintah Orde Baru pada awal 70-an melakukan pembungkaman terhadap kekuatan gerakan-gerakan yang sebelumnya banyak dilakukan kalangan kampus. Bersamaan dengan itu proyek besar kebijakan pembangunan ekonomi yang ditekankan kepada pertumbuhan, dengan memacu masuknya investor asing telah menempatkan masyarakat miskin perkotaan pada posisi yang terus termarginalkan.

---

40 SKH. Kompas, Sabtu, 24 Juli 2004, hal. 1 dan 11.

Praktik peminggiran terhadap kaum miskin kota terlihat dari kebijakan tata kota yang mensyaratkan kebijakan “*city without slum*” kota tanpa kekumuhan. Keberadaan pengamen, gelandang, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung dan lain-lainnya dianggap sebagai sumber kekumuhan, serta kriminalitas, sehingga cukup bagi justifikasi pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap keberadaan mereka dengan melakukan penggusuran, penangkapan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Proses reproduksi image negatif terhadap keberadaan kaum miskin kota di atas yang dilakukan oleh pemerintah, telah juga kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh sebagian masyarakat kota, bentuk marginalisasi dan stereotipe negatif terhadap keberadaan kaum miskin kota saat ini dengan mudah kita jumpai di pintu-pintu gerbang perkampungan yang menempel tulisan pemulung dilarang masuk, atau seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan program kampanye melalui Dinas Sosial dengan membuat spanduk-spanduk yang menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada para pengamen adalah bentuk-bentuk marginalisasi terhadap keberadaan kaum miskin kota.

Dari beberapa kondisi yang dialami oleh kaum miskin kota di atas, termasuk dalam hal ini adalah pengamen terlihat bagaimana pengamen memikul dua beban persoalan yang harus dihadapi, beban pertama adalah tekanan struktural dari kebijakan pemerintah, dan beban kedua berupa stereotipe negatif dari masyarakat.

Dua beban ganda yang dihadapi oleh pengamen di atas telah menciptakan satu kondisi alienasi dan marginalisasi, sehingga pada kondisi tersebut dapat dipahami bagaimana akar kemunculan gerakan pengamen, yang memang muncul

sebagai respon atas persoalan ketidakadilan yang terjadi baik pada aras negara, maupun pada aras masyarakat. Kemunculan radikalisme dalam aksi-aksi yang dilakukan oleh kaum miskin kota yang terlihat menjelang dan sesudah keruntuhan rezim Orde Baru, yang cenderung anarkhis dengan melakukan pengerusakan dan penjarah bisa jadi karena adanya beban ganda yang menjepit kaum miskin kota, hingga berada pada kondisi tidak ada lagi ruang bagi eksistensi mereka sebagai bagian dari warga kota.

Perlakuan ketidakadilan terhadap kaum miskin kota yang terjadi di DIY juga menjadi gambaran umum terhadap keberadaan kaum miskin kota di kota-kota besar lainnya. Kasus penyitaan gitar para pengamen yang dilakukan pemerintah kota Solo dan pembatasan jam bagi pengamen yang hanya diperbolehkan pada siang hari menjadi bagian dari rentetan kasus-kasus kekerasan yang dialami pengamen khususnya. Bahkan disadari sektor yang paling didiskriminasikan dibanding dengan sektor rakyat lainnya adalah kaum miskin kota. Sehingga terdapat rasionalisasi yang kuat kenapa mereka harus melakukan gerakan.

Bentuk kebijakan yang secara struktural menindas keberadaan kaum miskin kota dan secara langsung memicu kemunculan organisasi TAABAH adalah ketiadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketiadaan KTP bagi pengamen telah menempatkan pengamen pada kondisi yang sangat lemah dan tidak menguntungkan. Karena ketiadaan KTP telah menyulitkan pengamen untuk mengakses hak-hak publiknya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang layak, sampai dengan keinginan untuk menikah secara resmi menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Bahkan matipun menjadi tidak gampang untuk menguburkannya, hanya karena mereka tidak memiliki KTP.

Kemunculan TAABAH yang pada awalnya mengusung

isu KTP terbukti mendapat respon yang baik dari segenap organ pengamen dan kaum miskin kota lainnya. Karena ketiadaan KTP merupakan persoalan mendasar yang selama ini dihadapi oleh kaum jalanan.

Ada kebutuhan mendasar yang lain yang ingin dicapai oleh gerakan pengamen selain sekedar tuntutan KTP, kebutuhan untuk diakui sebagai bagian dari warga kota dan mendapatkan perlakuan yang sama menjadi harapan yang harus dipenuhi, seperti mendapatkan pekerjaan yang layak, mengakses pelayanan publik, seperti pelayanan kesehatan, kebutuhan untuk sekolah dan dapat bebas dari aksi penggarukan yang sering dilakukan oleh aparat pemerintah. Dari perspektif teoritik dapat kita memahami apa yang mendorong kelahiran gerakan pengamen sebagai bentuk adanya kondisi deprivasi relatif sebagaimana yang dikemukakan Ted Robert Gurr dalam karya “*Why Men Rebel*”, membangun asumsi teoritiknya bahwa seseorang atau kelompok itu melakukan gerakan perlawanan atau pemberontakan karena disebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara “*value expectation*” yaitu (harapan akan barang-barang atau kondisi hidup mereka yang diyakini sebagai hak) dengan “*value capability*” yaitu (barang-barang atau kondisi yang mungkin mereka peroleh atau kemampuan sistem untuk memungkinkan orang memperoleh barang-barang dan kondisi yang mereka inginkan).

Artinya kalau tuntutan kelompok pengamen untuk diperlakukan sama dengan dengan warga kota untuk mendapatkan KTP, dapat mengakses pelayanan publik dan bekerja dengan nyaman sebagai bentuk *value expectation*, sementara disisi lain kelompok pengamen dan kaum miskin kota lainnya dipandang sebagai sampah dan sumber kriminalitas sebagai bentuk *value capability* maka

cukup argumentasi untuk memahami kenapa pengamen harus melakukan gerakan. Disadari benar bahwa semakin banyaknya orang mengamen itu disebabkan karena kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Konsekwensi dari persoalan di atas, negara dalam hal ini pemerintah harus bertanggungjawab atas persoalan semakin banyaknya pengamen dan kaum miskin kota. Artinya persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya melakukan penggarukan dan tindakan represif, kalau itu yang dilakukan pemerintah maka cukup alasan bagi kaum miskin kota untuk melakukan gerakan.

Dalam penelitian Gurr terhadap berbagai kelompok etnik dan komunal yang aktif dalam berpolitik menunjukkan bahwa mobilisasi dan strategi mereka didasarkan pada interaksi antar kedua variabel kondisi *value expectation* dan *value capability*. Kekecewaan terhadap perlakuan pilih-kasih dan perasaan identitas kelompok merupakan landasan dasar bagi mobilisasi dan menentukan jenis tuntutan yang bisa diajukan oleh para pemimpin gerakan. Kalau kekecewaan kelompok tidak cukup parah dan identitas kelompok tidak cukup kuat, maka para pemimpin gerakan itu tidak punya bahan atau sarana untuk menanggapi ancaman atau peluang yang datang dari luar kelompok. Sebaliknya, kalau kekecewaan itu mendalam dan meluas diimbangi dengan identitas dan kepentingan kelompok yang kuat, maka tersedialah “rumput kering” yang cukup; tinggal menunggu kesempatan untuk membuatnya cukup terbakar.<sup>41</sup>

Dalam konstelasi potensi kekuatan gerakan sosial, diakui sebenarnya kekuatan kaum miskin kota memiliki potensi lebih besar kalau dibandingkan dengan kekuatan gerakan

---

41 Mohtar Mas'ood, dkk (ed.), “KEKERASAN KOLEKTIF, Kondisi dan Pemicu”, P3PK UGM, Yogyakarta, Desember 2000, hal. 9.

sosial lainnya, seperti gerakan buruh, tani, mahasiswa dan kekuatan gerakan sosial lainnya. Kaum miskin kota itu jelas tidak punya tanah, tidak punya pekerjaan tetap, bekerja tidak nyaman, rumah tidak ada, tidur tidak nyenyak, kesemuanya ini adalah memiliki potensi yang lebih radikal dibandingkan dengan kekuatan gerakan sosial lainnya. Tinggal persoalannya adalah kaum miskin kota itu harus benar-benar dididik, untuk menjadi massa yang terdidik, terideologisasi dan berani. Ditambahkan, bahwa aksi bakar-bakaran sebelum lengsernya Soeharto itu banyak dilakukan oleh kaum miskin kota. Bahkan yang perlu dicatat sejarah perjuangan arek-arek Suroboyo sampai dengan Bandung lautan api itu yang banyak melakukan pembakaran yang kemudian mampu menaikkan eskalasi radikalisme perlawanan adalah kaum miskin kota. Kesimpulan sederhana ini berangkat dari logika apa mungkin orang-orang desa yang petani datang jauh-jauh lalu kemudian melakukan pembakaran, seperti yang terjadi di Jakarta, Solo dan kota-kota besar lainnya ketika masa-masa rezim Soeharto turun.

Bagaimanapun memang perlakuan diskriminasi terhadap kaum miskin kota akan memunculkan kekecewaan dan frustrasi. Dalam perspektif Eric Hoffer memiliki potensi besar bagi munculnya gerakan radikal dan sebagaimana juga dikemukakan oleh tokoh seperti Gusfield, Blumer dan DiRinzo bahwa sebuah gerakan itu muncul memang terdorong atas upaya melakukan perubahan terhadap kondisi yang dianggap tidak adil dan tidak menentu ke arah yang lebih baru dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik.

Persoalan apakah kondisi marjinalisasi dan bentuk-bentuk ketidakadilan yang dialami pengamen itu dapat berubah menjadi sebuah gerakan perlawanan sebagai sebuah jalan keluar, sangat dipengaruhi sebagaimana yang

dikemukakan Gurr disebabkan oleh 4 (empat) faktor,<sup>42</sup> yakni:

1. Seberapa parah tingkat keterbelakangan atau penderitaan kolektif kelompok komunal tersebut dibanding dengan kelompok-kelompok lain. Semakin kuat alasan untuk kecewa dan semakin kokoh persepsi bahwa mereka memiliki kepentingan bersama untuk melakukan tindakan kolektif. Artinya, semakin besar potensi untuk melakukan mobilisasi para anggota kelompok.
2. Ketegasan identitas kelompok. Kekecewaan kelompok dan potensi untuk mengartikulasikan kekecewaan itu secara politik tergantung pada kekuatan (salience) identitas kelompok itu. Identitas kelompok juga bisa luntur akibat stratifikasi dan segmentasi yang terjadi dalam kelompok. Apa yang menyebabkan penguatan identitas kelompok?

Menurut Gurr, ada tiga kondisi eksternal: Pertama, tingkat penderitaan antara kelompok yang bersangkutan dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain; Kedua, tingkat penderitaan kultural antara kelompok tersebut dengan kelompok-kelompok lain; dan Ketiga, intensitas konflik antara kelompok tersebut dengan kelompok-kelompok lain maupun dengan negara.

3. Derajat kohesi dan mobilisasi kelompok. Kohesi kelompok terjamin kalau ada jaringan komunikasi dan intraksi yang padat. Kohesi itu merosot kalau kelompok itu terpecah dalam beberapa gerakan dan organisasi politik. Pengorganisasian kepentingan sosial, politik dan ekonomi yang efektif dan dalam satu wadah menjamin kekokohan kohesi kelompok yang termobilisasi para anggotanya siap untuk menyumbangkan tenaga dan sumberdaya dalam tindakan kolektif demi kepentingan bersama.

---

42 Ibid, hal. 10-11



4. Kontrol represif oleh kelompok-kelompok dominan. Daya paksa yang diterapkan dengan tidak adil mendorong munculnya kemarahan dan sikap selalu curiga.

Dari keempat faktor yang dikemukakan oleh Gurr di atas, terlihat beberapa kecenderungan yang juga terjadi pada proses kemunculan gerakan pengamen. Pada faktor pertama kelompok pengamen merasa sebagai bagian dari kaum miskin kota, dibandingkan dengan kelompok masyarakat umum lainnya, seperti kelompok pengusaha, mahasiswa atau bahkan dengan buruh pabrik paling tidak memiliki kepastian perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak publiknya, untuk tidak mengatakan kelompok pengamen hampir-hampir dipandang keberadaannya tidak ada (baca; tidak diakui keberadaannya). Dalam kaitan itu, menjadi wajar kalau ikatan kelompok untuk melakukan tindakan kolektif sangat mungkin terjadi. Refleksi atas penggabungan beberapa organ pengamen dalam proses kemunculan TAABAH ketika menyoal tuntutan KTP adalah gambaran dari adanya kesamaan identitas atas persoalan bersama.

Berkaitan dengan upaya membangun identitas kelompoknya, pengamen yang tergabung dalam Gabungan Kaum Miskin Jalanan (GKJM), yang dulunya merupakan embrio kelahiran TAABAH, setiap tahunnya menggelar event kegiatan yang jatuh pada bulan September guna mengkampanyekan adanya hari kaum miskin kota. Momentum hari kaum miskin kota pada bulan September itu dimaksudkan sebagai upaya, 1. Membangun eksistensi diri kaum miskin kota, 2. Media partisipasi politik anak jalanan, dan yang ke 3. Sekaligus sebagai peringatan kelahiran TAABAH. Ada keinginan kuat untuk bagaimana momentum kegiatan pada bulan September sebagai upaya membangun identitas kelompok dan sekaligus upaya menggalang pengakuan akan eksistensi atau keberadaan kaum miskin

kota. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh Serikat Pengamen Indonesia (SPI) dan juga Kelompok Pemusik Jalanan (KPJ), sekalipun varian kegiatannya berbeda, akan tetapi tujuan dan sasarannya relatif sama yakni bagaimana kaum miskin kota dipandang ada dan diperlakukan sama dengan kelompok masyarakat pada umumnya.

Bisa jadi memang sebuah gerakan lahir tidak harus sebagaimana tesis yang dikembangkan oleh kelompok Marxian yang menekankan pada persoalan determinan ekonomi yang memunculkan perjuangan kelas. Sekalipun faktor ekonomi dalam kaitan penyebab kemunculan gerakan pengamen diberikan porsi yang lebih besar, akan tetapi dalam kaitan dengan kebutuhan pengakuan terhadap identitas kelompok atau status menjadi juga faktor dialektis yang ikut mempengaruhi kemunculan gerakan sebagai tesis Max Weber, bahwa 'kelompok-kelompok status' dan 'pengelompok politik', merupakan kategori yang berdiri sendiri, sejajar dan tidak berada pada di bawah dominasi ekonomi, karena masing-masing memiliki aturan dan logika perkembangannya sendiri-sendiri. Sekalipun untuk itu Max Weber tetap melihat bahwa faktor ekonomi memegang peran penting tetapi tidak harus selalu determinan. Artinya kebutuhan akan status atau pengakuan kelompok bisa jadi menjadi motif tersendiri dalam menjelaskan kemunculan gerakan pengamen, ketika berhadapan pada satu kondisi yang memang imej terhadap kelompok pengamen dan kaum miskin kota lainnya selama ini sering diasosiasikan negatif.

Sedangkan derajat kohesi dan mobilitas kelompok dari gerakan pengamen berada pada kondisi tersegmentasi pada kelompok-kelompok patron dan dengan kecenderungan pada isu serta pola gerakan yang berbeda. Ini memang secara umum juga menjadi gambaran dari gerakan sosial lainnya di

Indobnesia, seperti gerakan mahasiswa, buruh, tani dan *Non Government Organization* (NGO). Parsialitas kekuatan gerakan sosial yang terjadi di Indonesia menjadikan kekuatan-kekuatan gerakan yang tidak cukup kuat untuk mampu mendesakkan isu dan tuntutan kepada penguasa, apakah itu penguasa negara ataupun modal. Pada lingkup gerakan pengamen sebagai bagian dari kekuatan kaum miskin kota memang masih memiliki jaringan komunikasi antar organ, akan tetapi intensitas komunikasi belum cukup mampu membangun kohesi gerakan perlawanan yang terkonsolidasi dan terorganisir dalam isu serta tuntutan bersama.

Peta besar kekuatan gerakan pengamen di DIY, seperti keberadaan KPJ, SPI dan TAABAH memiliki isu dan pola gerakan yang berbeda. Kalau KPJ masih tetap bergerak pada wilayah berkesenian dengan ikatan kelompok yang sangat kultural, sedangkan SPI dan TAABAH tidak lagi bergerak sebatas berkesenian, kesenian hanyalah salah satu media perjuangan, selain aksi turun jalan, pengorganisasian massa dan pendidikan politik.

Pilihan metode perjuangan yang berbeda telah menempatkan kekuatan KPJ dengan TAABAH dan SPI berada pada posisi yang terkadang berhadap-hadapan, dengan stigmatisasi masing-masing terhadap kelompok lawan, seperti KPJ diberi cap tidak politis dan tidak memperjuangkan persoalan kaum miskin kota, sedangkan SPI dan TAABAH dianggap kelompok politis, yang tidak murni lagi. Antara SPI dan TAABAH memang memiliki kesamaan dalam isu dan pola gerakan, sekalipun rasionalisasi persoalan mendasar yang dihadapi oleh kaum miskin kota berbeda, kalau TAABAH jelas sejak awal melihat persoalan KTP sebagai persoalan mendasar kaum miskin kota, akan tetapi SPI lebih melihat persoalan mendasar dari kaum miskin kota adalah ketiadaan perlindungan hukum terhadap pekerja informal.

Perbedaan dari rasionalisasi persoalan mendasar yang dihadapi kaum miskin kota tidak sampai menjadikan TAABAH dan SPI berada pada posisi diametral, karena dalam beberapa isu dan tuntutan sampai dengan aksi bersama SPI dan TAABAH tidak jarang berada pada satu komite aksi, sekalipun dengan kecenderungan-kecenderungan yang berbeda dalam membangun aliansi dan jaringan, seperti dengan kekuatan NGO dan partai politik. Pada tingkat mobilitas kelompok antara SPI dan TAABAH dibanding dengan kelompok gerakan pengamen lainnya, memiliki mobilitas yang relatif lebih tinggi dalam pengorganisasian massa dan membangun jaringan, sekalipun kohesi antara kedua organ gerakan ini tidak rapat, tetapi komunikasi antar kelompok masih terjadi seperti dalam kasus-kasus penggusuran, penggarukan dan persoalan lainnya yang dihadapi kaum miskin kota.

Sejarah represif penguasa Orde Baru, yang lebih condong kepada para pemilik modal, tetap menyisakan tingkat kecurigaan yang tinggi khususnya kepada organ gerakan SPI dan TAABAH, sehingga terkadang sampai saat ini apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah ditangkap sebagai sebuah persoalan yang selalu akan merugikan kaum miskin kota. Mereka karena kecurigaan ini menjadi sangat keritis terhadap setiap kebijakan pemerintah khususnya pemerintah kota, apalagi kalau itu menyangkut isu-isu yang menyentuh langsung persoalan kaum miskin kota, seperti penggarukan, penggusuran dan aturan-aturan yang dianggap membatasi ruang gerak kaum miskin kota. Bukti kecurigaan SPI dan TAABAH terhadap setiap kebijakan pemerintah adalah misalnya mereka sangat anti terhadap keberadaan rumah singgah, yang dianggap justru menjadi media pembonsaian gerakan pengamen. Keberadaan Rumah Singgah dipahami

sebagai upaya pemerintah untuk menjadikan kekuatan kaum miskin kota tidak kritis terhadap persoalan kebijakan yang menyangkut kepentingan kaum miskin kota. Rumah Singgah dipahami bukan sebuah solusi dalam menyelesaikan persoalan semakin membengkaknya kaum miskin kota. Adapun bentuk-bentuk pendidikan keterampilan yang diberikan Rumah Singgah belum memadai untuk menjadikan kaum miskin kota untuk dapat mandiri dalam bekerja.

Penggunaan perspektif Gurr yang memang berbasis teori psikologi sosial, bisa jadi mengandung kelemahan dalam melihat secara keseluruhan dari kemunculan gerakan pengamen yang semata didasarkan pada variabel terjadinya kesenjangan antara value expectation dengan value capability, karena sebagaimana kritik yang dilakukan Tilly (1978) terhadap kelemahan teori Gurr bahwa dalam konteks menjelaskan kemunculan gerakan pengamen. Bisa jadi merupakan hasil dari kalkulasi para pemimpin yang menggerakkan sumber daya kelompok pengamen untuk menanggapi peluang politik yang berubah, artinya aspek psikologis saja tidak cukup memberikan penjelasan bagi munculnya motivasi perlawanan pengamen, karena mungkin saja terjadi bahwa kemunculan gerakan pengamen tidak lepas dari kalkulasi rasional atau tindakan instrumental untuk mencapai kepentingan politik tertentu.

Begitupun kritik yang dilakukan Salert (1976) terhadap titik lemah penggunaan teori Gurr terlihat pada level analisis bahwa motivasi psikologis seseorang dalam melakukan aksi kolektif. Hal yang ingin disampaikan oleh Salert adalah hal yang sulit untuk menjelaskan bagaimana bekerjanya faktor psikologis dalam setting yang terisolasi guna menjelaskan konstekstual persoalan sosial, seperti halnya kebutuhan dalam memahami kemunculan gerakan pengamen, yang semata

dilihat dari sisi psikologis, yang cenderung mengabaikan faktor interaksi antar individu. Tawaran Selert dalam melengkapi perspektif teori Gurr berkaitan dengan kebutuhan memahami kasus seperti halnya kemunculan gerakan pengamen adalah dengan menggunakan analisis faktor hipotesis agresi frustrasi sebagaimana juga dikemukakan oleh Eric Hoffer, sebagai dasar untuk menjelaskan kenapa seseorang mau terlibat dalam gerakan perlawanan. Tawaran ini untuk menjembatani penjelasan perlawanan individu dalam hubungannya dengan kelompok, karena permasalahan utama perspektif teori Gurr adalah pada isolasi relatif variabel satu sama lain.

Bagaimanapun juga menurut Salert, teori Gurr sangat bernilai, berkaitan dengan ide tentang deprivasi relatif yang dimediasi oleh legitimasi pemerintah, efikasi kekerasan yang lalu, dan kekuatan pergerakan pemberontakan adalah sangat masuk akal. Konsepsi dasarnya adalah kurangnya basis psikologi yang menghubungkan hubungan institusional dan sosial yang mempengaruhi kemunculan gerakan perlawanan. Catatan penting dari tawaran Salert ini adalah kemunculan gerakan pengamen perlu dilihat lebih jauh dalam hubungannya dengan keberadaan organisasi gerakan sosial yang ada dan situasi sosial yang melingkupi pengamen. Artinya gerakan pengamen yang ada di kota DIY tidak lepas dari setting kelembagaan dan dinamika masyarakat yang ada dimana gerakan pengamen itu muncul.

Persoalan kemiskinan sebagai penyebab kemunculan gerakan pengamen dalam studi ini tidak cukup dijadikan sebagai variabel yang merangsang munculnya gerakan pengamen. Suatu studi yang dilakukan oleh James C. Scott pada konteks munculnya gerakan petani di Asia Tenggara, yang disebabkan karena terancamnya subsistensinya. Dua tema dominan yang biasanya muncul dalam gerakan petani;

Pertama, pungutan atas penghasilan petani oleh tuan tanah, lintah darat atau negara tidaklah sah apabila melampaui apa yang dianggap tingkat subsistensi minimum menurut ukuran kultural. Kedua produk tanah harus dibagi-bagi sedemikian rupa sehingga semua orang terjamin subsistensinya,<sup>43</sup> karena bagaimanapun tanah merupakan alat produksi petani yang paling pokok. Dalam konteks pengamen yang paling mendasar adalah jaminan kenyamanan dalam bekerja, ketika pekerjaan mengamen yang sebenarnya bukanlah sebagai bentuk resistensi diganggu dengan aksi penggarukan (penangkapan) oleh aparat negara, maka resistensi itu akan berubah menjadi gerakan perlawanan.

Pada umumnya para pengamen menyadari bahwa pekerjaan mengamen bukanlah pilihan yang layak untuk dijadikan sebagai pekerjaan, akan tetapi mereka dihadapkan kepada satu kondisi tanpa pilihan kalau mereka ingin tetap survive untuk hidup dan ketika itupun tetap diganggu maka pilihan gerakan perlawanan menjadi pilihan yang harus dilakukan. Karena itu SPI menganggap bahwa jaminan hukum atas pekerja informal menjadi kebutuhan mendasar bagi pengamen khususnya. Kasus penyitaan gitar pengamen oleh pemerintah Purwokerto sudah cukup sebagai pemicu munculnya gerakan solidaritas pengamen se Jawa Tengah untuk melakukan aksi turun jalan. Kasus lainnya adalah aksi solidaritas pengamen terhadap kebijakan pemerintah Solo yang melakukan pelarangan terhadap operasi pengamen dan gelandangan. Dari rangkaian kejadian di atas, maka secara umum kemunculan gerakan petani yang lahir dari terancamnya subsistensi, bisa terjadi hal yang sama terhadap munculnya gerakan perlawanan pengamen.

---

43 James C. Scott., "MORAL EKONOMI PETANI, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara", LP3ES, Jakarta, September 1981.

Larangan bagi aktivitas mengamen di jalanan akan mengancam keberlangsungan kehidupan mereka. Karena seperti satu ungkapan bahwa “Dalam itu marga margining gesang” (bahwa jalan itu sumber kehidupan) menjadi jawaban atas makna jalan bagi pengamen. Kalau tanah adalah jaminan bagi pemenuhan subsistensi petani, maka makna jalanan bagi pengamen adalah sama sebagaimana arti penting tanah bagi petani, dan ketika sumber kehidupan itu dirampas atau diganggu, maka siapapun orang itu akan melawan. Hal ini yang disebutkan oleh James C. Scott sebagai “Moral Ekonomi Orang Miskin”, sebagaimana yang telah menempatkan diri secara historis dalam konteks-konteks lainnya yang merupakan inti dari gerakan-gerakan protes rakyat miskin di daerah-daerah perkotaan dan pedesaan..., “hak subsistensi” satu tuntutan yang semakin sadar akan dirinya dan bersamaan dengan itu semakin terancam. Asumsi sentralnya sederhana saja, yakni bahwa apapun ketidakcakapan sipil dan politik mereka, kaum miskin mempunyai hak sosial atas subsistensi.<sup>44</sup>

## **B. Basis Materi dan Kesadaran Kelas**

Tesis besar Karl Marx yang berakar dari filsafat berpikir Materialisme Dialektika dan Historis (MDH) menjadi entri point dalam melihat lebih jauh akar kemunculan kesadaran pengamen untuk melakukan gerakan. Lebih spesifiknya untuk hal yang berkaitan dengan kesadaran kelas, bahwa kesimpulan umumnya adalah ternyata bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaannya, akan tetapi sebaliknya keadaan sosialnya yang menentukan kesadaran. Persoalan inti yang ingin ditegaskan oleh Marx dari filsafat berpikir tentang persoalan basis materi yang dikaitkan dengan kesadaran kelas adalah bahwa bukan

---

44 Ibid., hal. 49-50



fikiran yang melahirkan materi, melainkan materilah yang melahirkan fikiran. Secara sederhana ingin disimpulkan bahwa kesadaran pengamen untuk melakukan gerakan tidak lepas dari pengalaman keseharian yang mereka hadapi.

Kalaupun harus diakui bahwa tidak semua pengamen itu berangkat dari persoalan ekonomi, akan tetapi bagaimana persoalan ekonomi telah menempatkan sebagian besar sebagai penyebab orang mengamen. Berkaitan dengan keterlibatan personal pengamen yang terlibat dalam kerja-kerja gerakan itu umumnya dari pengamen yang berasal dari problem ekonomi. Diakui agak susah mengajak pengamen yang berlatar belakang persoalan psikologis keluarga atau sebatas mengamen sebagai media aktualisasi kesenian, karena biasanya mereka mengamen hanya sebagai pelarian yang sifatnya sangat sementara. Dari gambaran di atas kalau ditarik dari munculnya kesadaran untuk pengamen melakukan gerakan adalah adanya relasi ketidakadilan, khususnya persoalan ekonomi yang dialami kelompok pengamen.

Persoalan kondisi kemiskinan ekonomi memegang peran penting dalam proses terbangunnya kesadaran pengamen. Sekalipun begitu faktor ekonomi bukanlah faktor yang determinan dalam melihat kemunculan gerakan pengamen. Pemahaman Marx atas bangunan ekonomi sebagai base-superstructure tetap saja kemunculan gerakan pengamen lahir dari bekerjanya dialektika antar aspek-aspek kultur sosial, politik maupun aspek kehidupan lainnya, dalam kaitan ekonomi sebagai faktor penting, diletakkan sebagai kondisi (*condition*) bagi kemunculan kesadaran perlawanan, sementara faktor sosial-politik, kultur, relasi dengan gerakan sosial dan faktor lainnya ditempatkan sebagai pemicu (*precipitation*).

Kebutuhan untuk meletakkan adanya pemisahan antara dua variabel “kondisi dan pemicu” kemunculan kesadaran

perlawanan pengamen untuk keluar dari perdebatan klasik antara tradisi filsafat idealis yang dipelopori Hegel dengan tradisi filsafat materialis yang dipelopori Marx, berkaitan dengan diskursus ‘ide versus materi’ sebagai penentu pola-pola perkembangan dan perubahan sejarah. Karena pilihan ekstrim terhadap dua tradisi pemikiran di atas, tidak memberikan analisis yang tepat terhadap kemunculan gerakan pengamen, karena itu jalan tengah yang akan diambil adalah menempatkan kemunculan gerakan pengamen dalam perspektif Gramsci tentang “*overdetermine*”.

Penggunaan perspektif overdeterminasi Gramsci terhadap gerakan pengamen berangkat dari argumentasi bahwa. Pertama, pengamen tidak berada langsung dalam sistem produksi, yang mana dalam analisis Marx telah menempatkan dua kelas, yakni kelas pemilik modal dan kelas buruh yang tidak memiliki modal. Kalaupun pengamen dilihat dalam struktur kelas Marx, ia akan lebih condong berada pada kelompok “lumpen proletariat”, kelas sisa-sisa dan jelas pengamen bukanlah menjadi kekuatan inti perubah sebagaimana posisi kelas buruh sebagai kelas sentral dalam perspektif Marx. Kedua, konsekuensi dari point pertama di atas, dalam kajian ini akan melihat keberadaan gerakan pengamen sebagai salah satu entitas gerakan yang *co-existensi* dengan entitas gerakan lainnya dan antar entitas tidak berdiri sendiri, ia saling mempengaruhi (*overdetermine*) terhadap eksistensi lainnya. Tidak ada satupun entitas kekuatan gerakan yang dianggap “lebih menentukan” ketimbang yang lainnya. Ketika kemunculan gerakan pengamen tidak sepenuhnya muncul karena berlangsungnya determinasi ekonomi sebagai *base-structure* sebagaimana kemunculan gerakan buruh dalam perspektif Marx, sekalipun harus diakui faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penting sebagai penyebab kemunculan gerakan pengamen, bukan

berarti menisbikan faktor sosial, budaya, pendidikan, ideologi dan faktor lainnya, yang secara dialektis saling mempengaruhi.

Akan sangat berbeda memang kalau melihat ciri teori gerakan sosial dan organisasi gerakan sosial dari kaca mata aliran Marxis tradisional yang menempatkan kelas buruh dilihat sebagai pusat perubahan, dalam teori perubahan sosial bagi kalangan Marxis tradisional dan perannya dalam gerakan sosial dianggap esensial. Dengan demikian, kelas buruh didudukkan sebagai unsur utama dalam proses perubahan. Jadi, menurut pandangan Marxisme tradisional, ada beberapa ciri teori gerakan sosial dan organisasi gerakan sosial. Pertama, gerakan sosial dilihat sebagai gerakan kelas buruh dari buruh pabrik di perkotaan atau petani tak bertahan atau buruh tani di pedesaan. Kedua, sebagai akibat anggapan pertama, perjuangan atau gerakan nonkelas, seperti gerakan lingkungan, gerakan perempuan dan feminis serta jenis gerakan non kelas lainnya, berada diluar teori ini. Ketiga, titik perhatian utama teori-teori ini adalah terhadap hubungan proletar kelas buruh dan kelas kapitalis ketimbang kepada hegemoni ideologis dan cultural, pendidikan, gender dan lingkungan.

Menurut teori antiesensialis ini, proses teori ditentukan oleh keseluruhan dari banyak proses lainnya. Penekanan teori ini terhadap ekonomi pada umumnya dan kepada kelas pada khususnya, hanyalah dianggap sebagai pintu masuk belaka. Dalam epistemology overdeterminis ini materialisme dialektis menghindari argumen yang meletakkan entitas apa saja, misalnya kelas sebagai esensi realitas sosial. Konsep hegemoni Gramsci pada dasarnya adalah ekspresi posisi anti esensialis-determinis dan kritik terus menerus kepada dan formulasi alternatif bagi determinisme ekonomi. Jadi

penganut antiesensialis tidak mengakui aspek esensi atau asal-usul, telos, ataupun subjek. Menurut teori ini, tidak ada teori termasuk teori Marxian itu sendiri yang dapat menyatakan dirinya sendiri sebagai esensi perkiraan menjadi esensi realitas. Tidak ada kebenaran absolut tunggal yang diakui. Dengan kata lain, teori antiesensialis menolak segala jenis argumen deterministik, misalnya determinisme ekonomi atau determinisme kelas, seperti dalam tradisi Marxian klasik. Masyarakat adalah totalitas yang bersifat saling mempengaruhi, proses sosial dan alam yang bersifat mempengaruhi satu sama lain dalam suatu totalitas.

Konseptualisasi esensialisme dan antiesensialisme yang bertentangan ini mempengaruhi berbagai aksi individu dan organisasi gerakan sosial dalam melakukan perubahan sosial. Mereka yang percaya bahwa aspek ekonomi sebagai faktor yang “menentukan”, cenderung menempatkan masalah ekonomi sebagai akar segala masalah sosial. Penempatan seperti itu, mereka cenderung memecahkan masalah-masalah masyarakat dengan berupaya merubah aspek-aspek ekonomi sebagai penentu. Dengan kata lain, mereka tidak melihat pentingnya aspek-aspek kehidupan lainnya, seperti hegemoni cultural dan politik, penindasan gender, dan pengetahuan/kekuasaan serta diskursus, sebagai bentuk dominasi yang melanggengkan eksploitasi ekonomi.

Di lain pihak, mereka yang menganggap “hegemoni” sebagai satu-satunya penyebab masalah sosial, cenderung mengabaikan kelas sebagai determinan penting menciptakan sebagai masalah-masalah sosial. Teori esensialis ini memberi andil atas tumbuhnya cara berpikir dogmatis dan fanatis dalam masyarakat karena pendukung teori ini yakin bahwa mereka telah menemukan “kebenaran absolut”. Teori itu juga telah menyebabkan stagnasi dengan penolakan

terhadap diskusi dan analisis alternatif. Cara berpikir esensialis juga mengandung bahaya penciptaan intoleransi politik dan kultural dikarenakan sifat fanatisnya. Materialisme dialektis atau overdeterminisme diciptakan untuk menghindarkan fanatisme ini dan menciptakan masyarakat demokratis yang sejati.

Karena itu walaupun faktor realitas ekonomi sebagai faktor pendorong munculnya gerakan pengamen tetap dilihat sebagai salah satu penyebab dominan, diantara faktor penyebab lainnya. Realitas kondisi ekonomi dilihat sebagai salah satu faktor dominan berangkat dari argumentasi dari kenyataan bahwa ide tidak akan punya kaki ke bawah kalau tidak didukung oleh realitas. Realitas perlu ada dulu, baru ide yang mau dikembangkan akan punya kekuatan. Ide, kalau mau dijadikan sebagai kekuatan yang menggerakkan perubahan sosial, haruslah merupakan gejala kesadaran dari realitas, bukan sekedar sesuatu yang abstrak yang dipompakan dari luar. Ide tidak akan bisa efektif hanya sekedar dia indah atau dia logis, dia harus mencerminkan realitas, dia harus benar dan berakar di dalam realitas.<sup>45</sup> Kenyataan ini merupakan pembenaran bahwa sebuah gerakan tidak akan berarti apa-apa ketika tidak berangkat dari kenyataan keseharian yang dialami langsung oleh pengamen.

Respon dari kenyataan atau realitas keseharian menjadi tema mendasar dari kemunculan gerakan SPI dan TAABAH, seperti tuntutan bagi adanya KTP, perlindungan hukum bagi pekerja informal, akses terhadap fasilitas kesehatan, sekolah dan hak publik lainnya menjadi tema gerakan yang secara terus menerus disuarakan. Tuntutan atas persoalan mendasar yang dihadapi keseharian oleh pengamen adalah merupakan refleksi atas kesadaran sektoral kaum miskin kota.

---

45 Arief Budiman., dalam "Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial", Ismid Hadad (ed.), LP3ES, Jakarta, 1979, hal. 234

Upaya membangun kesadaran sektoral, menjadi kata kunci dalam gerakan pengamen, karena tidak mungkin untuk melakukan perubahan kalau kaum miskin kota, khususnya pengamen tidak menyadari realitas penindasan yang terjadi pada sektornya. Para pengamen sangat percaya bahwa kalau ingin melakukan revolusi demokratik harus dimulai dengan revolusi sosial. Revolusi sosial dimaksudkan sebagai adanya upaya membangun kesadaran sektoral atas kenyataan keseharian yang menempatkan pengamen dan kaum miskin kota lainnya pada kondisi termarginalkan, dan itu harus dilakukan oleh sektor kaum miskin kota sendiri. Karena itu bahwa berkaitan dengan keberadaan SPI merupakan respon atas kebutuhan untuk melakukan penyadaran terhadap kaum miskin kota.

Bagaimana kesadaran atas realitas telah menjadi faktor terjadinya revolusi di Inggris pada abad ke-19. Terlihat pada proses terjadinya individuasi yang muncul karena tumbuhnya perdagangan wol di negara tersebut untuk diekspor kenegaraanegara lain. Dalam keberadaan seperti itu, pertanian menjadi kurang menguntungkan. Tanah pertanian harus diubah menjadi padang rumput untuk memelihara domba. Tapi tanah dimiliki oleh para bangsawan yang memiliki hak atas tanah, karena darah kebangsawanannya. Karena itu harus diciptakan sistem nilai baru untuk menghapuskan hak istimewa ini, maka ide tentang hak-hak individu tiba-tiba menjadi suatu kekuatan sosial yang didasarkan pada darah kebangsawanan mulai ditentang oleh golongan kaum borjuis yang menekan bahwa status orang ditentukan oleh apa yang bisa dia capai sebagai individu, bukan keturunan.

Jadi, proses individualisasi terjadi bukan sebagai revolusi ide, melainkan sebagai revolusi sosial. Adam Smith, John Lock, Montesqueue ataupun Voltaire bukanlah orang yang merevolusikan masyarakatnya, mereka hanya sekedar mengartikulasikan proses yang terjadi dalam masyarakatnya.

Ini tentu saja bukan berarti peran mereka tidak penting. Mereka sangat penting, karena mereka memberikan alasan-alasan teoritis/ideologi terhadap proses tersebut. Tapi adalah salah untuk mengatakan merekalah yang menyebabkan revolusi tersebut. Mereka bukanlah sutradara, mereka hanyalah aktor diantara aktor-aktor lainnya.

Ilustrasi di atas sekedar memberikan gambaran bagaimana kesadaran realitas atas basis materi yang dialami pengamen, menjadi persoalan mendasar yang perlu dibangun, karena upaya untuk membongkar sistem dan struktur yang menempatkan sektor kaum miskin kota pada posisi yang termarginalisasi dan teralienasi sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sebagaimana konsep Wertheim tentang emansipasi, sebagai bentuk pembebasan manusia dari segala hal yang mencegah atau menghambat proses kreatif manusia, termasuk dalam ini bagaimana memahami protes dan gerakan yang dilakukan pengamen.

Jika memahami kemunculan gerakan pengamen sebagai salah satu bentuk perwujudan emansipasi, maka kemunculan gerakan pengamen harus dipahami dalam gerak dialektis, bukan determinan sebagaimana konsep Marx. Karena konsep emansipasi Wertheim memiliki logika yang sama dengan konsep overdeterminan Gramsci, dan pemikiran mereka sama-sama lahir dari kritik atas pemikiran Marx. Dalam konsep Wertheim memahami gerak masyarakat tidak dapat dilihat berlangsung dalam satu arah, melainkan selalu bersifat timbal-balik, atau dengan kata lain bersifat dialektik. Arah dari berbagai gejala, kesinambungan dan perubahan tidak dapat ditentukan sebelumnya, dan karena itu selalu diperlukan pengamatan sosiologi historis,<sup>46</sup> begitupun ketika memahami kemunculan gerakan pengamen.

---

46 W.F. Wertheim., "Gelombang Pasang Emansipasi", Nugroho Kacasingkana dan Joesoef Isak (ed), Garba Budaya dan ISAI (Institut Studi Arus Informasi), Jakarta, 1979, hal. Xiv.

## C. Peran Intelektual Organik dalam Relasi Kekuasaan

Tuntutan demokratisasi membangkitkan kesadaran masyarakat untuk memperoleh hak-hak mereka yang hilang. Rakyat diberikan kesempatan untuk merumuskan preferensi atau kepentingannya, lain atau kepada pemerintah baik dilakukan secara pribadi atau kolektif, dan mengusahakan kepentingan tersebut untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Konflik yang terjadi di berbagai wilayah Tanah Air tidak semata-mata karena faktor kepentingan para elite yang berbenturan baik pada tingkat lokal maupun nasional. Menurut Emil Salim konflik juga terjadi karena berbagai tuntutan untuk diperlakukan secara adil, hilangnya otonomi kolektif dan pengalaman represi oleh kelompok dominan memperkuat rasa diperlakukan tidak adil, adanya diskriminansi aktif dalam politik, ekonomi dan budaya, dan kehadiran kelompok yang menggalang gerakan perlawanan serta pemberontakan terhadap status kekuasaan penindas.

Salah satu bentuk gerakan perlawanan sebagaimana yang dilakukan pengamen, dan dalam kaitan itu apa yang dilakukan oleh kelompok pengamen diletakkan dalam perspektif teori konflik, yang lebih melihat konflik sebagai sebuah dinamika yang positif dalam membongkar relasi kekuasaan yang represif dan eksploitatif, dibandingkan dengan perspektif teori struktural fungsional yang melihat gerakan perlawanan sebagai hal yang mengancam stabilitas sistem. Secara umum konflik yang terjadi di Indonesia kalau mengacu pada pendapat Gunther Baechler bahwa konflik di Indonesia lebih banyak mengarah pada konflik-konflik pusat-pinggiran (*center-periphery conflict*), yakni pihak pusat lebih mengeksploitasi wilayah-wilayah di sekitarnya, bisa



kota mengeksploitasi desa atau pihak pemerintah pusat mengeksploitasi pemerintah daerah, konflik etno-politik (*ethno-political conflicts*). Oleh karena itu, perlu ada perubahan kebijakan dan implementasi dalam pengelolaan hubungan antar kelompok, dan proses penyelesaian konflik oleh elit politik cenderung didasarkan pendekatan kekuasaan (*power based approach*), tidak berdasarkan *community based approach* atau berdasarkan ketentuan hukum yang adil.

Proses reproduksi cara-cara penanganan seperti yang dilakukan Orde Baru terhadap aksi-aksi massa yang dilakukan kekuatan gerakan sosial, masih dominan menggunakan metode pendekatan kekuasaan, apakah itu dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata, atau dengan kelompok-kelompok sipil yang sengaja dipelihara oleh pemerintah untuk menghantam kekuatan gerakan penentang. Pengalaman kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara yang menggunakan kekuatan sipil, tepatnya kekuatan laskar salah satu partai politik pernah dialami oleh SPI ketika menggelar aksi perkampungan kaum miskin kota anti militerisme pada tahun 1999 yang di lakukan di depan Gedung Agung berakhir dengan pembubaran paksa oleh kekuatan laskar salah satu organisasi partai politik.

Pengalaman dalam menghadapi tindakan kekerasan yang dilakukan aparat negara telah juga menjadi bagian dari sejarah kemunculan gerakan pengamen. Tindakan-tindakan kekerasan inilah yang kemudian dalam perjalanan sejarah telah mempola perbedaan gerakan pengamen generasi pertama yakni KPJ dan generasi kedua dimana SPI dan TAABAH ada didalamnya. Generasi KPJ yang lahir pada era 70-an awal berada pada situasi dimana pemerintah Orde Baru mulai menggunakan tangan besi dalam menangani kekuatan gerakan penentang. Dalam kondisi menghadapi kekuatan

Orde Baru yang represif ini, maka pola gerakan yang paling taktis adalah menggunakan media seni sebagai media perlawanan dan penyadaran, sekalipun itu tidak juga lepas dari tindakan kekerasan, ancaman pencekalan dan kasus pembubaran pementasan seni menjadi bagian dari sejarah kekuasaan Orde Baru yang melakukan represif terhadap seniman, sehingga berkesenian di jalanan menjadi pilihan alternatif untuk mampu keluar dari jaring kontrol kekuasaan yang terus melakukan proses hegemonisasi kesemua lini kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gramsci tentang hegemoni, bahwa sedominan apapun sebuah hegemoni, tetap saja menyisakan ruang bagi munculnya ide-ide kritis, dan itu yang dilakukan oleh gerakan pengamen generasi pertama, yang menempatkan kekuatan syair lagu menjadi senjata utama perjuangan. Karya-karya seni yang kritis menangkap kenyataan sosial-politik menjadi bahan karya dari kebanyakan karya pengamen generasi pertama.

Perspektif teori hegemoni Gramsci dimaksudkan sebagai upaya menjelaskan bagaimana orang atau kelompok yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Gramsci secara berlawanan juga mendudukkan hegemoni sebagai suatu bentuk supremasi satu kelompok atau berapa kelompok atas yang lainnya, dengan bentuk supremasi lain yang ia namakan “dominasi”, yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuasaan fisik.<sup>47</sup> Penguasa Orde Baru membangun hegemoninya melalui kekuatan fisik, dan pada proses berikutnya penguasa Orde Baru melakukan

---

47 Muhadi Sugiono., “Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga”, Pustaka Pelajar Yogyakarta, Oktober 1999, hal. 31.

upaya reproduksi atas nilai-nilai, cultur dan budaya yang ada dengan standarisasi kebenaran dari pemegang kekuasaan, Serta itu juga didukung penguasaan “kepemimpinan moral dan intelektual” secara konsensual.

Ketika hegemoni sudah sedemikian parah dilakukan oleh rezim, Gramsci memandang perlu adanya aktivitas untuk mengcounter hegemoni dari kelompok berkuasa. Sebab inilah jalan untuk melakukan perjuangan pembebasan rakyat. Untuk itulah perlu dilakukan pendidikan politik bagi rakyat agar tercipta kesadaran kolektif rakyat. Dan untuk melakukan proses pendidikan politik itu dibutuhkan peran intelektual organik, istilah intelektual organik merupakan istilah pembeda dari intelektual tradisional, yaitu intelektual yang belum meluas dan digerakkan karena proses produksi. Intelektual organik memiliki kemampuan sebagai organisator politik yang menyadari identitas dari yang diwakili dan mewakili.<sup>48</sup> Intelektual organik ini tidak harus berasal dari kalangan kampus atau aktivis partai, tapi bisa juga berasal dari kalangan buruh atau bahkan dari kalangan pekerja seni (baca: seniman).

Peran intelektual organik memiliki peran besar dalam melakukan tranformasi isu-isu HAM dan Demokratisasi dalam tema-tema gerakan sosial di Indonesia, termasuk dalam tema gerakan pengamen. Kelahiran intelektual organik di Indonesia tidak bisa lepas dari semakin dominannya kekuasaan Orde Baru dalam melakukan hegemonisasi, hal yang nampak dari arus besar kemunculan intelektual organik di Indonesia adalah pada pasca tahun 1974, terutama yang berasal dari kalangan kampus, ketika represifitas negara

---

48 Safiul Arif (ed)., “Mengenal dan Mengkritik Gramsci” dalam “Pemikiran-pemikiran Revolusioner”, Averroes Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Januari 2003, hal 64.

telah menempatkan kalangan kampus sebagai kekuatan yang harus di kontrol melalui berbagai macam bentuk regulasi, salah satunya seperti keberadaan NKK/BKK, maka pilihan untuk turun dan terlibat langsung dengan kekuatan grass roots menjadi pilihan sadar yang harus dilakukan sebagai upaya melakukan counter hegemoni.

Kemunculan intelektual organik pada awalnya memang tidak di back up oleh keberadaan organisasi yang kuat, karena keberadaan organisasi selain tidak memungkinkan ditengah kondisi represif juga keberadaan organisasi justru tidak menguntungkan bagi keberlangsungan proses pengorganisasian massa dan pendidikan politik massa rakyat. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa proses hegemonisasi yang telah juga meletakkan standarisasi atas keberadaan sebuah organisasi dalam frame kekuasaan dan apabila organisasi yang dianggap tidak memenuhi standar itu akan di kenakkan cap Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Apa yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru ini memang bagian dari skenario besar bagi suksesnya ideologi pembangunan yang merupakan bentuk lain dari kapitalisme. Guna mendukung kepentingan berjalannya kebijakan pembangunan itulah kemudian, pemegang kekuasaan memiliki kepentingan besar untuk menciptakan satu kondisi stabilitas pembangunan.

Implikasi atas kepentingan menciptakan stabilitas pembangunan di atas telah mencitakan Pertama, penghargaan terhadap hak-hak kemanusiaan menjadi kurang terjamin. Kedua, Ada kecenderungan untuk menciptakan homogenitas pemikiran guna mendukung berlangsungnya kekuasaan. Ketiga, Nepotisme menjadi institusi dominan dalam pengerahan tenaga dalam organisasi baik, sosial, ekonomi dan politik. Dan Keempat, membuat tuduhan terhadap perbuatan tangan-tangan setan (*invisible hand*) atas

segala kejadian yang tidak mendukung prinsip harmoni. Keempat perkembangan institusi ini berlangsung di segala bidang kehidupan.<sup>49</sup>

Untuk dapat keluar dari kontrol dan dominasi kekuasaan yang ada, maka aktifitas intelektual organik tidak bisa sepenuhnya mengandalkan keberadaan instrumen organisasi dengan agenda kerja yang terencana secara jelas di atas kertas dengan program-program kerja yang mencolok, karena konsekwensi dari itu akan mengancam kerja-kerja gerakan. Karena itu fenomena gerakan yang dibungkus dalam aktifitas kesenian, diskusi pada kelompok-kelompok terbatas menjadi warna gerakan 80-an sampai dengan pertengahan 90-an, fenomena dinamika Malioboro 80-an dan 90-an menjadi salah satu potret dimana pertemuan intelektual organik dengan grass root yakni komunitas jalanan telah menghasilkan suatu yang pelan tapi pasti bahwa ruang hegemoni yang dilakukan penguasa tetap menyisakan ruang-ruang bagi berlangsungnya kerja-kerja penyadaran rakyat dalam melakukan counter hegemoni. Pertautan antara intelektual organik dengan *grass root* pada lingkup massa perkotaan yang terpinggirkan sedikit banyak telah ikut melahirkan gerakan pengamen dari generasi pertama sampai dengan generasi kedua, dan sudah barang tentu dengan intensitas dan pola yang berbeda seiring dengan perubahan peta kekuasaan sampai dengan keruntuhan Orde Baru.

#### **D. Infiltrasi Kapitalisme dan Keberadaan Pemerintah**

J. H. Boekke menyebutkan bahwa kota terus melakukan eksploitasi terhadap desa. Kota-kota dalam pertumbuhannya

---

49 Susetiawan., "Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial" , dalam "Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan", Moh. Mahfud MD, dkk (ed.), UII Press, Yogyakarta, Juni 1999, hal. 17

menjadikan desa sebagai bagian yang harus mendukung kota (*binterland*). Kota-kota adalah cerminan dari kepentingan kapitalis yang mendistribusikan barang-barang ke desa-desa sekitar kota (*periphery*). Kota hanya menjadi pengisap para kaum tani dari desa-desa. Oleh karena itu, perbedaan antara kota dan desa begitu sangat menyilaukan, tidak dapat dijumpai, bagaikan dua dunia yang saling bermusuhan. Studi tentang ketergantungan desa-kota menunjukkan bahwa desa-desa pinggiran kota-kota besar dibiarkan miskin dan akhirnya pemilikan tanah beralih kepada warga kota. Hal ini dapat dilihat wilayah pinggiran kota Jakarta yang tidak ada lagi proteksi pemilikan tanah penduduk asli oleh kekuatan uang warga kota.

Beban kota semakin berat karena hampir sebagian besar usia-usia produktif masyarakat desa pergi ke kota, tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan pendidikan juga untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Sumber daya manusia yang produktif desa akhirnya tidak hanya mereka yang terdidik saja, juga mereka yang tidak terdidik hilang. Keberhasilan yang telah diraih oleh sebagian orang desa yang telah dianggap mapan dijadikan sebagai model. Keberhasilan itu tidak hanya mencakup pada perolehan materi di sektor formal, juga perolehan di sektor perdagangan informal di beberapa kota besar.

Beban penduduk kota yang begitu besar harus menghidupi para warganya, tidak mengherankan terjadinya alienasi (keterasingan) dan stress karena tingginya intensitas kepadatan interaksi. Individualisasi makin tidak terelakkan, karena proses pembagian kerja sudah begitu berat tersebut ditambah lagi dengan masuknya (*immigration*) beragam etnik, agama, golongan, dan kelompok menimbulkan konflik yang pasti terjadi. Entitas kelompok kecil menjadi dominan

sementara entitas kelompok besar sebagai ancaman eksistensi kelompok kecil. Tidak hanya pada pola komunikasi sosial, juga pada pola pemukiman didasarkan *out-group* dan *in-group*.

Dalam studi Cestelles tentang perkembangan kota, menempatkan analisis bahwa perkembangan kota tidak lepas dari kepentingan akumulasi kapital dari para pemilik modal. Implikasi tingginya arus urbanisasi dan ketimpangan pendapatan penduduk perkotaan menjadi fenomena yang tak terpisahkan dari keberadaan pembangunan kota, karena pengembangan kota ditekankan kepada upaya memberikan fasilitas sebanyak mungkin bagi berjalannya kepentingan kelompok kapitalis, kenyataan ini menjadi gambaran umum perkembangan kota-kota di dunia ketiga. Sejalan dengan itu Wallerstain (1974) juga melihat bahwa struktur spasial internal negara-negara dunia ketiga sebagai bagian dari sistem produksi dan konsumsi dunia, artinya memahami keberadaan kota tidak lepas dari bermainnya kepentingan kelas.

Kecenderungan apa yang dikemukakan oleh kelompok Neo-Marxian terhadap arah pembangunan kota dapat kita lihat juga terjadi di kota-kota besar di Indonesia, termasuk dalam hal ini kota Yogyakarta.

Pembangunan pusat-pusat perbelanjaan, perumahan mewah, perkantoran, tempat rekreasi dan lain-lainnya sarat dengan kepentingan akumulasi kapital, sekalipun untuk itu demi keberlangsungan kepentingan kelas pemodal, pemerintah kota harus melakukan pengusuran terhadap perkampungan-perkampungan rakyat, perdagangan kaki lima dan bentuk penertiban lainnya menjadi bagian yang sering terjadi atas nama keindahan kota dan peningkatan pelayanan publik.

Skenario besar yang juga harus menjadi perhatian adalah

kepentingan kapitalis dibalik kebijakan otonomi daerah, sudah menjadi fenomena umum di semua daerah-daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Pemerintah daerah berlomba-lomba meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya peningkatan PAD adalah pemerintah berupaya semaksimal mungkin mengundang para investor baik nasional maupun internasional untuk melakukan investasi dan untuk itu pemerintah dipaksa menyediakan fasilitas-fasilitas guna merangsang masuknya para penanam modal. Kepentingan bagi peningkatan PAD kemudian berakces terhadap posisi masyarakat yang terus dilemahkan oleh pemerintah ketika harus berhadapan dengan kepentingan pemodal dan sektor yang paling dirugikan dalam relasi kepentingan pemodal, kalau dalam konteks masyarakat perkotaan adalah Kaum Miskin Kota (KMK).

Kebijakan pembangunan yang senantiasa menempatkan masyarakat pada posisi yang dikalahkan, telah menjadi kondisi bagi bersemainya rasa ketidakpuasan, keterasingan dan frustasi ditingkat masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan. Kondisi-kondisi ketidakadilan dalam kebijakan pembangunan dan pemerataan hasil telah menjadi salah satu penyebab munculnya gerakan perlawanan dari kaum miskin kota.

Infiltrasi Institusi kapital internasional yang banyak terkonsentrasi pada wilayah perkotaan melalui kebijakan pembangunan, telah memicu terjadinya arus urbanisasi, sampai dengan kondisi dimana kota tidak lagi mampu menampung aliran para pencari kerja dari wilayah pedesaan. Akses berikutnya adalah terjadinya jurang kemiskinan pada wilayah perkotaan semakin tajam, beban hidup yang harus ditanggung oleh kaum miskin kota semakin berat. Tekanan



hidup yang semakin keras telah memunculkan alienasi dan marginalisasi, ditambah lagi dengan kebijakan negara yang tidak berpihak terhadap keberadaan kaum miskin kota. Kemunculan gerakan pengamen menjadi bagian dari fenomena atas respon terhadap kebijakan pembangunan kota yang tidak berpihak kepada kelompok kaum miskin kota. Kenyataan atas ketidakadilan pembangunan kota dilihat dan dirasakan langsung oleh KMK dan pergantian elit politik dipahami tidak memberikan arti perubahan apapun atas kondisi yang ada.

Tidak ada beda rezim Soeharto dengan rezim Megawati, Cuma kesadaran masyarakat yang sekarang ini cepat untuk dibentuk, dibandingkan pada rezim Soeharto. Megawati memberlakukan kebijakan *city without slum* (kota tanpa kekumuhan); kekumuhan kota ini dianggap menghambat jalur distribusi modal di lapangan. Di jalan-jalan itu kaum miskin kota, pemandangan menjadi tidak menarik, pusat-pusat pertokoan yang didirikan pemodal-pemodal; nasional dan lokal diganggu oleh pedagang kaki lima, perkembangan distribusinya lemah karena kaum miskin kota ini dapat meniru hasil dari produksi perusahaan-perusahaan.

Kenyataan bahwa kota hanya menjadi milik elite politik dan ekonomi. Para konglomerat yang “dipelihara” oleh para penguasa diharapkan bisa melakukan percepatan pembangunan ekonomi dengan jalan memperbanyak sektor industri manufaktur dan jasa. Konglomerat dan penguasa menurut Didik J. Rachbini bagaikan “bayi kembar siam” yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Para konglomerat hanya menjadi benalu dan meningkatkan kekayaan dengan cara memperoleh proyek dari para penguasa, tanpa melalui suatu kompetisi yang terbuka. Pola pembangunan *trickle down effect* yang diharapkan dapat menumbuhkan sektor-sektor ekonomi menengah dan bawah ternyata hanya bagian khayal.

Kelompok ekonomi bawah tetap menjadi terabaikan dan hanya menjadi korban pembangunan kota.

Pandangan gerakan pengamen terhadap keberadaan pemerintah cenderung negatif dan konfrontatif. Hal ini terlihat sekali pada organisasi SPI dan TAABAH, kesimpulan umum dari pandangan kedua organisasi gerakan pengamen terhadap keberadaan pemerintah itu. Pertama, Pemerintah dianggap tidak pernah akan berpihak kepada kepentingan pengamen dan kaum miskin kota lainnya, walaupun kelihatan berpihak itu tidak lepas dari kepentingan individu dan institusinya. Kedua, pemerintah dipandang sebagai perpanjangan kepentingan pemodal, apakah itu pemodal nasional maupun internasional. Pandangan berkaitan dengan kepentingan pemodal ini gerakan pengamen sangat menekankan kepada analisis sebagaimana teori ketergantungan (depedensia) yang menempatkan pemerintah sebagai alat kelas kapitalis.

Dalam diskursus teoritik memang ada tiga perspektif yang berbeda dalam memandang keberadaan pemerintah khususnya dalam kaitannya dengan kepentingan kapital internasional, yakni teori ketergantungan, Teori strukturalis semi-otonom dan Teori neo-klasik. Masing-masing teori ini memiliki perbedaan mendasar dalam memandang keberadaan pemerintah di negara-negara dunia ketiga. Teori ketergantungan berkesimpulan bahwa negara dan pemerintah negara dunia ketiga tidak lain merupakan perpanjangan kepentingan atau kelas komparador dari kelas kapital internasional. Kelas kapital internasional ini dengan kekuasaan ekonomi mereka mampu mengontrol negara sedang berkembang untuk mengambil kebijaksanaan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Teori strukturalis semi-otonom bersikap lebih moderat, teori ini merupakan hasil kritik dan modifikasi teori ketergantungan.

Teori strukturalis pada dasarnya berpandangan bahwa negara dan pemerintah merupakan lembaga politik yang kurang lebih otonom, dimana teori ini lebih menekankan pada persoalan bagaimana negara menghadapi konflik dari berbagai golongan dan kelas dalam masyarakat. Negara di sini lebih lebih berfungsi sebagai penengah konflik antara berbagai kelompok atau kelas dalam masyarakat. Sedangkan Teori neo-klasik melihat negara sebagai pengambil keputusan ekonomi politik yang selalu bersandar pada pertimbangan dan pilihan mekanisme pasar yang rasional, dimana kebijakan ekonomi diputuskan berdasarkan faktor teknologi, penduduk, pasar dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, sehingga perilaku negara dianggap berkisar pada pendayagunaan ekonomi nasional untuk memenuhi tuntutan pasar dan kesejahteraan rakyat.

Dari ketiga perspektif teori di atas dalam hubungannya dengan kecenderungan pengamen melihat negara dan pemerintah sebagai alat kelas sebagaimana perspektif teori ketergantungan lahir dari kenyataan keseharian dimana mereka selalu dikalahkan oleh kepentingan kapitalis. Mereka memandang bahwa keberpihakan pemerintah itu terjadi karena kepentingan untuk mendapatkan kontribusi pendapatan bagi negara dari para pemilik modal, dibanding dengan pengamen dan kaum miskin kota lainnya, yang justru dilihat tidak memberikan apapun bagi negara selain dianggap sebagai pengganggu.

Memang beberapa pandangan terhadap relevansi ketiga teori hubungan negara dunia ketiga dengan kelas kapitalis internasional lebih tepat dalam konteks Indonesia dilihat dalam perspektif teori strukturalis, seperti yang salah satunya diungkapkan oleh Mohtar Mas'ood (1989), dengan argumentasi bahwa: Pertama, teori strukturalis melihat

hubungan negara dan masyarakat sebagai hasil proses historis yang melatar belaknginya. Kedua, teori strukturalis melihat konflik sebagai bagian penting mengerakkan mekanisme integrasi nasional dengan jalan negara memperkuat kekuasaannya untuk menengahi konflik dan mendorong pembangunan ekonomi. Dan yang Ketiga, dibanding teori neo-klasik teori strukturalis lebih memperhatikan hubungan dinamis saling mempengaruhi antara pemerintah dan masyarakat secara mendalam.

Beberapa catatan kritis dari perspektif teori ketergantungan juga perlu dijadikan pertimbangan dalam memahami kasus Indonesia, Pertama, sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia mengalami himpitan hutang yang sangat besar terhadap negara-negara kapitalis, dimana menempatkan negara Indonesia berada pada posisi yang powerless dan negara-negara kapitalis pada posisi powerfull, yang karena posisi yang tidak berimbang ini membuka ruang intervensi yang besar terhadap kedaulatan Indonesia sebagai bangsa, terlebih ketika harus berhadapan dengan kenyataan bahwa sebagian besar anggaran belanja negara didapat dari hutang kepada negara kapitalis. Kedua, dalam beberapa kasus konflik yang melibatkan kepentingan masyarakat lokal seperti wilayah Papua, Aceh dan kasus yang terbaru konflik pencemaran lingkungan antara PT Newmont Minahasa Raya (NMR) dengan warga Buyat, Sulawesi Utara, umumnya menempatkan masyarakat lokal sebagai kelompok yang dikalahkan. Berangkat dari beberapa kasus konflik yang melibatkan kekuatan kapital dengan masyarakat lokal, negara seringkali terlihat berpihak kepada kekuatan kelas kapitalis, artinya perspektif teori ketergantungan sebagaimana dipahami pengamen dalam melihat kenyataan keseharian mereka menjadi tetap relevan untuk menjadi bagian dari

diskursus teoritik dalam membongkar kepentingan dan hegemoni kelas kapitalis.

## **E. Dialektika Antar Gerakan Sosial**

Neil J. Smelser (1979), mengemukakan bahwa kemunculan Gerakan sosial ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) daya dukung structural (structural conduciveness) dimana suatu gerakan social-massa akan mudah menjadi dalam suatu lingkungan atau masyarakat tertentu yang berpotensi untuk melakukan suatu gerakan massa secara spontan dan berkesinambungan. (2) Adanya tekanan-tekanan structural (structural strain) akan mempercepat orang untuk melakukan gerakan massa secara spontan karena keinginan mereka untuk melepaskan diri dari situasi yang menyengsarakan. (3) Menyebarkan informasi yang dipercayai oleh masyarakat luas. Hal ini akan membangun perasaan kebersamaan dan juga bisa menimbulkan kegelisahan secara kolektif akan situasi yang tidak menguntungkan tersebut. Informasi yang disebarkan ini akan menguatkan dan memperluas gerakan social-massa. (4) Faktor yang bisa memancing tindakan massa, karena emosi yang tidak terkendali. Misalnya ada rumor atau isu-isu yang bisa membangkitkan kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan. (5) Upaya mobilisasi orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang telah direncanakan. Faktor persuasi dan komunikasi bisa mempengaruhi tindakan sosial secara drastis juga faktor kepemimpinan sangat berpengaruh dalam mengambil inisiatif para anggotanya untuk melakukan tindakan.<sup>50</sup>

---

50 Edy Yusuf Nur Samsu Santoso, "Amuk Massa", Alief Perss, Yogyakarta, 2004, hal. 34-35

## BAB 5

### POLA GERAKAN PENGAMEN

Dalam karya “*Weapons of the weak; Everyday Forms of Peasant Resistance*” James C. Scott (1985), salah satu persoalan yang disampaikannya adalah mencoba menunjukkan pola perlawanan kaum lemah dalam membangun perlawanan menghadapi hegemoni kaum kaya maupun negara. Memiliki caranya sendiri, seperti menghambat, pura-pura, menurut, pura-pura tidak tahu, pengerusakan, berlaku tidak jujur, mencopet, masa bodoh, membuat skandal, membakar, memfitnah, sabotase, yang mengakhiri pertentangan secara kolektif. Hal yang ditegaskan oleh Scott adalah bagaimana memahami sebuah gerakan tidak harus dipahami dalam kerangka yang terstruktur atau terformat secara ketat, seperti keberadaan kelengkapan organisasi, program yang terencana, terkoordinasi dan terevaluasi, akan tetapi model-model perlawanan keseharian seperti yang ditunjukkan di atas juga menjadi bagian dari gerakan perlawanan.

Akan tetapi ada catatan kritis yang disampaikan oleh CF. Zald dan Ash (1966) terhadap apa yang dikonsepsikan Scott dalam memahami gerakan di atas, bahwa elemen-

elemen kunci dari setiap gerakan adalah organisasi-organisasi gerakan, bukan individu-individu. Organisasi-organisasi ini merupakan unit-unit penggerak dari sebuah gerakan kemasyarakatan. Karena itu keberadaan organisasi gerakan menjadi persoalan mendasar dalam memahami gerakan.<sup>51</sup>

Tanpa harus meminggirkan perspektif Scott dalam karya *Weapon of the Weak* di atas, bisa jadi juga menjadi bagian dari fenomena gerakan pengamen, akan tetapi dalam bagian selanjutnya, gerakan pengamen lebih akan dilihat pada batasan definisikan Scott tentang hal yang membedakan antara perlawanan sungguh-sungguh dengan perlawanan yang bersifat insidental. Gerakan pengamen lebih akan dilihat dalam definisi perlawanan sungguh-sungguh, dibandingkan dengan perlawanan yang bersifat insidental, adapun definisi Scott tentang dua sifat perlawanan adalah:

“Perlawanan yang sungguh-sungguh bersifat: a. Terorganisasi, sistematis, dan kooperatif, b. Berprinsip atau tanpa pamrih, c. Memiliki akibat-akibat revolusioner dan (demonstrasi) mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi. Sebaliknya, “tanda-tanda kegiatan” yang bersifat insidental atau epifenomenal adalah: a. tidak terorganisasi, tidak sistematis, dan individual, b. bersifat untung-untungan dan berpamrih, (nafsu akan kemudahan) c. tidak memiliki akibat-akibat revolusioner, dan (demonstrasi) dalam maksud dan logikanya yang mengandung arti penyesuaian dengan sistem dominan yang ada.”<sup>52</sup>

Pilihan untuk melihat gerakan pengamen sebagai bentuk perlawanan yang sungguh-sungguh, berangkat dari argumentasi bahwa dari dua organisasi yang menjadi concern analisis, yakni SPI dan TAABAH memiliki organisasi, program kerja,

---

51 Robert Mirel., “Teori Pergerakan Sosial”, Insis Press, Yogyakarta, Maret 2004, hal. 63

52 James C. Scott., Op cit., hal. 305

pembagian peran dan yang terpenting adalah metode gerakan, akan tetapi apakah kecenderungan untuk kategori gerakan yang sungguh-sungguh atau bukan dalam melihat keberadaan gerakan pengamen akan menjadi bagian dari diskursus dalam membedah keberadaan pola gerakan pengamen.

## **A. Pentingnya Organisasi Bagi Gerakan Pengamen**

Mengkaji dan memahami sebuah gerakan memang tidak harus melihat pada level arus besar yang secara langsung nampak, seperti aksi demonstrasi, program kerja yang jelas dan terencana, serta bentuk organisasi yang tertata, akan tetapi kalau masuk kedalam ranah persoalan efektifitas sebuah gerakan dan out put hasil yang sebagaimana diharapkan menjadi persoalan penting adanya organisasi, sebagai bentuk dari apa yang disebutkan oleh Max Weber “rasionalitas instrumental”, guna mendukung pencapaian maksimal atas tujuan yang diinginkan. Karena bagaimanapun kerja-kerja gerakan memiliki tujuan dan target atas kepentingan yang ingin dicapai, oleh sebab itu esensi sebuah organisasi ditempatkan pada posisi yang sangat penting bagi upaya mendukung keberhasilan sebuah gerakan.

Menghadirkan organisasi gerakan dalam perspekti rasionalitas instrumental, mengandung konsekwensi logis dari kesadaran penuh dari para pelaku yang terlibat di dalamnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh McCarthy (1989) dan Tarrow (1991) tentang organisasi gerakan yang didefinisikan sebagai:

Kelompok yang memiliki kesadaran diri yang bertindak *in concerto* untuk mengungkapkan apa yang dilihatnya sebagai klaim-klaim penantang dengan menentang kelompok elit, penguasa, atau kelompok lain dengan klaim-klaim tersebut.<sup>53</sup>

53 Mansoer Fakhri., loc cit., hal. 58



Basis kesadaran menjadi kata kunci dalam membangun organisasi, karena itu keberadaan organisasi gerakan pengamen dipahami sebagai sesuatu yang lahir dari terjadinya proses kesadaran akan arti penting keberadaan organisasi. Definisi tentang keberadaan organisasi sebagai sesuatu yang muncul dari kalkulasi rasional juga dikemukakan oleh Amitae Etzioni merupakan bentuk dari unit sosial (atau pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>54</sup>

Berangkat dari beberapa pemahaman di atas, keberadaan organisasi sejak awal disadari betul oleh gerakan pengamen sebagai sebuah kebutuhan, terlebih lagi ketika harus berhadapan dengan struktur kekuasaan yang kuat dan terorganisir, apakah itu organisasi negara ataupun organisasi capital. Mereka mengakui bahwa akan sangat berbeda hasil perlawanan-perlawanan yang dilakukan orang perorang atau oleh sebagian kecil kelompok dalam melakukan protes atau gerakan, dibanding kalau yang melakukan itu adalah organisasi yang memiliki basis massa dan jaringan yang kuat dan untuk melakukan kerja-kerja pembasisan massa dan pelebaran jaringan dibutuhkan daya dukung organisasi yang kuat dan rapi. Artinya sejalan dengan penegasan Gramsci tentang konsep organisasi gerakan sosial dikategorikan sebagai masyarakat sipil yang terorganisir. Kesadaran akan pentingnya organisasi bagi gerakan pengamen terlihat dari sejarah kemunculan organisasi SPI dan TAABAH, sekalipun antara kedua organisasi ini memiliki stressing yang berbeda dalam memformulasikan pentingnya organisasi.

Keberadaan SPI sebagai organisasi kader memang

---

54 Amitae Etzioni., "Organisasi-organisasi Modern", Penerbit Universitas Indonesia dan Pustaka Bradjaguna, bekerjasama dengan Akademi Wiraswasta Dewantara, Jakarta, 1982, hal. 3

memiliki konsekwensi dalam hal proses pendidikan politik bagi anggotanya, karena itu organisasi SPI memiliki program rutin dalam mengkader anggotanya, selain melalui diskusi reguler yang diadakan setiap hari Senin sore. Doktrin kepeloporan ide menjadi kampanye yang terus didengungkan kepada anggotanya. Berbeda dengan sejarah kelahiran TAABAH yang lahir dari proses penyatuan beberapa organ pengamen kedalam satu wadah organisasi. Upaya penyatuan organ gerakan pengamen kedalam satu wadah organisasi TAABAH sebagai bentuk respon atas kesadaran akan pentingnya sebuah organisasi yang mampu menyatukan organ pengamen yang sebelumnya terdiri dari organ-organ kecil yang cenderung parsial dan lemah dalam mengusung issue perubahan bagi pengamen khususnya dan kaum miskin kota pada umumnya, karena itu TAABAH lebih memahami keberadaan organisasi dalam konteks payung advokasi bagi kepentingan arus bawah (baca: kaum miskin kota).

Perbedaan formulasi atas kebutuhan organisasi ini bisa dipahami dalam konteks situasi masa yang berbeda. SPI memang lahir dalam kondisi dimana organ gerakan pengamen belum banyak bermunculan, ada kebutuhan mendasar untuk melakukan proses penyadaran dan pendidikan bagi komunitas jalanan, sedangkan TAABAH muncul pada kondisi dimana organ pengamen sudah banyak bermunculan. Selain itu ruang kebebasan lebih terbuka bagi gerakan pengamen untuk lebih memantapkan kekuatan organisasinya, dan upaya untuk itu lebih memungkinkan karena kesadaran organ gerakan pengamen yang sudah ada relatif lebih siap untuk melakukan penyatuan gerakan kedalam satu wadah organisasi. Sekalipun semangat eksistensial dan primordialisme diantara organisasi pengamen masih terjadi, akan tetapi itu bisa sebagian di atas dengan menemukan issue persoalan mendasar yang dihadapi oleh pengamen dan

kaum jalanan, yakni kebutuhan akan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sekalipun itu tidak berlaku bagi SPI yang lebih melihat persoalan mendasar pada persoalan ketiadaan hukum yang melindungi pekerja informal dalam menjalankan aktivitas profesinya. Keberadaan KTP belum memberikan jaminan bagi terbebasnya kaum miskin kota dari ancaman pengusuran, penggarukan dan bentuk kekerasan lainnya.

Kalau kedua persoalan mendasar di atas ditarik sebagai tujuan dari organisasi SPI dan TAABAH. Mencermati kecenderungan dari perkembangan organisasi yang tidak selalu merespon persoalan KTP dan perlindungan hukum bagi pekerja informal sebagai persoalan mendasar yang dihadapi kaum miskin kota, dengan variasi yang sangat beragam pada aktivitas dan isu tuntutan ada kecenderungan terjadinya proses pengantian tujuan utama. Sangat sulit melihat konsistensi dari isu-isu yang dibawakan oleh gerakan pengamen dan ini tampaknya menjadi persoalan juga pada gerakan sosial lainnya, organisasi yang semula diorientasikan sebagai perjuangan sektoral kaum miskin kota ternyata pada perkembangannya tidak selalu bergerak pada wilayah sektoral, sekalipun penggantian tujuan utama memiliki argumentasi tersendiri, akan tetapi ambiguitas tujuan utama yang semula diperjuangkan berada pada kondisi yang sangat cair untuk tidak mengatakan sedang terjadi disorientasi agenda utama gerakan pengamen.

Kenyataan di atas merupakan proses di mana suatu organisasi mengganti prioritas beberapa tujuan maupun sarannya menurut cara sedemikian rupa sehingga sarana berubah menjadi tujuan dan sebaliknya tujuan malah digunakan sebagai sarana. Selama ini sarana yang biasanya diganti ialah organisasi itu sendiri. Organisasi tidak lain hanya sekedar alat yang bentuk untuk mengejar satu atau beberapa tujuan tertentu. Tetapi dalam proses pembentukan

maupun pemberian sejumlah sumber daya tertentu dan perekrutan anggota-anggotanya, ternyata terbentuk pula beberapa kelompok kepentingan (*interest groups*) yang sering kali lebih mencurahkan perhatiannya pada usaha untuk mempertahankan dan membina organisasi itu sendiri dan kurang melibatkan diri secara serius untuk membantu organisasi mencapai tujuan semula.<sup>55</sup>

Kecenderungan munculnya kelompok kepentingan dalam organ-organ organisasi gerakan pengamen yang ada, terlihat dari kuatnya patron terhadap figur tertentu. Keberadaan patron memiliki kekuasaan yang besar untuk menentukan arah gerak organisasi. Implikasi yang muncul adalah pertama, proses kaderisasinya menjadi sangat lamban karena hanya bergerak pada elit kelompok yang ada. Kedua, arah perkembangan organisasi tidak jelas lagi, karena standarisasi berada pada kepentingan elit, bukan kepada kepentingan organisasi dan sektoral yang diperjuangkan. Ketiga, akumulasi dari persoalan pertama dan kedua adalah arah perkembangan bukan berada pada garis menanjak, akan tetapi justru diam ditempat, untuk tidak mengatakan yang justru yang terjadi adalah pengkerdilan organisasi (baca:elitisasi) pada lingkaran kelompok yang sudah ada.

Bagaimana terjadinya proses perubahan tujuan utama karena bermainnya kelompok kepentingan ditunjukkan oleh Michels (1959) dalam bukunya "*Political Parties*" yang menemukan bagaimana partai dan organisasi buruh yang semula dibentuk sebagai sarana untuk menggerakkan revolusi serta membentuk pemerintahan demokratis di beberapa negara otoriter, seperti di Jerman di bawah kekuasaan Bismarck. Dalam usaha mengejar cita-cita tersebut, gerakan sosialis membentuk partai dan organisasi buruh. Sudah

---

55 Ibid., hal. 15

tentu organisasi itu membutuhkan kepemimpinan yang kuat, tetapi perkembangan selanjutnya menunjukkan tokoh-tokohnya mempunyai kepentingan pribadi untuk tetap mempertahankan posisinya karena apabila tersingkir mereka akan terpaksa bekerja kembali seperti buruh biasa sehingga prestise kehidupannya rendah, berpenghasilan minim dan tidak lagi menikmati kepuasan psikologis sebagai pimpinan. Atas dasar alasan tersebut, Michels menunjukkan bahwa tokoh-tokoh gerakan itu secara hati-hati berhasil mempertahankan kedudukannya. Dengan menerapkan sistem pengawasan yang ketat atas komunikasi organisasi serta membujuk tokoh-tokoh muda yang ambisius untuk masuk organisasi atau malah juga “membersihkan” organisasi dari golongan tersebut. Tokoh-tokoh yang telah memegang tampuk pimpinan lebih berhasil memperkokoh posisinya. Proses tersebut oleh Michels disebut “hukum Besi-Oligarki/*Iron law of Oligarkhi*” (disebut “besi” karena tidak memandang bulu, dan “Oligarkhi” karena yang dipaksakan tidak lain ialah hukum yang dibentuk oleh beberapa gelintir orang saja.<sup>56</sup>

Apa yang dikemukakan oleh Michels mungkin berlebihan dalam konteks organisasi gerakan pengamen, akan tetapi melihat dinamika gerak organisasi yang masih kuat pada lingkaran elit aktifisnya, menjadi cukup gambaran bagaimana pembacaan atas kepentingan pribadi dari elit yang ada dalam organisasi gerakan pengamen terhadap pendayagunaan resource bagi kepentingan pribadi, apakah itu berupa material maupun non-material (kepuasan psikologis). Gerakan revolusioner yang semula diharapkan ternyata semakin redup dengan alasan untuk memberikan peluang bagi “persiapan selanjutnya”. Padahal apa yang disebut sebagai persiapan itu akhirnya menjelma menjadi usaha untuk memperluas organisasi, memperbanyak modal dan

---

56 Ibid, hal. 16

mengukuhkan posisi pemimpinnya. Berdasarkan fakta itu, Michels menegaskan bahwa organisasi yang memiliki tujuan revolusioner pada hakekatnya malah bertindak sangat konservatif.

Dalam perspektif yang lain Robert Merton mengajukan tesis bahwa kecendrungan penggantian tujuan utama bukan pada puncak organisasi atau elit organisasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Michels, tapi justru terjadi di dalam tubuh organisasi itu sendiri, dan tidak pula terjadi dalam bentuk asosiasi sukarela, sebagaimana organisasi pengamen, akan tetapi malah di dalam birokrasi publik dan swasta. Argumentasi Merton berangkat dari kenyataan bahwa birokrasi pada hakekatnya memberi pengaruh tertentu bagi keberibadian pada anggota organisasinya, dan juga mendorong timbulnya kecenderungan untuk mentaati kaidah dan peraturan organisasi secara kaku demi kepentingan dan keuntungannya sendiri. Keadaan ini dapat terjadi juga meskipun secara formal maupun tidak formal organisasi mendorong anggotanya untuk bersikap luwes dalam menerapkan peraturan sebagai bagian dari pada kebijaksanaan dan sejajar dengan tujuan yang akan dicapai.

Reduksi relasi kepentingan pribadi pada lingkup birokrasi publik dan swasta sebagaimana yang dilakukan Merton tentu saja mengucilkan makna esensi dari kepentingan itu sendiri. Kalau kepentingan itu diwujudkan dalam arti kekuasaan maka ia tidak harus dibatasi oleh satu batasan kelembagaan formal atau non-formal, asosiasi sukarela maupun profit. Diungkapkan Michel Foucault (1976) tentang berjalannya hubungan kekuasaan yang tidak bisa dipisahkan dari hubungan-hubungan yang ada dalam proses ekonomi, penyebaran pengetahuan, hubungan seksual. Kekuasaan

adalah akibat langsung dari pemisahan, ketidaksamaan dan ketidakseimbangan (diskriminasi).

Dengan kata lain, kekuasaan merupakan situasi intern adanya perbedaan. Dalam kenyataan, perbedaan ini dibentuk dan berjalan di tempat kerja, institusi, dan berbagai pengelompokan.<sup>57</sup> Artinya kepentingan akan kekuasaan berlangsung pada setiap ketidaksamaan dan ketidakseimbangan. Kekuasaan tidak hanya menjelma pada organisasi formal semacam negara ataupun organisasi bisnis yang besar. Ditambahkan oleh Foucault bahwa kekuasaan yang menormalisasi tidak hanya dijalankan di dalam penjara, tetapi juga beroperasi melalui mekanisme-mekanisme sosial yang dibangun untuk menjamin kesehatan, pengetahuan dan kesejahteraan. Sekalipun bagi Foucault memahamkan bahwa sifat dari kekuasaan itu produktif dan menormalisasikan susunan-susunan masyarakat. Tetapi yang penting ditarik dari refleksi Foucault tentang kekuasaan ini mengingatkan orang agar memperhitungkan realitas bahwa kekuasaan selalu melahirkan penolakan. Maka penolakan dan perlawanan harus selalu masuk dalam pertimbangan strategis bagi upaya pengembangan organisasi gerakan pengamen. Senantiasa membuka ruang partisipasi bagi anggota menjadi prasyarat penting bagi upaya penyelamatan tujuan utama atas terbentuknya organisasi gerakan pengamen.

Kalau memahamkan organisasi sebagai bagian dari bentuk rasionalitas instrumental bagi upaya pencapaian tujuan gerakan pengamen, maka ia semestinya menjadi bagian dari konsep model ideal tipe masyarakat bebas dominasi pada lingkup terkecil dari organisasi pengamen.

---

57 Haryatmoko., "Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan, Menelanjangi Mekanisme dan teknik Kekuasaan Bersama Foucault" dalam Majalah BASIS, No. 01-02, tahun ke-51, Januari-Februari 2002, hal. 11

Dirumuskan oleh Habermas, bahwa masyarakat bebas dominasi adalah tindakan instrumental yang *embedded* dalam jaringan kerja interaksi komunikatif,<sup>58</sup> sebab apabila interaksi komunikatif *disembedded* dari masyarakat atau pada lingkup organisasi terkecil sekalipun, maka yang muncul adalah reifikasi, alienasi, totalitarian dan dominasi. Karena itu organisasi sebagai tindakan rasional yang dimaksudkan sebagai upaya pencapaian “goal”, hendaknya berada pada bingkai “*concencual norms*” yang dibangun dari ruang komunikasi antar segenap anggotanya, sehingga tercipta ketegangan “*purposive-rational action*” dengan “*communicative actions*”. Dialektika diantara keduanya akan membentuk organisasi pengamen yang kuat, dinamis dan populis.

Belajar dari salah satu penyebab kegagalan gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah ketika terjadi dominasi oleh elit partai (politbiro) atas semua kebijakan yang dibuat, berimplikasi pada munculnya pragmatisme ideologis sebatas jargon dan politik pada level kader atau anggotanya, sehingga ketika elit partai mencoba menggerakkan pada suatu momentum tertentu, yang terjadi adalah kondisi kegamangan dan disorientasi kader dalam menyikapi kondisi di masing-masing wilayah, sekalipun sampai hari ini kemampuan pengorganisasian PKI atas basis massa rakyat tetap diakui metode dan strategi, sekalipun terdapat beberapa kelemahan di dalamnya.

Organisasi gerakan pengamen, memang sudah mulai membangun pola gerakan yang berbasis pada kondisi obyektif yang terjadi di wilayah atau ditingkat kantong massa, seperti apa yang coba dilakukan oleh SPI ketika merumuskan program dalam setiap kongres Nasionalnya,

---

58 Heru Nugroho., “Kritik Habermas Terhadap Postmodernisme dan Relevansinya bagi Pemahaman Pembangunan”, dalam “Kritik Sosial , Dalam Wacana Pembangunan”, UII Press, Yogyakarta, Juni 1999, hal 95.



bagaimana rumusan program yang ada lahir dari kebutuhan pada tingkat daerah atau wilayah. Karena itu eksplorasi atas persoalan dimasing-masing wilayah menjadi bahan pijakan bagi perumusan program, sekalipun ada agenda atau isu nasional yang harus disikapi, tetap ditempatkan pada kondisi subyektif organ SPI di masing-masing wilayah. Artinya ruang partisipasi dari segenap anggota di masing-masing wilayah tetap diberikan otonomisasi dalam menjalankan organisasinya, tinggal persoalan pembagian peran antar bidang dan personal yang ada dalam organisasi sering-sering tidak berjalan, selain karena keterbatasan *human resource* juga yang paling mendasar adalah persoalan supporting budget (dukungan anggaran) yang masih lemah.

Institusionalisasi gerakan dalam wadah organisasi tetap dilihat sebagai pilihan media perjuangan yang efektif bagi gerakan pengamen. Untuk itu khususnya bagi SPI dan TAABAH memandang kekuatan pengamen tidak cukup berada pada wadah-wadah paguyuban yang lebih menitik tekankan pada urusan-urusan pemenuhan internal anggotanya semata, akan tetapi lebih jauh dari itu, bagaimana melalui media organisasi kerja-kerja gerakan bisa secara efektif dilakukan, seperti pengorganisirian, aksi massa, perluasan jaringan sampai dengan upaya pemberian pendidikan politik bagi massa arus bawah (kaum miskin kota).

## **B. Seni Sebagai Media Perjuangan**

Eksistensi dan dinamika seni tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat tempat ia tumbuh dan berkembang, sehingga secara umum bisa dikatakan bahwa apapun bentuk sebuah karya seni merupakan refleksi atas situasi masyarakat yang ada. Terlepas dari ada dan tidaknya muatan ideologis dalam sebuah karya seni, tetap saja seni menjadi media ekspresi atas kondisi masyarakat yang ada dan itu berlaku

universal disemua wilayah. Hal ini perlu terlebih dahulu dikemukakan untuk tidak memunculkan pretensi reduksi lebih jauh atas makna universalitas sebuah karya seni, karena yang menjadi persoalan dalam pembahasan keberadaan seni dan seni sebagai media perjuangan adalah pada ruang tafsir yang mendudukan seni dalam konteks sebagai media perjuangan.

Konsekwensi mendudukan seni sebagai media perjuangan, bagaimanapun hal yang tidak bisa dihindari adalah diskursus pemaknaan dari hakekat seni itu sendiri. Sampai dengan hari ini telah mengelompokkan dua perspektif yang berbeda terhadap pemaknaan akan hakekat seni, kelompok pertama lebih memahami seni untuk seni (*l'art for l'art*) dan kelompok kedua memahami seni sebagai bertujuan (seni bertendens) artinya seni sebagai media atau sarana. Perdebatan antar kedua kelompok aliran di atas dalam sejarah kesenian di Indonesia mencapai puncaknya dalam konflik antara kelompok LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang berhaluan kiri dengan kelompok Manikebu (Manifes Kebudayaan) pada tahun 1960-an.

Kelompok LEKRA memiliki gagasan dan pandangan dibidang kesenian, dengan pendekatan “realisme kritis” atau “romantisme revolusioner”. Mereka umumnya anti nilai-nilai kebudayaan yang non-Indonesia, mereka mengutuk “chaufinisme, fasisme dan kosmopolitisme”. LEKRA mengecam keras prinsip “seni untuk seni”.

Kelompok MANIKEBU menolak politik kebudayaan nasional yang sempit yang dicanangkan Soekarno yang di dukungan kuat dari LEKRA. Polemik antara kedua kubu LEKRA dengan MANIKEBU berakhir ketika Soekarno yang didukung PKI melakukan pelarangan dan pembekuan terhadap kelompok MANIKEBU.

Terlepas dari perdebatan tafsir atas pemaknaan seni dari dua kelompok di atas, hal penting yang menjadi catatan adalah bagaimana keberadaan seni dan seniman dalam konteks perjuangan kemerdekaan telah memiliki peran besar dengan terlibat dalam perjuangan pembebasan dari penjajahan. Sejarah telah mencatat nama-nama tokoh seniman yang terlibat aktif berjuang melalui media seni, seperti: Wage Rudolf Supratman, Kusbini, Ismail Marzuki, Cornel Simanjuntak dan sebagainya, yang telah melahirkan lagu-lagu yang dapat digunakan menyemangati rakyat untuk berjuang. Kemunculan seniman-seniman ini tidak lepas dari dinamika kesadaran nasionalisme yang mulai tumbuh dan berkembang dalam paruh akhir tahun 1920-an, yang kemudian dalam sejarah juga tercatat sebagai momentum kelahiran sumpah pemuda.

Sebagaimana dikemukakan dari awal tentang hubungan seni dengan dinamika masyarakat terlihat juga pada awal-awal bangkitnya kesadaran nasionalisme sampai dengan masa kemerdekaan. Terlihat corak lagu yang muncul itu. Pertama, lagu-lagu yang bercorak Nasionalisme perlawanan maupun sikap anti terhadap unsur-unsur kekuasaan asing (barat) imperialisme atau neo-kolonialisme. Kedua, lagu yang mempersoalkan sistem kapitalisme yang masih berlangsung. Untuk jenis lagu pertama kita jumpai mimpi-mimpi heroisme yang di pompakan kepada rakyat untuk menanamkan semangat bela negara, pilihan kata seperti ini dadaku, mana dadamu, rebut, gayang, serbu, gempur, merupakan kosa kata yang dominan dalam syair-syair lagu, salah satu contohnya seperti lirik lagu “MADJU SUKARELAWAN” karya Sudharnoto:

Buat semangat tekad kita  
Barisan sukarelawan Indonesia

Ke medan tempur siap bertempur  
Setiap tantangan kita lawan pantang mundur, hey!  
Awas Imperialis durhaka  
Landjutkanlah cita kita kuat perkasa  
Ini dadaku, mana dadamu  
Kamu menyerang kita ganyang jadi abu  
Ayolah kawan  
Buruh tani, pemuda dan angkatan kita  
Madju melawan siap senjata dan serbu ke kandang lawan  
Pastilah menang pastilah menang  
Pasti menang revolusi “45”

Sebagai rangkaian kehidupan para pejuang terciptalah lagu dan musik perjuangan. Tentu lagu dan musik itu menggambarkan ekspresi yang dialami pejuang waktu itu. Alam kebebasan merupakan dambaan bagi para seniman, seperti gambaran dari lagu “Laut pasir, lepas bebas dari pemandangan...” Lagu “Sepasang mata bola” merupakan ekspresi perjuangan menuju medan perjuangan di Yogyakarta. Dari liriknya dapat diketahui perjalanan para pejuang dengan kereta api menuju Yogyakarta sebagai ibukota RI. Lantunan lagu ini menunjukkan betapa kuatnya perjuangan bangsa hingga terekspresikan dalam lagu-lagu yang mengena di hati rakyat dan dilantunkan oleh rakyat. Memang perjuangan sudah menjadi perjuangan rakyat dan lagu itu sudah pula menjadi lagu rakyat. Tak kalah maraknya lagu “Halo-halo Bandung” yang menggugah semangat warga kota Bandung khususnya untuk berupaya merebut kembali “Kota Kembang” dari tangan penjajah meski telah menjadi lautan api.<sup>59</sup>

---

59 Suhartono W. Pranoto., “REVOLUSI AGUSTUS, Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional”, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, Januari 2000, hal. 214.

Begitupun dengan keberadaan dunia seni lainnya seperti seni sastra dan teater, dalam sejarah kesusastraan yang justru menjadi penghubung pemikiran antara sastrawan Balai Pustaka dan Pujangga Baru adalah pada tema “jiwa perjuangan” dan “jiwa ke-Indonesiaan”.

Datangnya militer Jepang menggugah sastrawan melahirkan sastra semangat untuk berjuang mencari kebebasan dan berdikari. Karya sastra lahir sebagai anak zamannya dan jelas ia tidak lahir seketika setelah kemerdekaan. Keadaan kacau-balau pada zaman Jepang dan revolusi tidak dapat menghasilkan karya sastra dengan segera. Balai Pustaka mulai beroperasi kembali pada tahun 1946 dan diantara novel yang diterbitkan antara lain, Atheis (Akhdia Kartamiharja), Aki (Idrus), Tambara (Utuy Tatang Sontani). Termasuk sastrawan angkatan itu Usmar Ismail, Rosian Anwar, YE Tatengkeng, M. Taslim Ali, dll. Karya sastra perang baru dihasilkan beberapa tahun kemudian, karena penulisannya memerlukan waktu yang agak lama, misalnya gambaran tentang revolusi yang ditulis Andangjaya, Ramadhan KH, J Lisapaly, Rivai Apin, T. Sumarjo, Rustandi Kartakusumah, Asrul Sani, Sitor Situmorang. Pandir Kelana, Nugroho Notosusanto, Subagyo Sastrowardoyo, dan lain-lain.

Pentas teater yang pada masa Jepang dan awal Republik di kenal sandiwaranya banyak menggelar cerita-cerita kebebasan, perjuangan, dan perang melawan penjajah. Cerita perjuangan Pangeran Diponegoro karya Mohammad Yamin, Puputan atau Perang Suci di rakyat Bali, dan pahlawan-pahlawan lokal banyak dipentaskan. Pentas ini sedikit banyak memberi inspirasi perjuangan bangsa menjelang kemerdekaan dan mempertahankan dari rongrongan eksternal. Semangat pahlawan telah mengisi para pejuang dalam mendarmabaktikan dirinya untuk kepentingan

bangsa. Pemuda-pejuang menjadi lambang dan tulang punggung bangsa. Merekalah yang ada di garis depan untuk mempertahankan kemerdekaan. Pasca revolusi fisik bukan berarti para seniman kehilangan tema-tema untuk terus mengintegrasikan karyanya dalam proses perubahan politik, Sapardi Joko Damono menunjukkan bagaimana kemunculannya tokoh baru pada tahun 1950-an seperti Pramudya Ananta Toer, Mochtar Lubis, Toha Mochtar, Toto Sudarto Bachtiar, dan WS Rendra yang bisa lebih tenang mengungkapkan hakikat revolusi, kemerdekaan, kekacau-balauan zaman sebelumnya.<sup>60</sup>

Selain persoalan keterlibatan para seniman dalam kancah perjuangan pembebasan bangsa melalui karya-karya seni, pasca kemerdekaan mencatat bagaimana pengaruh politik kekuasaan memiliki pengaruh besar atas corak seni yang bermunculan. Mobilisasi karya seni untuk mendukung program-program Soekarno yang terus mengkampanyekan revolusi juga tercermin dalam karya-karya seniman, seperti salah satunya ditunjukkan dari karya Soebranto K Atmojo, dengan lagu Revolusi Sosialisme Kepemimpinan Nasional (RE-SO-PIM):

RE-SO-PIM RE-SO-PIM Revolusi Agustus “45”  
RE-SO-PIM RE-SO-PIM Sosialisme ditangan negara  
Kita tuntutan pimpinan yang jujur  
Rakyat harus hidup adil makmur  
RE-SO-PIM RE-SO-PIM maju,maju RE-SO-PIM  
Kita tuntutan murah sandang pangan  
Minggir, minggir pimpinan yang curang  
RE-SO-PIM RE-SO-PIM hidup, hidup RE-SO-PIM  
Kecenderungan atas intervensi kekuatan politik atas

---

60 Ibid., hal 211

karya seni mendorong lahirnya kelompok Manikebu yang dipelopori oleh Muhtar Lubis, W.S Rendra, Taufik Ismail dan seniman lainnya. Dengan politik kekuasaan yang dimilikinya Soekarno melakukan pemberangusan terhadap kelompok Manikebu, karena dianggap tidak sesuai dengan revolusi yang terus dikampanyekan, begitupun dengan kelompok Band Koes Bersaudara dilarang tampil. Apa yang dilakukan Soekarno juga ternyata dilakukan oleh Soeharto. Penguasa Orde Baru melakukan kontrol ketat terhadap keberadaan karya seni yang melakukan kritik terhadap kebijakan pembangunan yang dicanangkannya. Karya seni yang dianggap kontra dengan arah kebijakan Orde Baru dibungkam atas nama stabilitas keamanan, politik perijinan menjadi momok yang menakutkan bagi para seniman, pelarangan buku yang dianggap berhaluan kiri seperti Pramudya Ananta Toer, pementasan Teater Rendra, Ratna Sarumpaet dan karya musik seperti Iwan Fals di kontrol secara ketat.

Kemarahan para seniman terhadap represifitas dan perilaku politik Orde Baru, tidak menghentikan karya-karya seni melakukan kritik, plesetan lagu Pemilihan Umum yang semula dimaksudkan untuk mensukseskan proses kepemimpinan nasional menjadi refleksi perlawanan yang dilakukan oleh para seniman. Tekanan keras yang dilakukan Orde Baru terhadap para seniman sampai orang tidak tahu siapa yang menciptakan dan mulai menyanyikan lagu ajakan boikot pemilihan umum yang mulai dinyanyikan pada PEMILU 1992, syair lagu plesetan boikot pemilu kental dengan ajakan perlawanan terhadap pelaksanaan Pemilu:

Pemilihan umum telah menjajah kita  
Wakil rakyat tertawa gembira

Hak demonstrasi di kebiri  
Cita rakyat belum merdeka  
Para wakil rakyat tak dapat di percaya  
Semua omong kosong belaka  
Di bawah undang-undang dasar penguasa  
Kita memboikot pemilihan umum

Di tengah kondisi tekanan dan kekerasan oleh aparaturnegara, pilihan media seni menjadi pilihan alternatif yang lebih taktis dalam menyampaikan maksud atau tujuan yang ingin disampaikan, dibanding dengan aksi massa atau media perjuangan lainnya. Begitupun yang dilakukan oleh para seniman pada waktu menghadapi pemerintah kolonial, sekalipun media kesenian juga tidak lepas dari kontrol dan tekanan kekuasaan. Selain itu kelebihan seni sebagaimana diungkapkan oleh Agus Noor dalam konteks seni sastra lebih imajinasi, perasaan, watak. Kalau data bisa abstrak tapi manusia kongkrit, lebih hadir dalam imajinasi dan perasaan kita. Karakteristik itu yang membuatnya menarik. Ada pretensi yang kemudian dibungkus sedemikian rupa, kemudian disampaikan.<sup>61</sup> Kekuatan gerakan pengamen menyadari benar kekuatan media seni sebagai bagian dari pola gerakan pengamen.

Memang ada persoalan yang cukup mendasar yang terjadi dalam memahami keberadaan seni antara organ gerakan pengamen sendiri, perbedaan ini terlihat antara organ KPJ dengan SPI dan TAABAH, bagaimanapun masih terlihat romantisme perdebatan yang pernah dilakukan oleh LEKRA dengan MANIKEBU pada tahun-tahun 60-an tentang pemahaman seni oleh gerakan pengamen saat ini. Organ KPJ masih menempatkan seni sebatas media ekspresi seni, walaupun didalamnya juga memiliki muatan

---

61 Majalah Balairung, Edisi N0. 28.Th.XIII/1998, hal. 73.



kritik sosial, akan tetapi untuk SPI dan TAABAH lebih dari sekedar memahami seni sebagai sarana ekspresi, tapi lebih jauh dari itu, berkesenian bisa jadi mejadi pintu masuk untuk melakukan kerja-kerja gerakan. Terdapat identifikasi yang cukup kental khususnya yang dilakukan SPI terhadap apa yang pernah dilakukan oleh LEKRA.

Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) yang berhaluan kiri, memang jelas menempatkan seni sebagai bagian dari alat perjuangan. Disampaikan DN. Aidit dalam konferensi sastra dan seni revolusioner LEKRA pada tanggal 28 Agustus 1964, yang menggariskan keberadaan seni dan sastra dalam tiga pokok pikiran:

1. Sejarah pengintegrasian sastra dan seni revolusioner dengan massa rakyat pekerja.
2. Dengan sastra dan seni yang berkepribadian nasional mengabdikan buruh, tani dan prajurit, menyelesaikan nasional-demokratis menuju sosialisme.
3. Pengintegrasian sastrawan dan seniman dengan massa rakyat pekerja, merupakan syarat mutlak dalam melaksanakan garis politik yang tepat dengan menuangkan dalam bentuk artistik yang tinggi.<sup>62</sup>

Ada relasi yang jelas yang coba dilakukan oleh gerakan pengamen, bagaimana melakukan integrasi antara aktivitas mengamen dengan aktivitas gerakan. SPI dan TAABAH melakukan proses rekrutmen dan pengorganisasian massa menempatkan media seni sebagai pilihan yang dianggap sangat efektif dalam melakukan kerja-kerja gerakan. Hal menarik yang dilakukan oleh SPI adalah bagaimana setiap anggotanya diinstruksikan dalam melakukan aktivitas mengamen sehari-hari tetap mengusung kerja-kerja gerakan.

Kerja mengamen berkorelasi erat dengan kerja-kerja

---

62 DN. Aidit, "Seni dan sastra", Oesaha Terbitan Radja Minjak, 2002, hal. 8-9

gerakan. SPI itu dalam mengamen harus disertai dengan apa yang dinamakan orasi politik terhadap rakyat, membuka situasi nasional (sitnas) yang terjadi dengan tujuan sebagai pendidikan politik bagi rakyat yang selama ini tidak tersentuh oleh teman-teman ataupun oleh SPI. Mereka dalam setiap mengamen melakukan orasi dan juga lagu-lagu perjuang yang dibuat dengan tujuan masyarakat bisa mengerti, masyarakat bisa sadar dan secara tidak langsung melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat yang belum disentuh selama ini. Karena itu ada hubungan aktivitas mengamen dengan kehidupan politik, jadi ada korelasi, dan itu menjadi ciri orang-orang SPI dan itu instruksi organisasi.

Apa yang dilakukan organisasi SPI memang tidak sepenuhnya dilakukan organisasi TAABAH. Yang mewajibkan anggotanya untuk juga melakukan kerja-kerja gerakan dalam setiap menjalani aktivitas mengamen. Sekalipun begitu anggota TAABAH tetap berupaya membawakan musik-musik yang berisi kritik sosial ketika mengamen, sekalipun tidak seketat organisasi SPI yang secara langsung mengintruksikan setiap anggotanya untuk melakukan kerja-kerja gerakan ketika menjalani aktivitas mengamen.

Dinamika perubahan kekuasaan dan situasi sosial juga telah menjadikan gerakan pengamen tidak semata melakukan perjuangan melalui media seni dan budaya. Tetapi gerakan pengamen juga telah melakukan perjuangan melalui jalur-jalur di luar aktivitas kesenian, seperti advokasi langsung kasus kaum miskin kota, aksi massa dengan turun ke jalan, penguatan ekonomi, sampai dengan upaya aliansi dengan kekuatan partai politik. Karena bagaimanapun struktur peluang politis dari terjadinya perubahan formasi kekuasaan politik dan keberadaan lembaga-lembaga politik memberikan pengaruh langsung ataupun tidak langsung atas pergeseran

pola gerakan pengamen, yang mana gerakan pengamen pada awalnya masih menjadikan media musik semata sebagai media aktualisasi atas kondisi sosial sebagai bagian dari resistensi terhadap kekuasaan yang ketat melakukan kontrol terhadap setiap potensi perlawanan rakyat, bergeser kepada pola bagaimana seni hanya menjadi bagian dari pola gerakan atau seni menjadi bagian dari strategi gerakan.

Refleksi atas apa yang dilakukan oleh SPI dan TAABAH bagaimana media seni musik menjadi alat yang paling efektif dalam melakukan rekrutmen anggota. Terlebih lagi bagi komunitas pengamen jalanan, yang *basic need* ada pada media seni musik. Diakui oleh sebagian besar informan bahwa sangat sulit untuk mengajak komunitas jalanan untuk terlibat langsung dalam kerja-kerja gerakan, kalau tidak menyentuh langsung pada kebutuhan keseharian mereka dalam mencari uang, terlebih lagi persoalan politik dan dunia gerakan menjadi persoalan yang masih asing dan cenderung menakutkan, terlebih lagi harus berhadapan langsung dengan aparat negara yang sering-sering tidak ramah terhadap komunitas jalanan. Aktifis gerakan pengamen sadar betul atas realitas komunitas jalanan yang cenderung apolitis karena pengalaman keseharian mereka dan tingkat pendidikan yang memang sangat minim untuk memahami sistem dan struktur yang menjadikan mereka tidak berdaya. Karena itu sebelum komunitas jalanan di berikan pendidikan politik sampai dengan pelibatan mereka kedalam kerja-kerja gerakan, calon anggota biasanya dilibatkan dulu dalam sanggar kesenian yang memberikan skill bermusik, teater, dan lainnya, baru pada proses berikutnya transformasi kesadaran politik mulai diberikan.

Melalui media kesenian memungkinkan gerakan pengamen untuk mengintegrasikan aktivitas mengamen

sehari-hari dengan kerja-kerja gerakan. Sehingga pola culturasi perlawanan bisa dikembangkan dalam pola gerakan “*day to day survive and movement*” yang lebih maju dari apa yang dilakukan oleh perlawanan petani sebagaimana yang digambarkan oleh James C. Scott dalam karya “*Weapons of the weak; Everyday Forms of Peasant Resistance*”, karena kesadaran atas kesenian yang menjadi alat produksi, memberikan fleksibilitas pengamen untuk melakukan kerja-kerja gerakan.

### **C. Dari ‘*Social Movement*’ ke ‘*Political Movement*’**

Kontrol dan represifitas yang dilakukan oleh negara atas rakyat memberikan pengaruh terhadap polarisasi sikap rakyat, termasuk bagaimana menjelaskan bentuk-bentuk gerakan perlawanan sangat ditentukan oleh kondisi berjalannya kekuasaan. Ketika tingkat represifitas kekuasaan dominan maka pola gerakan yang dikembangkan cenderung memilih gerakan bawah tanah (gerakan laten), sebaliknya ketika ruang kekuasaan mulai terbuka maka pola gerakan akan lebih bersifat manifest. Gejala ini terlihat sekali bagaimana proses pergeseran kekuasaan Orde Baru sampai dengan keruntuhannya telah memberikan pengaruh besar atas pergeseran-pergeseran pola gerakan sosial yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal ini gerakan pengamen.

Umumnya ketika kekuasaan berlaku represif, mempola sikap masyarakat ke dalam dua kelompok kecenderungan, begitupun fenomena yang terjadi pada komunitas jalanan. Dikemukakan oleh Nasikun (1995); Kelompok pertama akan mengundurkan diri ke ‘dunia dalam’ (*inner world*), yang bersifat subyektif dan sangat pribadi. Mereka cenderung memalingkan diri dari dunia luar (*pragmatism*) kepada sumber daya pribadi dengan memberikan penilaian sangat subyektif atas semua peristiwa di sekelilingnya. Pilihan ini

memiliki asumsi, dirinya menjadi pusat dari semua makna hidup. Sebagai kompensasi logis dapat disaksikan terutama dalam hal etos kerja dan produktifitas. Perilaku yang muncul memiliki kecenderungan besar untuk menjaga jarak dengan aktivitas politik dan bertindak pasif. Sikap pragmatisme yang muncul biasanya adalah bagaimana masyarakat jalanan membangun kelompok patron dalam bentuk organisasi-organisasi paguyuban yang diharapkan akan memberikan perlindungan bagi dirinya. Sedangkan Kelompok Kedua adalah keluar dari “dunia dalam” dan memberontak terhadap setiap anisfestasi sosial-politik dengan menggabungkan diri dengan komunitas diluar kelompoknya. Pilihan bagi pengamen biasanya mencoba menggabungkan diri dengan kelompok-kelompok gerakan yang memiliki kecenderungan sama untuk keluar dari “dunia dalam”. Dalam konteks pengamen di Yogyakarta biasanya ketemu dengan kelompok mahasiswa yang juga keluar dari “dunia dalam” (baca; lingkungan kampus), pertemuan antar keduanya bisa dalam bentuk komunitas seni dan budaya ataupun dalam bentuk kelompok gerakan bawah tanah. Awal keterlibatan pengamen ke dalam gerakan sosial berikutnya banyak dimulai dari pertemuan dengan kelompok-kelompok yang juga keluar dari “dunia dalamnya” dan hubungan antar personal aktivis dan kelembagaan terus bisa terjaga sekalipun tingkat represifitas kekuasaan politik mulai terbuka, karena antar aktivis dan lembaga pernah memiliki cultur-historis gerakan yang sama, sinergi antar kekuatan semacam inilah yang banyak mewarnai dinamika gerakan sosial di Yogyakarta.

Bersamaan dengan semakin terbukanya ruang politik pasca Orde Baru telah juga mendorong perubahan pola gerakan pengamen. Hal yang paling maju yang coba dilakukan adalah bagaimana gerakan pengamen yang semula

merupakan gerakan sosial dicoba untuk ditransformasikan menjadi gerakan politik. Pergeseran pola gerakan yang dilakukan oleh gerakan pengamen dari gerakan sosial ke arah gerakan politik, telah membelah gerakan pengamen kedalam dua kelompok; antara kelompok yang masih tetap melakukan gerakan sosial dengan tetap mengangkat isu-isu sektoral dan kelompok pengamen yang melakukan gerakan politik yang isu-isunya tidak lagi sebatas mengangkat isu dan persoalan sektoral.

Perbedaan pilihan pola gerakan sosial dan gerakan politik terlihat dari organisasi SPI dan TAABAH. TAABAH masih tetap bergerak pada pola gerakan sosial, sedangkan SPI sudah mencoba masuk ke dalam gerakan politik. Pilihan pola gerakan di atas telah menjadi bagian dari perdebatan panjang ditingkat gerakan pengamen dan masing-masing memiliki argumentasi atas pilihan metode gerakannya. Sejak awal kemunculannya TAABAH sampai dengan saat ini tetap mengupayakan isu dan tuntutan sektoral menjadi persoalan yang dikedepankan, termasuk dalam hal ini pilihan aliansi dan koalisi tetap menempatkan sektor kaum miskin kota sebagai kekuatan strategis, sedangkan SPI sudah mengembangkan isu dan tuntutan tidak lagi terbatas kepada persoalan sektoral kaum miskin kota dan kawan aliansi tidak terbatas pada kekuatan sektor kaum miskin kota dan antar kekuatan gerakan sosial, akan tetapi aliansi dengan kekuatan partai politik juga dilakukan.

Wacana dan pola gerakan yang dilakukan SPI terlihat ada pengaruh dari wacana Marxian, khususnya garis perjuangan Lenin. Pembentukan wacana dan pola gerakan SPI memang tidak lepas dari sejarah kemunculan Partai Rakyat Demokratik (PRD), yang dulunya merupakan organ gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas

Mahasiswa Untuk Demokrasi (SMID). Perubahan SMID menjadi PRD dipahami oleh banyak orang lahir dari inspirasi beberapa aktivis mahasiswa atas garis perjuangan yang dilakukan Lenin, yang memang menempatkan keberadaan partai politik sebagai “*vanguard*” dalam perjuangan perebutan kekuasaan. Sejak awal beberapa aktivis SPI punya kedekatan dengan organisasi SMID, sehingga pembentukan wacana dan pola gerakan yang dilakukan SPI relatif sama dengan wacana dan pola gerakan SMID yang kemudian berganti menjadi PRD pada tahun 1996. Karena itu tidak mengherankan kalau SPI memiliki kedekatan dengan PRD dan ikut terlibat dalam kerja-kerja PRD.

Sekalipun proyek politik PRD mendapatkan kegagalan pada PEMILU 1999 karena tidak mendapatkan dukungan suara yang signifikan, tidak menghentikan kerja-kerja gerakan politik SPI. Menyambut Pemilu 2004 SPI ikut terlibat dalam deklarasi Barisan Oposisi Bersatu. Keberadaan Barisan Oposisi Bersatu memang disiapkan sebagai partai politik, yang kemudian diberi nama Partai Oposisi Bersatu (POPOR),

POPOR tidak lulus dalam proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu kontestan partai yang bisa ikut PEMILU 2004. Untuk respon atas persoalan-persoalan nasional dan pendidikan politik rakyat, SPI bersama beberapa elemen gerakan membentuk aliansi strategis dalam Front Pemerintahan Rakyat Miskin (FPRM), yakni keanggotaannya terdiri dari: PRD, LMD, Jaker dan SPI.

Sekalipun dalam beberapa eksperimentasi gerakan politik SPI banyak mengalami kegagalan, akan tetapi mereka tetap meyakini bahwa perjuangan akan bisa efektif kalau didukung oleh dua aras kekuatan, yakni kekuatan massa grass root dan parlementarian. Konsekwensi aras parlemetarian

inilah yang kemudian dalam rasionalisasi gerakan mendorong SPI untuk masuk kedalam gerakan politik dengan kekuatan partai politik. SPI memiliki keyakinan bahwa gerakan massa tanpa didukung oleh perjuangan politik tidak akan kuat dalam mendorong proses perubahan, refleksi atas pilihan pola perjuangan politik lahir atas banyaknya kegagalan gerakan yang pernah dilakukan SPI.

Bagaimana dengan TAABAH? TAABAH tetap berada pada wilayah gerakan sosial, sekalipun secara umum TAABAH memiliki banyak kesamaan dengan SPI dalam metode gerakan, seperti aksi massa, penggalangan solidaritas, pengorganisasian basis, seni perlawanan, penguatan jaringan dan lain-lain, akan tetapi SPI dan TAABAH memiliki perbedaan dalam hal membangun basis gerakannya, kalau SPI tidak berlaku menekankan pada perjuangan sektoral kaum miskin kota, khususnya pengamen, akan tetapi sebaliknya TAABAH lebih menekankan pada perjuangan sektoral kaum miskin kota. Argumentasi TAABAH untuk tetap mempercayai bahwa basis kekuatan perubahan bagi kaum miskin adalah melalui kekuatan kaum miskin kota sendiri, hal ini diambil karena TAABAH belum mempercayai keberadaan partai politik sebagai pilihan perjuangan, ada kekhawatiran besar justru partai politik akan memanipulasi perjuangan kaum miskin kota mendorong TAABAH untuk tetap bergerak pada wilayah isu dan respon persoalan yang riil dihadapi sektor kaum miskin kota.

#### **D. Mengupayakan Pendanaan**

Persoalan pendanaan bagi kerja-kerja gerakan pengamen, dipandang sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian oleh organisasi. Perdebatan Fanon dengan Mc Gee tentang keberadaan kaum miskin kota, apakah akan mampu



menjadi kekuatan revolusioner bagi perubahan terletak pada kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh kaum miskin kota, yang memang secara ekonomi sangat lemah. Fanon sebagai salah satu pemikir aliran neo-marxian tetap meyakini bahwa kaum miskin kota akan muncul sebagai kekuatan revolusioner bersamaan dengan semakin tingginya jurang pembeda sosial-ekonomi masyarakat kota dan semakin menumpuknya kaum miskin pada wilayah perkotaan. Akan tetapi tesis Fanon dibantah oleh Mc Gee bahwa kaum miskin kota tidak bisa menjadi kekuatan revolusioner karena disebabkan oleh kondisi kemiskinannya, dan karena kondisi kemiskinan itu kaum miskin kota mudah dikelola oleh penguasa. Tesis Mc Gee diperkuat atas analisis keberadaan kaum miskin kota di dunia ketiga yang berbeda dengan proses kemunculan rakyat jelata pada tahap pembangunan industri di negara maju, dimana kaum miskin kota di dunia ketiga yang terlibat dalam sektor informal telah terfragmentasi sehingga sulit untuk mengorganisir diri untuk melakukan perombakan atas struktur yang menindas. Kesadaran atas persoalan pendanaan bagi kerja-kerja gerakan pengamen, disadari benar sebagai persoalan yang harus dicarikan penyelesaian.

Ada beban yang sangat besar yang memang dihadapi oleh gerakan pengamen pada sisi pendanaan, dibanding dengan kekuatan gerakan sosial lainnya. Kondisi pendapatan yang tidak menentu, sementara tututan bagi pendanaan bagi organisasi menjadi faktor penghambat bagi kerja-kerja gerakan, sehingga tidak jarang bentuk moderasi dan pembelokan gerakan pengamen oleh kekuatan di luar pengamen terjadi, karena itu SPI dan TAABAH memiliki tingkat kehati-hatian terhadap semua bentuk jaringan dan aliansi.

Problem perlawanan Kaum Miskin Kota (KMK) itu mudah terbeli, mudah digerakkan oleh kaum-kaum reaksioner, kaum fundamental, kaum borguis, karena pada dasarnya itu yang dianggap KMK ini tidak punya pokok ekonomi yang tetap, karena persoalan ekonomi yang sangat menyulitkan. Ia sebagai makelar-makelar bis, disisi lain kalau ada tawaran-tawaran lain dia mau, entah itu sebagai preman yang dianggap menambah penghasilan mereka. Tapi kalau kemudian KMK ini sebagai agen perjuangan yang cukup besar basis massa, karena kalau dia sudah sadar tentang kesadaran kelas dan kesadaran perlawanannya itu menjadi kekuatan revolusioner, orang yang berani dan tidak punya belunggu apa-apa, makanya selalu menggulirkan adanya rumah tempat tinggal itu harus, pendidikan jelas, dan kesehatan terjamin.

Untuk dapat keluar dari problem pendanaan bagi organisasi, ada banyak cara yang digunakan oleh SPI dan TAABAH. Apa yang dilakukan TAABAH cukup maju dalam mengupayakan pendanaan dengan membuka usaha penampungan barang bekas dari pemulung. Usaha penampungan ini memiliki dua arti bagi TAABAH; selain sebagai aktivitas pendanaan bagi organisasi juga sebagai media pembasisan massa pada kelompok pemulung sebagai bagian dari massa kaum miskin kota yang penting untuk diorganisir. Usaha lain yang dilakukan oleh TAABAH adalah membuat rekaman lagu-lagu perjuangan dalam bentuk kaset ataupun CD dan kemudian dijual yang sebagian hasilnya bisa menjadi tambahan kas organisasi. Untuk pemenuhan biaya bulanan sekretariat dipenuhi dari urunan anggota per bulan. Sedangkan SPI dalam mengupayakan pendanaan lebih banyak melalui kegiatan mengisi acara-acara seni, selain itu SPI juga melakukan penggalan dana dengan

membuat T-Shirt, Stiker, PIN, ngamen bersama dan iuran rutin anggota yang jumlahnya sama dengan TAABAH. SPI juga sedang mengupayakan pendanaan melalui rekaman lagu-lagu perjuangan.

Upaya pendanaan yang sebagaimana dilakukan di atas belum cukup untuk menutupi kebutuhan kerja-kerja gerakan, karena itu upaya kerja sama dengan pihak-pihak lainnya yang diharapkan bisa membiayai kegiatan organisasi pengamen juga dilakukan. Antara SPI dan TAABAH memiliki kecenderungan yang secara spesifik berbeda dalam melihat pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama. TAABAH memiliki kelonggaran dengan pihak NGO atau LSM dalam mengakses kerjasama untuk pembiayaan organisasi, sedangkan SPI memiliki sensitifitas terhadap pihak NGO yang dianggap sering melakukan moderasi atau pembelokan perjuangan kaum miskin kota melalui proyek-proyek yang mengangkat persoalan kaum miskin kota.

Konsekwensi atas kerjasama dengan pihak-pihak lain diluar pengamen, memang tidak jarang menjadikan gerakan pengamen berjalan lamban dan kehilangan prioritas agenda kerja gerakan. Karena kerjasama yang dilakukan menuntut sharring kepentingan antar pihak yang bekerjasama. Sekalipun sejak awal disadari bahwa landasan kepentingan adalah pada basisnya kepentingan sektoral, akan tetapi tidak selalu kesadaran pada kepentingan sektoral dapat dijalankan, sehingga gerakan pengamen mengalami kelambanan untuk tidak mengatakan sebagaimana istilah Clifford Geertz sedang terjadinya “involusi” gerakan pengamen, sebagaimana gerakan petani karena problem pendanaan.

Dari ke lima faktor kemunculan gerakan sosial di atas tidak memberikan generalisasi empiris terhadap kasus kemunculan gerakan pengamen dalam lingkup sektor kaum

miskin kota. Pertanyaan yang muncul adalah kalau kelima faktor kemunculan gerakan itu ada pada semua sub sektor kaum miskin kota, tetapi kenapa yang baru muncul menjadi kekuatan gerakan kaum miskin kota masih sebatas pada kelompok pengamen. Pertanyaan ini akan menjadi kerangka dalam menjelaskan posisi pengamen dalam hubungannya dengan gerakan sosial lainnya.

Untuk menjelaskan posisi pengamen itu ada dua faktor pendekatan yang memberikan pengaruh langsung yang menentukan kemunculan gerakan pengamen dibanding dengan sub sektor kaum miskin kota lainnya. Pertama, pendekatan struktur kekuasaan yang represif. Kedua, kultur mobilitas pengamen. Penjelasan faktor pertama adalah ketika bentuk represifitas kekuasaan semakin keras terhadap kekuatan gerakan perlawanan, maka kecendrungan kekuatan gerakan akan melakukan aksi bawah tanah, dalam artian kekuatan gerakan akan lebih memilih aksi-aksi bersifat latent, yang membungkus aksi-aksi perlawanan dengan simbol-simbol yang lebih cultural, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian James C. Scott tentang “*everyday forms of resistance*” dimana gerakan petani melakukan aksi perlawanan terselubung, sebagai respon terhadap “*everyday forms of repression*”.

Aksi terselubung dilakukan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan secara terbuka, yang kalau itu dilakukan akan mengancam keselamatan diri, keluarga dan kelangsungan gerakan. Untuk faktor kedua berkaitan dengan mobilitas cultural, secara profesi keseharian pengamen dituntut untuk memiliki mobilitas yang tinggi dalam melakukan aktifitas mengamen. Aspek mobilitas memberikan keuntungan bagi kelompok pengamen untuk mendapatkan akses informasi yang lebih

banyak dibandingkan dengan kelompok kaum miskin kota atau kelompok pekerja informal lainnya. Aktivitas mengamen tidak begitu terikat oleh waktu dan wilayah.

Pasca peristiwa Malari 1974 intensitas kekerasan yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru terhadap kekuatan gerakan perlawanan semakin tinggi, kontrol aparaturnegara terhadap setiap potensi perlawanan merambah kesemua lini dan level sektor masyarakat. Dalam kondisi dimana tingkat represifitas aparaturnegara begitu dominan sangat tidak memungkinkan melakukan perlawanan secara terbuka, karena itu pilihan metode perjuangan dengan menggunakan media kesenian dipandang lebih taktis sebagai aksi terselubung bagi kekuatan gerakan sosial. Dalam kaitan itu, pengamen yang memang bahasa profesinya adalah seni musik mendapatkan posisi strategis untuk menjadi bagian yang secara dialektis dengan kekuatan gerakan sosial lainnya memainkan potensi kekuatan yang dimilikinya sebagai bagian dari kekuatan gerakan, intensitas komunikasi dan aliansi pengamen dengan kekuatan gerakan melalui pentas bersama, mengisi acara dan kegiatan kesenian lainnya semakin memantapkan kesadaran gerakan pengamen. Gerakan pengamen menyadari benar potensi kekuatan yang mereka miliki seperti potensi kesenian musik.

Ketika terjadi proses pergantian kekuasaan dimana ruang kebebasan lebih terbuka, organ gerakan pengamen sudah memiliki kesiapan sebagai bagian dari kekuatan gerakan sosial, khususnya di DIY. Setiap pembentukan aliansi ataupun koalisi antara organ gerakan, keberadaan gerakan pengamen telah menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Hampir semua aksi-aksi turun kejalan, apakah itu dilakukan oleh Mahasiswa, Buruh, Tani, dan NGO umumnya melibatkan pengamen, baik sebagai bagian dari komite aksi ataupun sebatas kekuatan solidaritas antara kekuatan gerakan.

Keuntungan mobilitas telah menjadikan kekuatan pengamen mampu membangun jaringan dengan kekuatan pengamen lainnya di beberapa kota-kota besar di Indonesia, seperti yang terlihat pada jaringan kota yang dimiliki SPI dan KPJ. Sedangkan TAABAH memang usiannya masih relatif baru, tapi upaya membangun jaringan pengamen juga mulai dilakukan dan itu tidak sebatas kota-kota besar di Jawa, jaringan gerakan pengamen juga mulai menggarap daerah-daerah luar Jawa.

Pengaruh dialektika antar gerakan sosial telah memberikan proses pematangan bagi gerakan pengamen. Kematangan gerakan pengamen terlihat dari kemampuan mereka untuk mempertahankan kontinuitas organisasi dan jaringan gerakannya, sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan untuk saat ini justru kekuatan gerakan pengamen lebih memiliki kesiapan dalam mempertahankan keberlangsungan organisasi dan jaringannya dibandingkan dengan gerakan mahasiswa yang terkadang sangat cair, karena ikatan almamaterian yang masih kental.

Bagaimanapun dialektika antar gerakan sosial harusnya memiliki peran penting dalam setiap kemunculannya, karena upaya melakukan “*counter-hegemony*” terhadap kekuatan yang menindas dibutuhkan apa yang oleh konsep Gramsci tentang “nasional-kerakyatan”. Suatu kelas bisa meraih kepemimpinan nasional dan menjadi hegemonik, jika kelas itu hanya membatasi pada kepentingan mereka sendiri. Mereka harus memperhatikan tuntutan dan perjuangan rakyat yang tidak memiliki karakter kelas yang bersifat murni, yakni yang tidak muncul secara langsung dari hubungan-hubungan produksi, seperti perjuangan-perjuangan radikal rakyat bagi kebebasan sipil, gerakan-gerakan pembebasan

nasional, gerakan perempuan, gerakan perdamaian,<sup>63</sup> dan gerakan lingkungan.

Sebagai catatan tambahan gerakan pengamen dalam terminologi Gramsci menjadi bagian dari gerakan rakyat yang tidak memiliki karakter jelas yang bersifat murni, karena kelompok pengamen bukan kelas yang lahir secara langsung dari hubungan-hubungan produksi. Memutuskan perhatian pada cara orang menyesuaikan diri dengan lingkungan fisiknya, dimana hubungan-hubungan sosial yang muncul dari penyesuaian ini dan tunduknya aspek-aspek kenyataan sosial dan budaya pada asas ekonomi, bukan pada ide-ide yang dominan yang ada pada masyarakat.

Dalam wacana dimana faktor ekonomi sebagai penentu inilah Marx menegaskan bahwa keberadaan status sosial juga muncul dari adanya perbedaan dalam akses dan kepemilikan alat-alat produksi. Dan kemudian memunculkan kelas pemilik alat produksi (modal), atau kelas borjuis kapitalis, melakukan eksploitasi terhadap kelas proletar (buruh), yang di sebabkan tidak terjadinya peluang dan kesempatan yang sama dalam proses produksi, ditambah dengan sifat dan watak kelas borjuis kapitalis yang serakah dan tamak, memunculkan kondisi-kondisi eksploitasi dan penindasan terhadap kelas proletar yang ada. Hal inilah kemudian memunculkan dua kelas yang berdiri vis a vis secara diametral (munculnya kelas).

Weber juga mengakui pentingnya stratifikasi ekonomi sebagai dasar yang fundamental untuk kelas. Bagi Weber, kelas sosial terdiri dari mereka semua yang memiliki kesempatan hidup yang sama dalam bidang ekonomi. Weber melengkapi pembahasan tentang 'kelas' baru bisa

---

63 Robert Mirel., "Teori Pergerakan Sosial", Insis Press, Yogyakarta, Maret 2004, hal. 63

dibicarakan apabila (1) sejumlah orang sama-sama memiliki suatu komponen tertentu yang merupakan sumber dalam kesempatan-kesempatan hidup mereka, sejauh (2) komponen itu secara eksklusif tercermin dalam kepentingan ekonomi berupa pemilikan benda-benda dan kesempatan-kesempatan untuk memperoleh pendapatan, dan (3) hal itu terlihat dalam kondisi-kondisi komoditi atau pasar tenaga kerja.

Butir terakhir ini menjelaskan bahwa kelas-kelas sosial berlandaskan pada dasar stratifikasi yang bersifat impersonal dan obyektif. Para anggota dari kelas yang sama mungkin menjadi sadar akan kepentingan mereka bersama dalam bidang ekonomi dan terlibat dalam tindakan ekonomi atau politik yang terorganisir untuk kesadaran kelas, seperti di kemukakan Marx dalam pandangannya mengenai kelas atau kesadaran kelas. Apakah kesadaran subyektif mengenai kepentingan kelas atau kesadaran kelas ada atau tidak ada, posisi kelas ditentukan (menurut Marx dan Weber oleh kriteria obyektif yang berhubungan dengan kesempatan-kesempatan hidup dalam dunia ekonomi).

Akan tetapi sekalipun Weber mengakui faktor ekonomi menjadi faktor yang penting dalam melihat dasar munculnya kelas, bukan berarti faktor ekonomi menjadi faktor deterministik (sebagaimana pendapat Marx), dalam kaitannya dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Interelasi sosial itu bisa juga terbangun dari faktor budaya, agama, politik, atau bahkan faktor yang didasarkan pada ikatan primordialisme.

Orang juga digolongkan pada lapisan-lapisan berdasarkan kehormatan atau prestise, seperti yang dinyatakan dalam gaya hidup bersama. Hasilnya adalah pengaturan orang dalam kelompok-kelompok status. Marx tidak mengupas dimensi stratifikasi ini secara khusus, tetapi perspektif Marxis akan



melihat status ini sebagai cerminan belaka dari kepentingan ekonomi dan kesadaran kelas. Weber tidak sependapat dengan mengemukakan bahwa stratifikasi menurut status secara analitis berbeda dari stratifikasi menurut ekonomi. Meskipun posisi kelas ekonomi dan kedudukan status mencerminkan dinamikanya sendiri, dan orang yang secara ekonomis dominan, mungkin dengan sengaja berusaha dengan berbagai cara yang berbeda untuk meningkatkan prestisenya.

Weber merevisi teori kelas Marx dalam tiga aspek penting. Pertama, meskipun menerima gagasan Marx mengenai kelas sebagai suatu kategori utama dalam jaringan hubungan tersebut yang oleh Marx dikatakan membawahi hubungan sosio-kultural dan politik di masyarakat. “Kelompok-kelompok status” (istilah yang kurang lebih setara dengan gagasan kesadaran kelas yang dikemukakan oleh Marx) serta “pengelompokan politik” (konsep yang setara dengan gagasan tindakan kelas dari Marx) merupakan kategori-kategori yang berdiri sendiri, sejajar, dan tidak berada di bawah dominasi ekonomi, karena masing-masing memiliki aturan dan logika perkembangannya sendiri. Singkatnya, Weber menolak perpisahan ekonomi dari aspek budaya dan politik di masyarakat. Dalam mengkaitkan kelas sebagai suatu fenomena pasar (secara spesifik, peluang atau akses sebagai produk yang dapat di pasarkan), Weber justru mempertanyakan kemungkinan penentuan secara apriori konflik kepentingan yang dimunculkan oleh pasar yang oleh Marx diyakini memainkan peran sentral.

## BAB 6

# ALIANSI DENGAN GERAKAN SOSIAL

Menghadirkan konsep aliansi atau keterkaitan antar kekuatan gerakan sosial memiliki jurang perspektif sosiologis atas penjelasan dari keberangkatan pembentukan sebuah aliansi. Perspektif teori Marxis ortodok jelas menempatkan buruh sebagai inti kelas revolusioner. Konsekuensi dari deterministik kekuatan inti kelas pada kekuatan buruh memberikan konsekuensi bagi institusionalisasi aliansi sebatas pada lingkup kelas buruh, bukan pada kelas atau kelompok sektoral lainnya, yang dituduh tidak memiliki watak kelas yang sesungguhnya sebagaimana kelas buruh. Perspektif Marxis ortodok lahir atas bangunan ekonomistik, dimana ekonomi determinan sebagai infrastruktur yang menentukan konstruksi suprastruktur sosial, politik, budaya dan bidang kehidupan lainnya.

Deterministik ekonomi telah membagi kelas secara sederhana kedalam dua kelas yang berhadap-hadapan,

yakni kelas kapitalis atau pemodal dengan kelas buruh atau proletar. Sekalipun yang perlu diberikan catatan bahwa garis hubungan antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja bukanlah garis konfliktual yang meniadakan salah satu diantaranya, tapi justru hubungannya adalah fungsional. Dijelaskan oleh Susetiawan bahwa hubungan-hubungan produksi adalah hubungan-hubungan yang melibatkan semua pihak dalam aktivitas-aktivitas produksi. Hubungan-hubungan tersebut tersebut terbentuk dari kepemilikan ekonomis atas kekuatan produktif dimana para kapitalis memiliki alat produksi, sementara para buruh hanya memiliki tenaga kerja mereka. Adapun hubungan konfliktual antara keduanya dipengaruhi oleh akar kepentingan yang berbeda. Para kapitalis, di satu sisi, berusaha memaksimalkan profit, sementara para buruh berupaya memperbaiki upah serta kondisi-kondisi kerja.

Perspektif Marx yang menempatkan deterministik ekonomi di atas, telah menempatkan buruh sebagai “*central class*” bagi proses perubahan. Karena itu bagi Marx tidak melihat arti penting aliansi co-eksistensi antar kekuatan perubahan dan itu yang dikritik oleh perspektif “*overdeterminan*” Gramsci. dalam konteks perdebatan tentang pemikiran dialektis. Mereka berpendapat bahwa overdeterminasi, sebagaimana dilawankan dengan determinasi dan determinisme, menentang segala bentuk reduksionisme atau esensialisme. Overdeterminasi adalah penolakan atas segala peranggapan bahwa kompleksitas dapat diturunkan kepada penyederhanaan bentuk sebab dan akibat. Sebaliknya overdeterminasi beranggapan bahwa setiap unsur dalam konteks kejadian apa pun memainkan peran tersendiri dalam penentuan kejadian itu. Setiap sebab adalah sebab itu sendiri dan juga akibat, demikian sebaliknya. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang menjadi esensi dari sesuatu,

atau dengan kata lain tidak ada pernyataan bahwa sesuatu “lebih” atau “kurang” ditentukan oleh suatu proses tertentu dalam masyarakat.

Konsep overdeterminan Gramsci lebih tepat dalam melihat aliansi gerakan pengamen dengan gerakan sosial lainnya. Ditegaskan oleh Gramsci bahwa suatu kelas bisa meraih kepemimpinan nasional dan menjadi hegemonik, jika kelas itu hanya membatasi pada kepentingan mereka sendiri. Mereka harus memperhatikan tuntutan dan perjuangan rakyat yang tidak memiliki karakter kelas yang bersifat murni, yakni tidak muncul secara langsung dari hubungan-hubungan produksi. Titik tekan dari bisa berlangsungnya hubungan antar kekuatan gerakan sosial dari perspektif overdeterminan adalah ketika antar kekuatan mampu membangun aliansi antar kekuatan gerakan.

## **A. Pentingnya Aliansi**

Untuk melakukan counter hegemoni atas sistem dan struktur memerlukan penyatuan berbagai kekuatan sosial yang berbeda kedalam sebuah aliansi yang luas yang mengungkapkannya kehendak kolektif semua rakyat. Sehingga masing-masing kekuatan ini bisa mempertahankan otonominya sendiri dan memberikan sumbangan dalam gerak maju perubahan sosial yang lebih memberikan nilai keadilan bagi kesemuaan sektor rakyat, termasuk dalam hal ini sektor kaum miskin kota yang selama ini banyak termarginalkan dalam proses pembangunan.

Problem besar yang dihadapi oleh kekuatan gerakan sosial di Indonesia saat ini adalah bagaimana terjadinya fragmentasi antar organ gerakan kedalam kelompok-kelompok kecil dengan isu dan metode gerakan yang berbeda dan terkadang antara kekuatan terjadi proses kontradiktif

dan bahkan meniadakan antara kekuatan sektoral yang ada. Sepertinya perubahan akan terjadi hanya dengan kekuatan sektornya sendiri, padahal kenyataan yang terjadi justru banyak langkah mundur dan pembonsaian diri atas visi gerakan yang ingin dibangun. Fragmentasi kekuatan gerakan bukan semata antar sektoral buruh, tani, kaum miskin kota dan sektor lainnya, akan tetapi di dalam internal sektor yang ada juga terjadi fragmentasi. Implikasinya adalah kekuatan gerakan tidak memiliki cukup kemampuan untuk melakukan resistensi atas sistem dan struktur dominan yang sedang berjalan.

Kenyataan atas kondisi lemahnya kekuatan gerakan sosial karena kuatnya fragmentasi antara organ ini sebenarnya sudah sejak lama disadari. Tetapi semangat sektarian masih belum bisa dilepaskan sepenuhnya, sehingga walaupun terjadi aliansi itu masih bergerak pada aliansi yang sangat taktis dan sebatas momentum isu dan persoalan yang muncul. Perluasan front perjuangan yang terbangun dari aliansi strategis antara kekuatan sektoral belum banyak bisa dilakukan. Memang kebutuhan untuk melakukan aliansi strategis membutuhkan beberapa prasyarat pokok, seperti kesiapan mental para aktivis gerakan, daya dukung organisasi dan kematangan ideologi gerakan, sudah tentu juga supporting pendanaan. Semangan voluntirisme pelaku gerakan sosial di Indonesia masih lemah, sehingga tidak jarang kekuatan-kekuatan gerakan terjebak pada lingkaran pragmatisme akses ekonomi, politik dan eksistensi bagi pribadi dan kelompoknya. Kondisi ini telah memunculkan tingkat kecurigaan yang tinggi antar kekuatan gerakan, sehingga aliansi strategis menjadi sangat sulit dilakukan.

Wacana kesadaran akan arti pentingnya aliansi strategis untuk melakukan sinergisitas antar kekuatan gerakan sosial,

masih banyak berada pada level diskusi wacana. Kesadaran akan pentingnya melakukan aliansi juga sangat disadari oleh gerakan pengamen, karena analisis atas persoalan mendasar disemua sektor rakyat problem dasarnya sama, yakni adanya struktur dan sistem yang menempatkan rakyat pada posisi untuk tetap lemah dan miskin. Analisis yang dikembangkan oleh gerakan pengamen memahami bahwa penyebab dari persoalan mendasar disemua sektor rakyat adalah kekuatan kapitalisme atau pemodal yang berkolaborasi dengan kekuatan birokrasi negara dan menempatkan rakyat pada posisi yang lemah dan dikalahkan. SPI tetap meyakini bahwa birokrasi pemerintah hanyalah sebagai alat kelas dominan, karena itu apapun kebijakan yang dilahirkan akan selalu merugikan rakyat. Karena itu agenda perlawanan tetap harus dilakukan.

Untuk melakukan perlawanan atas kekuatan dominan yang didukung oleh kekuatan sistem dan struktur yang ada membutuhkan kekuatan aliansi antara organisasi gerakan yang juga harus kuat. Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa problem mendasar yang dialami oleh sektoral rakyat adalah sama, persoalannya hanya perbedaan wilayah semata. Gambaran atas kesamaan persoalan yang dihadapi oleh rakyat ini berkaitan dengan pentingnya melakukan aliansi dan aksi bersama.

Gerakan pengamen memang cukup aktif terlibat kedalam aliansi antara kekuatan gerakan sosial, apakah itu bentuknya aksi solidaritas, program advokasi bersama, sampai dengan terlibat dalam komite gerakan, apakah itu dengan organ Tani, Buruh, Mahasiswa, NGO dan kaum miskin kota sendiri, seperti pekerja Parkiran, Pedagang kaki Lima. Berkaitan dengan strategi aliansi yang dilakukan gerakan pengamen belum memiliki kesamaan format, hal ini terjadi karena

pemahaman atas basis aliansi masih terjadi perbedaan seperti yang terlihat dari strategi aliansi yang dilakukan oleh SPI dan TAABAH.

Konsekwensi dari perbedaan basis aliansi menempatkan SPI dan TAABAH yang secara spesifik berbeda. SPI tidak menempatkan diri secara spesifik pada basis sektoral kaum miskin kota, karena itu aliansi yang dilakukan tidak menekankan semata pada issue-issue sektoral, telah menjadikan SPI lebih terbuka dalam membangun aliansi dengan kekuatan termasuk dalam hal ini dengan kekuatan partai politik, karena itu SPI memaknai arti penting aliansi pada konteks perluasan front perlawanan. Sedangkan TAABAH memiliki dua bentuk klasifikasi aliansi, yakni aliansi strategis dan aliansi taktis. Aliansi strategis dipahami sebagai kekuatan sektoral yang secara langsung mengalami persoalan, dalam hal ini kaum miskin kota, sedangkan aliansi taktis adalah aliansi dengan kekuatan diluar sektor kaum miskin kota, seperti gerakan mahasiswa, buruh, tani, NGO's dan gerakan sosial lainnya.

Klasifikasi ini dilakukan TAABAH karena juga berangkat dari sulitnya menemukan persamaan dalam hal issue dan tuntutan dengan kekuatan gerakan diluar kekuatan kaum miskin kota, sehingga menjadi tidak mungkin untuk melakukan aliansi, khususnya aliansi strategis dengan kekuatan yang secara tidak langsung mengalami persoalan sebagaimana kaum miskin kota. Ada prioritas yang coba dikedepankan oleh TAABAH dalam melakukan aliansi, dengan tetap melihat kesiapan dan kapasitas internal organisasi dalam merespon kebutuhan aliansi.

## **B. Rasionalitas Kawan atau Lawan**

Perbedaan basis aliansi antara SPI dan TAABAH akan terlihat dari keanggotaan organisasi aliansi strategis.

SPI memiliki aliansi strategisnya melalui jaringan Front Perjuangan Rakyat Miskin (FPRM), yang didalamnya ada Partai Rakyat Demokratik (PRD), Liga Mahasiswa Demokratik (LMD), JAKER, LSK dan Taring Padi (TP) yang didalamnya banyak mahasiswa ISI. Sedangkan TAABAH tetap dengan kekuatan Jaringan Gabungan Kaum Jalanan Merdeka (GKJM), yang didalamnya ada Komunitas Progresif (KOMPE), Komunitas Marginal (KOMA), Seni Perlawanan Untuk Rakyat (SEPUR) dan TAABAH sendiri.

Untuk mengungkap kecenderungan arah gerakan pengamen dari keanggotan aliannya, memang belum cukup untuk menarik kesimpulan mendasar dari perbedaan yang ada di dalam gerakan pengamen. Karena sifat dari jaringan aliansi bersifat rumit dan sering terjadi discontinuitas antar pilihan keanggotaan aliansi. Misalnya penyikapan terhadap keberadaan NGO dan Partai Politik, antara TAABAH dan SPI terjadi perbedaan persepsi. TAABAH memiliki tingkat kelonggaran untuk melakukan aliansi dengan kekuatan NGO, akan tetapi tidak untuk SPI yang justru lebih melihat NGO sebagai kekuatan yang justru sering memanfaatkan keberadaan kaum miskin kota dalam kepentingan-kepentingan pragmatis pelaksanaan proyek, NGO dipahami bukan pada posisi membantu tapi justru memanfaatkan keberadaan kaum miskin kota, berbeda dengan TAABAH justru banyak terlibat dalam kerja-kerja NGO, salah satunya dengan terlibat dalam jaringan Up Link yang dipimpin Wardah Hafiz, NGO yang aktif mengangkat persoalan-persoalan perkotaan. Berkaitan dengan penyikapan aliansi dengan Partai Politik, telah menempatkan TAABAH dan SPI pada posisi yang berbeda. TAABAH memiliki sensitifitas ketidakpercayaan yang tinggi terhadap keberadaan partai politik.



Akan sangat berbeda dengan apa yang menjadi sikap SPI terhadap keberadaan partai politik, yang justru melihat kekuatan partai politik sebagai kekuatan yang harus dimasuki. Tesis awal dari pola perjuangan yang dilakukan SPI dengan dua pola gerakan, yakni gerakan politik yang dimaksudkan sebagai upaya merebut kekuasaan, sehingga perjuangan bisa berjalan efektif dan gerakan sosial yang diorientasikan bagi upaya penguatan basis massa. Rasionalisasi dari metode gerakan yang dilakukan oleh SPI menempatkan posisi partai politik sebagai kekuatan aliansi strategis dalam mendorong proses perubahan.

Satu langkah maju dari gerakan pengamen dalam melakukan aliansi tetap menempatkan kesadaran kritis terhadap setiap keterlibatan dalam keanggotaan aliansi dengan menempatkan kepentingan organisasi gerakan pengamen sebagai acuan atau parameter dalam memutuskan untuk terlibat atau tidak dalam sebuah aliansi. Artinya garis kepentingan organisasi tetap menjadi centrum dalam mengambil keputusan melakukan aliansi.

Kesadaran kritis terhadap kebutuhan aliansi yang dilakukan oleh gerakan pengamen, dikatakan sebagai sebuah langkah maju. Sebuah aliansi harus disadari sebagai perwujudan dari pertemuan irisan kepentingan antar partisipan yang terlibat dalam aliansi. Ketika gerakan pengamen mampu memahami irisan kepentingan yang bisa diambil dalam sebuah aliansi akan menghindari gerakan pengamen dari sekedar sebagai obyek eksploitasi dari kepentingan yang bermain dalam sebuah aliansi.

Kemampuan pembacaan atas kepentingan dalam sebuah aliansi yang dimiliki oleh gerakan pengamen merupakan langkah maju bagi keberadaan pengamen sebagai bagian dari kekuatan gerakan sosial di Indonesia. Dalam melakukan

aliansi gerakan pengamen tetap melihat pemerintah sebagai sumber persoalan yang harus dilawan, sehingga rasionalisasi dalam penentuan kawan dan lawan aliansi menempatkan keberadaan rumah singgah-rumah singgah yang sebenarnya merupakan bagian dari organisasi kaum miskin kota sebagai lawan. Hal ini dilakukan karena keberadaan Rumah Singgah dianggap sebagai antek-anteknya pemerintah yang keberadaannya justru dipandang melakukan pembodohan terhadap kaum miskin kota, sehingga kaum miskin kota tidak menyadari ketidakadilan yang dialaminya. Dan sering-sering Rumah Singgah dijadikan sebagai organisasi yang dijadikan sebagai alat legitimasi bagi pemerintah dalam merumuskan dan menjalankan program-program yang berkaitan dengan kaum jalanan, sehingga tidak jarang berimplikasi pada upaya membenturkan kekuatan antar kaum jalanan sendiri. Pada kondisi ini menempatkan SPI dan TAABAH melihat keberadaan Rumah Singgah sebagai lawan, yang dalam konteks kebutuhan aliansi bukan sebagai kawan.

### **C. Bermain di Antara Kepentingan**

Melakukan aliansi menuntut kesiapan untuk bermain di antara kepentingan antar kekuatan yang ada dalam aliansi dan gerakan pengamen mampu memainkan posisi diantara aliansi yang ada, sehingga gerakan yang dilakukan oleh pengamen menjadi sebuah gerakan yang rasional dan terkalkulasi. Apa yang dilakukan oleh gerakan pengamen dalam melakukan aliansi, menunjukkan kemampuan pengamen untuk keluar dari dua perspektif teori gerakan yang diusung oleh James C. Scott dan Popkin. Dalam studi gerakan petani, Scott menunjukkan bagaimana sebuah gerakan tidak sebatas dipahami pada lingkup organisasi dan program aksi yang dilakukan, akan tetapi bisa dilihat

pada perlawanan keseharian yang dilakukan petani, ketika berhadapan dengan hegemoni kaum kaya maupun negara, dengan melakukan pura-pura menurut, pura-pura tidak tahu, masa bodoh dan aktifitas lainnya yang ditujukan sebagai upaya pembakangan dan dalam melakukan perlawanan petani tidak harus melibatkan organisasi. Berbeda dengan gerakan pengamen, dengan kekuatan organisasi mampu melakukan akumulasi sumber daya dalam memperkuat basis internal organisasinya, dan itu dilakukan dalam aktifitas aliansi yang dengan kekuatan gerakan lainnya, seperti yang dilakukan oleh TAABAH, yang secara organisasi tidak memiliki cukup kemampuan pendanaan dan kekuatan sumber daya manusia dalam melakukan kaderisasi, dijawab dengan melakukan aliansi dengan kekuatan NGO, dan dengan aliansi yang dilakukan dua kepentingan organisasi dapat diakses, yakni kepentingan pendanaan dan pendidikan bagi kadernya. Sekalipun pada levelan issue dan tuntutan jarang ketemu dengan organ gerakan sosial, akan tetapi aliansi taktis tetap dilakukan oleh TAABAH, karena dari aliansi taktis banyak hal yang bisa diambil, seperti aliansi dengan kalangan NGO's itu banyak hal yang bisa di akses.

TAABAH sebagai salah satu organ gerakan pengamen tahu persis atas kepentingan NGO, dan karena itu pembacaan atas kepentingan yang ada mampu dibaca dan diambil sebagai upaya mobilisasi sumber daya untuk kepentingan organisasi. Tesis Popkin yang lebih melihat bahwa gerakan lahir sebagai kalkulasi individu atas akses ekonomi politik, yang ditunjukkan oleh Popkin dalam keberadaan "*free-riders*" di desa, yaitu orang-orang yang tidak mau bekerjasama, akan tetapi menikmati hasil-hasil kerja kolektif. Yang berperan dalam perubahan di desa bukanlah kolektivitas penghuni desa, melainkan pribadi para petani itu sendiri. Petani

tradisional didominasi oleh motivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bukan kelompok. Gerakan pengamen mampu mengedepankan kepentingan organisasi sebagai basis kepentingan akumulasi sumberdaya. Sebelum sebuah aliansi dilakukan, gerakan pengamen biasanya akan melakukan kalkulasi atas kepentingan organisasinya. Yang dilakukan SPI sebelum memutuskan terlibat atau mendorong munculnya aliansi, maka ada mekanisme pembahasan di tingkat internal organisasi untuk membahas kepentingan yang bisa diambil, kalau sekiranya dalam kalkulasi organisasi pengamen hanya dijadikan sebagai obyek eksploitasi dan organisasi tidak memiliki kekuatan untuk bergainig, maka aliansi tidak perlu dilakukan. SPI dalam melakukan aliansi selalu mencoba untuk memenangkan sebuah tuntutan isu dalam aliansi yang akan dibentuk, upaya bargaining posisi menjadi hal yang harus dilakukan untuk tidak dijadikan sekedar obyek eksploitasi oleh kepentingan yang ada dalam sebuah aliansi.

#### **D. Polarisasi Gerakan Pengamen**

Sekalipun gerakan pengamen dalam kaitan dengan aliansi sudah memiliki tingkat kesadaran dalam melakukan kalkulasi dan mampu melakukan mobilisasi sumber daya dengan aliansi yang dilakukan, akan tetapi bangunan besar dari capaian strategis kedepan dari aliansi yang dilakukan belum menunjukkan arah maju gerakan pengamen kedepan mau melakukan apa. Hal ini perlu dimunculkan karena sebuah aliansi merupakan refleksi dari kesadaran atas capaian strategis gerakan pengamen kedepan. Kalau capaian strategis tidak menjadi bagian yang muncul dari aliansi yang dilakukan, maka meminjam istilah Clifford Gert yang terjadi justru kondisi “involusi” dalam gerakan pengamen. Aktifitas

aliansi menjadi program yang berulang, tapi ia kehilangan orientasi yang ingin dicapai, tidak semata capaian jangka pendek dan kepentingan pragmatis organisasi, tapi dalam sebuah aliansi juga menjadi refleksi atas tujuan strategis yang ingin di bangun.

Problem besar yang juga dialami oleh gerakan sosial di Indonesia adalah belum menemukan format aliansi antar sektoral dan kekuatan gerakan. Selama ini masih didominasi oleh bentuk-bentuk aliansi yang sangat taktis dan pragmatis pada respon isu-isu yang muncul, sehingga yang nampak adalah terjadi diskontinuitas gerak perubahan yang ingin dicapai. Catatan kritis yang disampaikan Gramsci tentang adanya kekuatan sipil yang mampu melakukan “*counter discourse*” terhadap dominasi struktur dan sistem membutuhkan perluasan front aliansi yang tidak melulu terpukau pada kelas yang muncul dari hubungan-hubungan produksi semata, akan tetapi aliansi harus dibangun dari lintas kelas, sektoral dan kelompok-kelompok kekuatan sipil.

Agenda perjuangan bagi kebebasan, kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat membutuhkan aliansi strategis lintas kelas, sektoral dan kelompok. Ditekankan Gramsci dengan tujuan kalau upaya melakukan conter discourse tidak didukung oleh kekuatan aliansi besar dari masyarakat sipil, maka agenda perjuangan akan menjadi sia-sia, karena kekuatan yang sedang dihadapi memiliki kekuatan yang sangat terorganisir.

Musuh mereka bukan lantaran musuh menjalankan tindakan kekerasan, tetapi musuh mempunyai kekuasaan tertentu. Dan kekuasaan ini juga tidak berasal dari tempat berlangsungnya hubungan produksi, tetapi kekuasaan itu merupakan buah dari bentuk organisasi yang khas dari masyarakat masa sekarang. Jelas masyarakat ini bersifat kapitalis, namun ini bukan satu-satunya karakter masyarakat

itu, masyarakat juga bersifat seksis dan patriakis, untuk tidak menyebut rasial.<sup>64</sup>

Karena itu, gerakan pengamen khususnya tidak dapat direduksi menjadi semata perjuangan sektoral kaum miskin kota. Artinya disini dalam aliansi dibutuhkan aliansi strategis, yang keberangkatannya tidak semata kepentingan sektoral, karena perjuangan meraih kepemimpinan yang berasal dari aspirasi masyarakat yang bersifat demokratis-kerakyatan dan non-kelas serta lintas sektoral merupakan bagian penting dari persaingan meraih hegemoni antara kelas proletar dan kelas kapitalis.

Aspirasi ini dan gerakan yang memperjuangkan aspirasi tersebut, merupakan media politik yang diperebutkan oleh dua kelas besar yang bersaing meraih hegemoni. Jika gerakan pengamen ingin meraih hegemoni, mereka perlu terus membangun jaringan aliansi dengan gerakan-gerakan sosial lainnya. Proses pembangunan aliansi ini merupakan bagian terpenting dari apa yang disebut Gramsci sebagai “perang posisi”. Perang posisi hanya bisa dimenangkan ketika kekuatan gerakan sosial mampu membangun aliansi dimana terjadi penggabungan kekuatan nasional-kerakyatan. Di sini nasional kerakyatan diterjemahkan sebagai penyatuan berbagai perjuangan dan gerakan dalam satu front perlawanan.

Beberapa catatan Gramsci menjadi titik balik atas aliansi yang dilakukan oleh gerakan pengamen yang memiliki kecenderungan besar kearah terjadinya polarisasi, bukan sinergi gerak. Kenyataan ini berangkat dari kenyataan kedekatan historis antara kekuatan gerakan pengamen dengan kekuatan gerakan sosial masih mejadi parameter dalam melakukan aliansi, bukan pada basis kepentingan

---

64 Roger Simon, Loc Cit., hal. 59

sektoral kaum miskin kota atau pada lingkup yang lebih besar lagi. Kedekatan historis masih menjadi motif yang terlihat dalam keanggotaan aliansi antar organ gerakan pengamen, seperti kenapa SPI beraliansi dengan kekuatan partai politik (PRD), sementara tidak untuk TAABAH. Pengungkapan kenyataan ini terlepas dari argumentasi masing-masing kekuatan organ gerakan pengamen, atas kalkulasi dalam melakukan aliansi dan pengelompokan keanggotaan.

Konsep mengenai housing classes atau pemilihan kelas yang didasarkan pada jenis pasar ini dikembangkan oleh Rex, 1967.<sup>65</sup> Pendapat Weber itu juga berimplikasi bahwa pengaruh pasar dan juga pertentangan kelas bisa saja berubah-ubah tergantung pada struktur dan situasi pasar serta berbagai kondisi di masyarakat yang bersangkutan.

Rumusan Weber mengenai keragaman kelas dan variasi peran pasar, oleh para sosiolog Inggris, dikembangkan lebih lanjut menjadi analisis persepsi diri dari setiap kelas yang melandasi respon mereka terhadap ketimpangan kelas. Model-model teoritis yang muncul dari analisis ini tidak dibatasi oleh kesadaran kelas struktural yang oleh Marx dan kawan-kawan dianggap sebagai kerangka baku bagi munculnya sikap dan pendapat dari kelas yang bersangkutan. Secara empiris model baru tersebut lebih sesuai karena dapat menangkap keragaman ideologi, kebijakan dan tindakan para pekerja. Ada dua rumusan yang perlu di catat disini, salah satu diantaranya dikemukakan oleh W.G.Runcimen (1966)<sup>66</sup> yang melontarkan konsep “deprivasi relatif” (ini setara dengan konsep “keadilan terbelenggu” yang dikemukakan oleh Moore). Menurut model ini, kesadaran

---

65 Zygmunt Bauman., dalam “Eksiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial” accelerator Lyotard, Adam Kuper dan Jessica Kuper., PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 118.

66 Zygmunt Bauman., Op, Cit. Hal. 118

dan kemampuan dari setiap kelas, termasuk yang tertindas tidaklah seragam, demikian pula reaksi mereka terhadap ketimpangan kepemilikan sehingga tidak mungkin mereka bertindak secara runut dan terarah. Analisis mengenai konflik kelas yang agak mirip dikemukakan pula oleh Parkin (1979) yang melansir konsep “ketertutupan” akses bagi sebagian kelas yang hendak mengubah keadaan, khususnya keadaan pasar atau ekonomi yang merugikan mereka. Dalam teori ini dikatakan bahwa kelas yang dominan cenderung menutup peluang terjadinya gejolak agar konflik terbuka antar-kelas dapat dihindari. Jika kita gunakan perspektif di atas maka kemungkinan terjadinya gerakan kaum buruh yang terorganisir dalam memperebutkan distribusi surplus sosial mustahil terjadi dan mungkin dalam hal ini gerakan pengamen sebagai bagian dari kaum proletar kota akan dapat menjadi bagian dari kekuatan perubah pada struktur masyarakat kota yang kapitalistik.

Bagaimana konsep kelas Marx terhadap keberadaan pengamen? Dari beberapa telaah konsep Marx sebagaimana pembahasan terdahulu maka posisi pengamen jelas tidak masuk kedalam dua kelas dominan. Kalaupun pengamen masuk kedalam konsep kelas maka keberadaan pengamen paling mungkin dimasukkan kedalam apa yang Marx sebutkan sebagai kelas lumpenproletariat (proletariat yang tidak laku), yakni kelas yang berada pada posisi dibawah upah buruh proletar dalam suatu masyarakat kapitalis. Dan kelompok kelas lumpen proletarian mencakup pencuri, penjahat dari segala jenis, yang hidup dari remah-remah.



## BAB 7

# MENEGASKAN GERAKAN PENGAMEN SEBAGAI KEKUATAN PERUBAHAN

Tulisan dalam bab ini merupakan kristalisasi dari bab-bab terdahulu, bagaimana memahami kemunculan gerakan pengamen yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam studi gerakan sosial di Indonesia. Kemunculan gerakan pengamen merupakan keniscayaan untuk dilahirkan, karena akar ketidakadilan telah menempatkan mereka pada posisi yang lemah secara struktural dan kultural.

Secara struktural pengamen hampir tidak diakui sebagai bagian dari warga kota yang memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum dan hak publik lainnya. Sedangkan secara kultural profesi pengamen masih menyisakan stereotipe negatif dari masyarakat. Sekalipun pilihan profesi mengamen bukanlah sepenuhnya pilihan, karena keberadaan mereka lebih disebabkan adanya problem pembangunan yang dijalankan oleh negara.

Keberadaan pengamen dengan lagu bertemakan kritik

sosial yang mereka bawakan, menjadi perlambang mereka ada. Karena keberadaan mereka harus diakui sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki hak yang sama sebagai warga negara, karena itu gerakan perlawanan yang mereka lakukan, perlu dipahami sebagai bagian dari kekuatan yang menuntut perubahan tatanan sosial yang lebih berkeadilan. Untuk mewujudkan tatanan sosial yang lebih berkeadilan maka resistensi dan counter hegemoni yang dilakukan oleh kekuatan sipil membutuhkan penyatuan segenap elemen gerakan dan kekuatan front yang diperluas, dimana gerakan pengamen menjadi bagian dari salah satu kekuatan gerakan perubahan.

Banyak kelemahan dari organisasi dan aktivitas gerakan pengamen, akan tetapi titik urgennya adalah gerakan pengamen mampu belajar dari setiap kelemahan yang ada, untuk mampu keluar dari jejaring yang memang membonsai mereka dalam ketersesatan yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun tidak. Sebuah gerakan sosial akan mampu menjadi besar ketika mampu selalu membangun dialektika kritis diantara kesalahan yang ada. Akhirnya kita akan sampai pada pertanyaan atas makna dari studi ini untuk siapa? Kita selalu tidak berharap sebuah studi berhenti pada erotika atau kegenitan pada kerja-kerja akademis. Sebuah studi harus berpihak dan mampu ditransfomasikan bagi proses pencerahan pada kehidupan berikutnya, yang lebih menyentuh selera keadilan atas kesetaraan dari potensi kemanusiaan yang lebih demokratis dan menjunjung nilai-nilai universal hak azasi manusia.

Cacat celah sebuah metode tetap harus diberikan ruang bagi terjadinya discourse, karena sebuah metode dan hasilnya tetap mengandung kelemahan, tinggal bagaimana kesadaran terhadap kelemahan yang dikandung dalam setiap metode

penelitian yang ada, menjadi agenda untuk terus melakukan perbaikan, yang terpenting adalah bagaimana seorang peneliti terus belajar dari setiap cacat yang dikandung oleh pilihan metodologi dengan apa yang dihasilkannya, untuk melakukan kerja yang lebih baik lagi.

## **A. Resistensi Arus Bawah**

Studi tentang gerakan pengamen ini ingin menunjukkan bagaimana pengamen sebagai bagian dari komunitas masyarakat memiliki posisi dan hak yang sama sebagai bagian dari warga negara, akan tetapi sering-sering keberadaan mereka dipandang sebelah mata karena status pekerjaan yang mereka sandang. Padahal apa yang mereka kerjakan bukanlah pekerjaan yang diinginkan, akan tetapi kondisi telah memaksa mereka untuk tetap menjalani kehidupan. Karena itu keberadaan mereka harus dipahami sebagai persoalan struktural dari kebijakan negara yang menempatkan posisi pengamen sebagai pilihan alternatif bagi upaya bertahan hidup (*survival strategi*).

Persoalannya adalah ketika apa yang dipahami sebagai pilihan inipun dianggap mengganggu dan mengurangi keindahan kota, maka pilihan perlawanan menjadi hal yang alamiah untuk terjadi. Untuk melihat kenapa gerakan pengamen muncul dalam melakukan gerakan, dapat dipahami dari latar belakang persoalan yang dihadapi oleh pengamen. Pertama, pada aras struktural jelas pengamen ditempatkan pada posisi yang tidak adil dan terpinggirkan, hanya karena ketiadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah menjadikan pengamen dan kaum miskin kota lainnya kehilangan hak-haknya sebagai warga negara untuk mengakses fasilitas publik, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang layak, sampai dengan

keinginan untuk menikah secara resmi menjadi hal yang sulit untuk dilakukan, bahkan matipun menjadi tidak gampang untuk menguburkannya. Perlindungan dan kenyamanan dari aktivitas yang mereka jalani untuk tidak di garuk oleh aparat negara menjadi rangkaian yang secara struktural menindas, dan memarginalisasi keberadaan pengamen sampai pada batas yang tidak manusiawi. Kedua, pada aras kultural masyarakat dimana streotipe negatif atas keberadaan mereka juga masih tumbuh pada sebagian kelompok masyarakat. Hal ini nampak dari respon plakat-plakat dan striker yang ditempel, misalnya pengamen gratis, pemulung dilarang masuk dan respon negatif lainnya. Apa yang dipahami masyarakat terhadap keberadaan pengamen yang cenderung negatif ini memang tidak berdiri sendiri, karena stereotipe negatif juga tidak lepas dari proses reproduksi dari negara dalam hal ini pemerintah terhadap pemahaman masyarakat, sebagaimana yang dilakukan pemerintah kabupaten Sleman yang secara gencar menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang recehan kepada pengamen. Serta stereotipe lain berupa anggapan kaum jalanan sebagai sumber kriminalitas, telah diakui sebagai kebenaran.

Dari kedua persoalan yang dihadapi oleh pengamen di atas, maka pemahaman umum yang terungkap dari studi tentang gerakan pengamen ini adalah bahwa pengamen melakukan gerakan dilandasi oleh; Pertama, lahir sebagai respon atas kondisi ketidakadilan yang dilakukan negara, dalam hal ini pemerintah terhadap keberadaan mereka. Gerakan yang dilakukan pengamen dipahami sebagai upaya mendapatkan hak-hak mereka sebagai bagian dari warga negara yang memiliki posisi yang sama untuk diakomodasi dalam kebijakan pembangunan, yang selama ini dianggap tidak berpihak. Kedua, Stereotipe atas keberadaan mereka

pada aras *cultural* masyarakat mendorong pengamen untuk melakukan gerakan sebagai upaya mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari masyarakat yang co-eksistensi dengan kelompok masyarakat lainnya. Artinya gerakan yang dilakukan oleh pengamen dipahami juga sebagai salah satu bentuk eksistensi. Bentuk eksistensi disini tidak dipahamai sekedar bentuk pengakuan atas keberadaan mereka, akan tetapi eksistensi memiliki makna strategis bagi perubahan atas kondisi ketidakadilan yang dihadapi oleh pengamen, yang bisa jadi muaranya adalah memperkuat gerakan struktural.

## **B. Menegaskan Diri Meraih Pengakuan**

Kemunculan gerakan pengamen sebagai bagian dari kekuatan gerakan sosial di Indonesia semakin membuka peta kekuatan masyarakat sipil yang memperjuangkan adanya perubahan dalam proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Dua titik penting dari kemunculan gerakan pengamen yang perlu dicatat sebagai tambahan referensi, adalah selain memberikan keuntungan bagi pengakuan eksistensi organisasi pengamen sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil, juga pengakuan terhadap eksistensi mereka sebagai bagian dari warga negara yang harus diberikan ruang yang sama dalam proses perumusan kebijakan publik. Terlebih lagi hal yang menyangkut hajat hidup masyarakat jalanan, tidak seperti selama ini, kebijakan pemerintah seperti kebiasaan yang dilakukan ketika merumuskan kebijakan penanganan kaum jalanan cukup dengan melibatkan rumah singgah-rumah singgah yang nota bene merupakan organisasi di bawah kendali pemerintah.

Keberadaan organisasi-organisasi gerakan pengamen membuka peta baru dari kekuatan masyarakat sipil yang mencoba keluar dari kooptasi negara atas ruang kritis masyarakat. Karena itu negara dalam hal ini aparaturnya pemerintah dituntut untuk lebih

membuka kran dialog partisipatif dengan keberadaan organisasi gerakan pengamen dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga prasyarat sebagaimana Habermas gariskan, hendaknya kebijakan publik memang lahir dari adanya ketegangan dialektis antara “*purposive rational action*” yang lebih menekankan goal dengan “*communicative action*” sebagai kontrol yang membimbing kearah kebijakan publik yang lebih memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penegasan dari keberadaan gerakan pengamen dipahami sebagai anti tesis terhadap dominasi negara yang sering melakukan klaim kebenaran terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

Selain itu, kemunculan gerakan pengamen menjadi kekuatan baru dalam konstelasi gerakan sosial yang ada. Kalau selama ini keberadaan kaum miskin kota, seperti halnya pengamen tidak dihitung sebagai bagian dari kekuatan perubahan, sebagaimana sektor buruh, tani dan kekuatan gerakan sosial seperti mahasiswa, NGO’s serta yang lainnya. Maka kemunculan gerakan pengamen menjadi kekuatan baru yang musti dikalkulasi sebagai bagian dari kekuatan perlawanan terhadap struktur dan sistem dominan yang dikonstruksikan oleh kekuatan kapital yang berkolaborasi dengan kekuatan politik dan menempatkan rakyat pada posisi yang kalah dan dilemahkan. Kehadiran mereka harus diakui sebagai bagian dari kekuatan rakyat, hal ini perlu dilakukan sebagai upaya perluasan front perlawanan, terlebih lagi ketika harus berhadapan dengan kekuatan kapitalis yang semakin hari, semakin menemukan kemapanannya.

### **C. Belajar Dari Kelemahan**

Memang harus diakui bahwa keberadaan organisasi gerakan pengamen saat ini memiliki banyak kelemahan

dan cacat yang dikandungnya ketika melakukan kerja-kerja gerakan, kalau dibandingkan dengan keberadaan kekuatan gerakan sosial lainnya yang memiliki latar historis yang lebih tua dan dukungan infrastruktur yang lebih kuat. Akan tetapi militansi terhadap komitmen perjuangan yang selama ini ditunjukkan oleh gerakan pengamen semakin membuka ruang bagi terjadinya proses perbaikan terhadap kelemahan yang ada.

Dalam kaitan itu, beberapa kelemahan yang dicatat dari keberadaan organisasi pengamen yang selama ini digeluti adalah pada sisi penguatan ekonomi anggota dan organisasi. Persoalan ini menjadi persoalan mendasar karena proses pembusukan dan disorientasi gerakan dimulai dari persoalan ekonomi. Aspek ekonomi di sini dimaksudkan minimal bagi pemenuhan kebutuhan subsisten anggota dari organisasi pengamen. Belajar dari kritik Mc Gee atas ketidakmampuan kaum miskin kota sebagai kekuatan perubahan karena disebabkan kemiskinan yang dialami oleh kaum miskin kota, sehingga berimplikasi pada mudahnya kaum miskin kota untuk dimoderasi dan kemudian dibelokkan arah perjuangannya oleh kekuatan-kekuatan yang merasa terancam oleh keberadaan gerakan kaum miskin kota, atau juga oleh kekuatan yang memiliki kepentingan pragmatis atas keberadaan kaum miskin kota bagi kepentingan atau keuntungan dirinya.

Konsistensi pada isu utama yang diusung gerakan pengamen, memerlukan prioritas dalam penyikapan, karena sering-sering yang mencul adalah aksi-aksi reaksioner terhadap isu-isu yang bermunculan dan bukan merupakan persoalan mendasar yang harus disikapi oleh gerakan pengamen. Akibat jangka panjangnya adalah terciptanya satu kondisi 'invulusi' gerakan, karena terlalu banyak merespon

isu yang sebenarnya terkadang hanya merupakan isu ikutan dari persoalan mendasar yang sesungguhnya terjadi. Kondisi involusi dipahami sebagai suatu kondisi dimana kekuatan gerakan pengamen sudah merasa banyak melakukan aktivitas gerakan, akan tetapi tidak memberikan arti perubahan yang signifikan bagi keberadaan kaum miskin kota.

Tanpa harus mengecilkan arti penting aliansi atau perluasan front bagi gerakan pengamen, akan tetapi persoalan utama keberangkatannya adalah bagaimana penguatan sektoral menjadi basis lokomotif bagi berjalannya kerja-kerja gerakan, seperti halnya aliansi dengan kekuatan gerakan sosial yang ada, karena bagaimanapun pembangunan basis kesadaran di tingkat sektoral akan menjadi salah satu indikator dari berjalannya revolusi sosial dalam arti sempit, untuk menuju revolusi demokratik, yang diterjemahkan dalam konsep Marx tentang kesadaran materi, bahwa upaya perlawanan tidak akan terjadi, kalau orang belum menyadari realitas penindasan yang dialaminya.

Pembangunan kesadaran sektoral memang tidak harus dilihat sebagai sebuah pentahapan yang kaku, karena ia bisa saja berjalan secara dialektis dengan kerja-kerja gerakan yang lainnya, akan tetapi penguatan basis sektoral tetap ditempatkan sebagai persoalan mendasar yang harus dibangun. Proses elitisasi kekuatan gerakan, seperti keberadaan gerakan pengamen bisa jadi dimulai dari tercerabutnya gerakan pengamen dari basis sektoralnya. Kalau itu yang terjadi maka kekuatan gerakan pengamen tidak akan memiliki kekuatan yang berarti bagi upaya pendorong proses perubahan, karena ia hanyalah kekuatan kecil dari sekelompok orang yang memiliki kelebihan dalam kesadaran politik, tapi tidak memiliki garis massa yang terdidik dan terpimpin.



## **D. Apa Yang Dapat Kita Pelajari Dari Studi Ini**

Pelajaran yang mungkin bisa diambil dari studi gerakan pengamen ini adalah bagaimanapun kemunculan gerakan pengamen harus dipahami sebagai respon atas kondisi ketidakadilan yang tercipta dalam proses pembangunan yang dilakukan bangsa ini. Kebijakan pembangunan yang dilakukan selama ini telah menyisakan kesenjangan sosial-ekonomi yang parah ditingkat rakyat. Maraknya penjarahan dan bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh massa rakyat pasca reformasi menjadi penegasan terhadap adanya struktur yang menindas dan menempatkan rakyat pada kondisi tidak ada pilihan selain melakukan kekerasan atas nama tuntutan keadilan. Karena untuk menjelaskan persoalan kekerasan, termasuk dalam hal ini kemunculan gerakan perlawanan yang dilakukan oleh massa rakyat, seharusnya didudukkan pada pemahaman bahwa manusia sebagai agen yang bertindak aktif, tetapi tidak dalam ruang dan waktu yang vacuum. Manusia bertindak secara aktif dalam ruang dan waktu yang konstitutif. Oleh karena itu, memahami tindakan kekerasan dan gerakan perlawanan yang muncul haruslah dikaitkan dengan ruang waktu yang melatar belakanginya.

Realitas kemunculan gerakan pengamen, dipahami sebagai keniscayaan untuk terjadi. Dikemukakan oleh Anthony Giddens dengan konsep teori strukturasinya, bahwa realitas merupakan produk sebuah interrelasi ruang waktu yang di dalamnya berlangsung berbagai faktor pembentuk interaksi sosial. Tindakan tidak bisa dipahami semata-mata melalui pengenalan akan motif, intensi atau maksud dan tujuan tindakan itu sendiri. Perilaku atau tindakan seseorang justru harus dilihat dalam proses dan alur tindakan yang dikaitkan dengan “Time and Space”, yang melatari keberadaan

struktur sosial. Struktur meliputi aspek-aspek non-temporal dan non-spatial, juga sebagai wujud pengelolaan berbagai proses produksi dan reproduksi dalam interaksi sosial, baik sebagai medium maupun sebagai produk interaksi itu sendiri. Tindakan subjektif dan struktur ruang waktu bukan dualisme atau terpisah satu sama lain, melainkan berada pada jalinan dualitas yang saling berhubungan dan saling membentuk. Disebut dualitas struktur karena struktur itu merupakan medium sekaligus hasil tindakan reproduksi. Struktur juga masuk dan hidup di dalam agen dan tindakan sosial.<sup>67</sup>

Perspektif strukturasi Giddens di atas sekaligus menjelaskan bagaimana stereotipe negatif yang muncul di benak kesadaran masyarakat terhadap keberadaan pengamen, yang tidak lepas juga dari terjadinya reproduksi oleh kekuatan struktur yang sedang berlangsung, karena itu pelajaran yang bisa ditarik dari studi ini adalah bagaimana setiap ketidakadilan akan melahirkan perlawanan. Sama persis ketika banyak orang takut terhadap hantu komunis, akan tetapi menutup mata terhadap adanya struktur ketidakadilan berlangsung. Karena itu kemunculan gerakan pengamen sebagai antitesis dari adanya struktur ketidakadilan yang terjadi baik pada aras negara, maupun pada aras kultural masyarakat. Sehingga tidak boleh orang atau kelompok diperlakukan diskriminatif karena pekerjaan yang dilakukan dianggap tidak layak secara umum, karena setiap orang punya hak untuk dilindungi guna memenuhi kebutuhan subsistensi dan diberikan ruang hidup bagi semua orang tanpa kecuali.

---

67 Anthony Giddens., "The conctitution of Society: Outline of the Theory of Structuration", Cambridge, Polity Press, 1995, hal. 1-8

## DAFTAR PUSTAKA

- Allen, De, Guy, R. F.,C.K.,. “Sosial psychology As Sosial Process”, Wadworth Inc, 1980, California.
- Arief Budiman., dalam “Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial”, Ismid Hadad (ed.), LP3ES, Jakarta, 1979.
- Basrowi dan Sukidin., “Teori-teori Perlawanan”, Insan Cendikiawan, Surabaya, 2003.
- Bauman., Zygmunt, dalam “Eksiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial” accelerator Lyotard, Adam Kuper dan Jessica Kuper., PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Broom, Leonard “Sociology a text with adapted readings”, harper and row pubs, New York, 1981.
- Budaya bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Bulletin DEBU (Gerak Budaya Menuju Demokrasi), Edisi November 2001, diterbitkan oleh Srikat Pengamen Indonesia (SPI).
- Cet. IV, tahun 1991.
- Chaplin., D, James, “ Dictionary of Psychology” Dell Publising In. Co., New York. 1981.
- Cook, K. S., Fine, G.A., House, J.S. 1995 “Sosiological

- Perspectives On Sosial Psychology”. Allen End Bacon, Massalhusset.
- D.E., Allen, R.F., C.K. Guy, “Sosial Psychology As Sosial Process”, Wadworth Inc. California, 1980.
- D.N. Aidit, “Kumpulan Ceramah Tentang Marxisme”, Diterbitkan oleh Akademi Ilmu Sosial Aliarcham, Jakarta, cet. III, Agustus, 1996
- DN. Aidit, “Seni dan Sastra”, Oesaha Terbitan Radja Minjak, 2002.
- Duverger., Maurice, “Sosiologi Politik”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. IX, 2002.
- Edy Yusuf Nur Samsu Santoso, “Amuk Massa”, Alief Perss, Yogyakarta,
- Etzioni., Amitae, “Organisasi-organisasi Moderen”, Penerbit Universitas Indonesia dan Pustaka Bradjaguna, bekerjasama dengan Akademi Wiraswasta Dewantara, Jakarta, 1982.
- Franz Magnis Suseno, “Pemikiran Karl Marx, dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme”, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- G, DiRinzo, “Human sosial behavior: concepts end principles of sociology”. Holt, Rinehart end Winston, USA. 1990.
- Giddens., Anthony., “The conctitution of Society: Outline of the Theory of Structuration”,. Cambridge, Polity Press, 1995.
- Giddens.,Anthoni, “Kapitalisme dan Teori Sosial Moderen, Suatu Analisis Karya Tulis Marx Durkheim dan Max Weber”, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1985.

- Happy Bone Zulkarnaen, dkk (editor), “Kelas Menengah Digugat”, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 1993.
- Haryanto, “analisis tahap-tahap gerakan mahasiswa Indonesia 1974 dan 1978” laporan penelitian Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Haryatmoko., “Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan, Menelanjangi Mekanisme dan teknik Kekuasaan Bersama Foucault” dalam Majalah BASIS, No. 01-02, tahun ke-51, Januari-Februari 2002.
- Henry A. Landsberger dan Yu. G. Alekandrov., “Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial”, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
- Heru Nugroho., “Kritik Habermas Terhadap Postmodernisme dan Relevansinya bagi Pemahaman Pembangunan”, dalam “Kritik Sosial, Dalam Wacana Pembangunan”, UII Press, Yogyakarta, Juni 1999.
- Heru Nugroho., “Menumbuhkan Ide-ide Kritis”, Pustaka Pelajar., Yogyakarta, cet. II, tahun 2001.
- Jang A. Muttalib dan Sujarwo., Gelandangan Dalam Kancah Revolusi, dalam Gelandangan Pandangan Ilmu Sosial, LP3ES, Jakarta,
- Jhonshon, Paul, Doyle., “Teori Sosiologi Klasik dan Modern”, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1988.
- Kartini Kartono., “Pengantar Metodologi Riset Sosial”, Penerbit Mandur Madu, Bandung, 1990.
- Kependudukan UGM, penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1985.
- Lexy J. Moleong., “Metode Penelitian Kualitatif” ., PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, cet.II, 1990.
- Majalah Balairung, Edisi NO. 28.Th.XIII/1998.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi (peny.),

- “Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota”, diterbitkan untuk Yayasan Obor Indonesia dan Pusat Penelitian dan Studi
- Mansour Fakih., “Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Media Ekspresi., “Musik Jalanan dan Pengamen”., No. 008 Th. Ke. 2 April 2001.
- Mirsel, Robert, “Teori Pergerakan Sosial”, Insis Press, Yogyakarta, Maret 2004.
- Mohtar Mas’oed, dkk (ed.), “KEKERASAN KOLEKTIF, Kondisi dan Pemicu”, P3PK UGM, Yogyakarta, Desember 2000.
- Muhadi Sugiono., “Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga”, Pustaka Pelajar Yogyakarta, Oktober 1999.
- Onghokham., “Gelandangan Sepanjang Zaman” dalam “GELANDANGAN, Pandangan Ilmuan Sosial, LP3ES”, tahun 1991.
- rif Budiman., “Teori Pembangunan Dunia Ketiga”, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Rose., I, Petter “Sociology: Inquiring into society” confield press San Fransisco, 1977.
- Safiul Arif (ed.), “Mengenal dan Mengkritik Gramsci” dalam “Pemikiran-Pemikiran Revolusioner”, Averroes Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Januari 2003.
- Scott., C. James, “MORAL EKONOMI PETANI, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara”, LP3ES, Jakarta, September 1981.
- Sesetiawan., “KONFLIK SOSIAL, Kajian Sosiologis

- Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Simon., Roger “Gagasan-gagasan Politik Gramsci”, Insis Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Oktober 1999
- SKH. Kompas, Sabtu, 24 Juli 2004.
- Spardley., P, James, “Metode Etnografi”, PT Tiara Wacana Yogyakarta, 1997.
- Spradly., James “ The Ethnographic Interview” Holt-Rinehartand Winston, New York, 1980.
- Stalin, J.W. “Matrrialisme Dialektika dan Historis”, Yayasan Pembaharuan, Jakarta, 1955.
- Suhartono W. Pranoto., “REVOLUSI AGUSTUS, Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional”, Lopera Pustaka Utama,
- Susetiawan., “Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial”, dalam “Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan”, Moh. Mahfud MD, dkk (ed.), UII Press, Yogyakarta, Juni 1999.
- Tarrow., Sidney, “POWER IN MOVEMENT, Social Movement, Collective Action and Politics”, Cambridge University Press, 1994.
- Timur Mahardika., “GERAKAN MASSA, Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan Secara Damai”, Lopera Pustaka Utama, Yogyakarta, 1998.
- Transpiosa Riomandha., “Dunia (Citra) Kaki Lima Malioboro”, dalam “PERMAINAN TAFSIR, Politik Makna di Jalan pada Penghujung Orde Baru”, Penerbit INSIST Press dan Jerat
- Wertheim, W.F., “Gelombang Pasang Emansipasi”, Nugroho Kacasingkana dan Joesoef Isak (ed), Garba Budaya dan

- ISAI (Institut Studi Arus Informasi), Jakarta, 1979.
- William and Edwin, "Isme-isme Dewasa ini", Penerbit Erlangga, Jakarta, 1987.
- Wilson., Jhon, Introduction to sosial movement, basic books, Inc., publishers, New York, 1973.
- Y. Argo Twikromo 'Gelandangan Yogyakarta', Sesuatu Kehidupan dalam Bingkai Tatanan Sosial-Budaya "Resmi", Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999.
- Yap Thiam Hien., Kata Pengantar, dalam Eric Hoffer "GERAKAN MASSA", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988. Yogyakarta, Januari 2000.



## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

ABDULLAH MUZAKKAR: lahir di Desa Mujur-Lombok Tengah, tanggal 24 Pebruari 1976, dari pasangan Amrillah-Djami'ah. Anak ketiga dari empat bersaudara. Memiliki satu istri bernama Zakrah seorang Guru PNS dan tiga orang anak: Revo, Handika, dan Zakira. Berumah di Dusun Tanaq Beaq Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah NTB.

Aktivitas sehari-hari sebagai Dosen Tetap dan jabatan struktural sebagai Dekan di Universitas Hamzanwadi Pancor. Disela-sela waktu luangnya melakukan kerja-kerja pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan lewat lembaga ELKAM.

